

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN *TRADE OPENNESS*
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus pada Negara-Negara BRICS Tahun 2014-2020)**

(Skripsi)

Oleh

Nova Elia

NPM 1911021005



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN *TRADE OPENNESS* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus pada Negara-Negara BRICS Tahun 2014-2020)

OLEH

NOVA ELIA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh *Voice and Accountability*, *Government Effectiveness*, *Control of Corruption*, dan *Trade Openness* terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis data panel di lima negara-negara BRICS tahun 2014-2020. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, sementara variabel bebas terdiri dari Indikator *Good Governance* (*Voice and Accountability*, *Government Effectiveness*, dan *Control of Corruption*), dan *Trade Openness*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel bebas yaitu *Voice and Accountability* (VA) dan *Trade Openness* (TO) berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sementara variabel *Government Effectiveness* (GE) dan *Control of Corruption* (CC) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara BRICS tahun 2014-2020. Hasil perhitungan uji secara bersama-sama menghasilkan bahwa seluruh variabel bebas yang terdiri dari *Voice and Accountability* (VA), *Government Effectiveness* (GE), *Control of Corruption* (CC), dan *Trade Openness* (TO) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: *Good Governance*, *Trade Openness*, Pertumbuhan Ekonomi, Data Panel

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOOD GOVERNANCE AND TRADE OPENNESS ON ECONOMIC GROWTH (Case Study in BRICS Countries 2014-2020)

BY

NOVA ELIA

The purpose of this study is to analyze the effect of Voice and Accountability, Government Effectiveness, Control of Corruption, and Trade Openness on Economic Growth. The analytical method used in this study is the panel data analysis method in the five BRICS countries in 2014-2020. The dependent variable in this study is Economic Growth, while the independent variables consist of Good Governance Indicators (Voice and Accountability, Government Effectiveness, and Control of Corruption), and Trade Openness. The results of this study indicate that partially the independent variables namely Voice and Accountability (VA) and Trade Openness (TO) have a positive and significant effect on increasing economic growth while the Government Effectiveness (GE) and Control of Corruption (CC) variables have no significant effect on economic growth. in five BRICS countries in 2014-2020. The results of the joint test calculations show that all independent variables consisting of Voice and Accountability (VA), Government Effectiveness (GE), Control of Corruption (CC), and Trade Openness (TO) simultaneously have a significant effect on economic growth.

Keywords: Good Governance, Trade Openness, Economic Growth, Panel Data

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN *TRADE OPENNESS*
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI**

(Studi Kasus pada Negara-Negara BRICS Tahun 2014-2020)

Oleh

NOVA ELIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA

EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi

Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

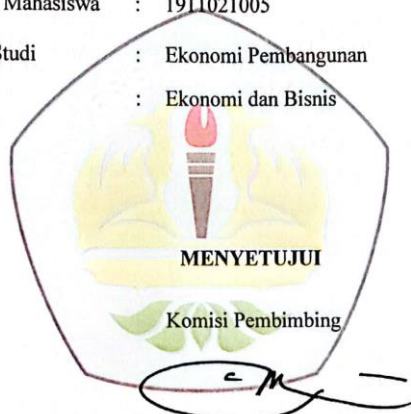
Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN
TRADE OPENNESS TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus pada Negara-Negara BRICS
Tahun 2014-2020)**

Nama Mahasiswa : **Nova Elia**

No. Induk Mahasiswa : 1911021005

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Dr. Marselina, S.E., M.P.M.
NIP. 19670710 199003 2 001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.

NIP. 19631215 198903 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Marselina, S.E., M.P.M.



Penguji I : Moneyzar Usman, S.E., M.Si



Penguji II : Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 Juni 2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Mei 2023
Penulis



NOVA ELIA

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Penggawa V Ulu pada tanggal 10 Mei 2001, sebagai putri ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak Zulkarnain dan Ibu Yusdalena. Penulis memiliki dua kakak perempuan bernama Ade Karlina dan Ferlida Fitri serta adik perempuan yang bernama Ulta Setia.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Penggawa V Ulu Kab. Pesisir Barat pada tahun (2006-2013). Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat (2013-2016). Lalu melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat (2016-2019). Saat kelas tiga SMA, penulis diutus menjadi perwakilan dari sekolah mengikuti Olimpiade Koperasi Mahasiswa Indonesia Cabang Rangking 1 yang diselenggarakan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung dan mendapat peringkat 1 dan seluruh siswa yang tergabung dalam satu tim perwakilan sekolah, gabungan cabang lomba lain berhasil menjadikan sekolah sebagai juara umum dan mendapat piala bergilir.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan menerima beasiswa Bidikmisi. Penulis mengambil konsentrasi Ekonomi Publik dan Fiskal. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa kegiatan organisasi yaitu Anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (Himepa) tepatnya Anggota Staf Kesekretariatan Tahun 2019-2020 dan Anggota Bidang 1 Keilmuan dan Penalaran Tahun 2020-2021.

Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Putra Daerah Universitas Lampung Periode I, di Desa Way Jambu, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat selama 40 hari. Penulis sempat mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) seperti Pertukaran Mahasiswa di Universitas Palangka Raya (UPR) tahun 2021.

Selama kuliah juga pernah mengikuti beberapa kegiatan perlombaan dan meraih Medali Perunggu Lomba Business Plan yang diselenggarakan oleh Edutainer Nusantara Fair Indonesia tahun 2021 dan Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional yang diselenggarakan oleh Organisasi Mahasiswa Pendidikan Eksakta Universitas Lampung tahun 2021. Penulis juga pernah mengikuti pengabdian masyarakat di Desa Wonoharjo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus tahun 2019.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”.

-QS. Al-Baqarah:286

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”.

-Ali bin Abi Thalib

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat”.

-Zig Ziglar

“Semua kekecewaan harus dialirkan menjadi energi positif untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih keras lagi, sehingga berbagai prestasi yang lebih baik dan lebih tinggi bisa diraih”.

-Sri Mulyani

“Fokuslah pada tujuanmu, yakinlah akan usahamu, dan sertakanlah restu orangtua di setiap langkahmu kelak kebahagiaan akan mudah menghampirimu ”.

-Nova Elia

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alam, dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya serta teriring shalawatku kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati, ku persembahkan Karya Tulis ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tersayang

Zulkarnain

Yusdalena

Terima kasih kepada Bapak & Ibu yang telah senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materi untuk kesuksesanku hingga saat ini. Berkat Bapak & Ibu lah semuanya menjadi mungkin sehingga aku bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, perjuangan, kesabaran dalam mendidik, nasihat, cinta dan kasih sayang, serta lantunan doa yang tak pernah henti kalian berikan kepadaku hingga menjadi kekuatanku dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup.

***Untuk Kedua Kakakku, Ade Karlina dan
Ferlida Fitri, serta Adikku, Ulta Setia***

Terima kasih atas semua doa serta dukungannya selama ini, terima kasih juga telah menjadi motivasi dan pengingatku selama hidup.

Serta

***Almamater tercinta
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis***

Universitas Lampung

Semoga karya kecil ini bermanfaat

SANWANCANA

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh *Good Governance* dan *Trade Openness* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Negara-Negara BRICS Tahun 2014-2020)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis masih sangat terbatas. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun dengan adanya bimbingan, dukungan serta saran dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M., selaku dosen pembimbing atas kesediaan waktu memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran,

dukungan dan saran, serta motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

5. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si., selaku dosen pembahas I yang senantiasa memberi pengarahan, kritik dan saran, serta dukungan dan bantuan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si., selaku dosen pembahas II yang senantiasa memberi pengarahan, kritik dan saran, serta dukungan dan bantuan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan yang telah memberikan banyak sekali bantuan dan pelayanan untuk kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
9. Bank Indonesia Institute (BINS) yang telah memberikan dana bantuan penelitian melalui program Bantuan Penelitian (Banlit).
10. Kedua orang tua saya, Zulkarnain dan Yusdalena yang tiada henti memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang yang terbaik kepada penulis, serta kakakku, Ade Karlina dan Ferlida Fitri, serta adikku tercinta, Ulta Setia, terima kasih untuk semua doa serta dukungannya selama ini. Semoga kita empat bersaudara bisa menggapai cita-cita dan terus berusaha membahagiakan Bapak dan Ibu.
11. Nenekku tercinta Nurma, Ibu ku dan Nakan ku, Nursiyah dan Yesi Puspita, serta seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya.
12. Sahabat-sahabat semasa kuliah dalam grup *Freinds*, Diah Intan Pratiwi, Desy Ratnasari, Meling Malida, Rily Yunita, Wanda Aprillia Melati, dan Elsa Fika Akhrani. Terima kasih atas semua kebaikan, motivasi, dan serta dukungan kalian dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
13. Kakak tingkat angkatan 2018 Ekonomi Pembangunan Konsentrasi Publik dan Fiskal, Kak Saepudin, Kak Yusril, Kak Fakhri, Kak Budhi, dan Kak Widya. Terima kasih telah memberikan saran, dukungan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi serta berbagi pengalaman mengenai kehidupan di kampus.

14. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2019 dan teman-teman sekonsentrasi Ekonomi Publik dan Fiskal, Wika, Ulya, Anggi, Puspa, Bagas, Aini, Lusi, Icha, Alifia, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata 2022, Denita, Fhatia, Adistya, Shinta, Eri, Bagus, Alkat, dan Farhan. Terima kasih atas cerita, kenangan, pengalaman dan kesabaran kalian selama 40 hari kebersamaan kita. Semoga senantiasa diberi kemudahan dalam mencapai kesuksesan yang diinginkan.
16. Teman-teman SMA, Reka, Desi, Rosa, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan diperlancar menuju kelulusannya.
17. Almamater yang ku banggakan, Universitas Lampung.
18. Pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga segala dukungan, bimbingan, dan doa yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 06 Juni 2023
Penulis

Nova Elia

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 24 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 24 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 24 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 27 |
| 2.1 Tinjauan Teoritis | 27 |
| 2.1.1 Fungsi dan Peran Pemerintah | 27 |
| 2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi | 30 |
| 2.1.3 <i>Good Governance</i> | 34 |
| 2.1.4 Perdagangan Internasional | 46 |
| 2.1.5 Hubungan Antar Variabel | 49 |
| 2.2 Tinjauan Tentang BRICS | 51 |
| 2.3 Tinjauan Empiris | 61 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran..... | 65 |
| 2.5 Hipotesis..... | 65 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | 67 |
| 3.1 Ruang Lingkup dan Jenis Data | 67 |
| 3.2 Definisi Operasional Variabel..... | 68 |
| 3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi | 68 |
| 3.2.2 <i>Voice and Accountability</i> | 68 |
| 3.2.3 <i>Government Effectiveness</i> | 69 |
| 3.2.4 <i>Control of Corruption</i> | 69 |
| 3.2.5 <i>Trade Openness</i> | 70 |
| 3.3 Metode Analisis | 70 |
| 3.4 Metode Estimasi Data Panel | 71 |
| 3.5 Prosedur Analisis Data..... | 71 |
| 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif..... | 71 |
| 3.5.2 Metode Estimasi Regresi Data Panel | 72 |

| | |
|--|------------|
| 3.5.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel | 74 |
| 3.5.4 Pengujian Asumsi Klasik | 75 |
| 3.5.5 Pengujian Hipotesis | 79 |
| 3.5.6 Koefisien Determinasi (R^2) | 81 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 82 |
| 4.1 Temuan Hasil Penelitian | 82 |
| 4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif..... | 82 |
| 4.2 Hasil Pengujian Regresi Data Panel | 84 |
| 4.2.1 Uji Kriteria Pemilihan Model Regresi Data Panel | 84 |
| 4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik..... | 85 |
| 4.2.3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel..... | 88 |
| 4.2.4 Pengujian Statistik | 89 |
| 4.2.5 Koefisien Determinasi (R^2)..... | 91 |
| 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian | 92 |
| 4.3.1 Pengaruh <i>Voice and Accountability</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Lima Negara BRICS..... | 93 |
| 4.3.2 Pengaruh <i>Government Effectiveness</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Lima Negara BRICS..... | 97 |
| 4.3.3 Pengaruh <i>Control of Corruption</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Lima Negara BRICS | 102 |
| 4.3.4 Pengaruh <i>Trade Openness</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Lima Negara BRICS | 107 |
| 4.4 <i>Indifidual Effect</i> | 110 |
| V. KESIMPULAN DAN SARAN | 118 |
| 5.1 Kesimpulan | 118 |
| 5.2 Saran..... | 122 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 129 |
| LAMPIRAN..... | 14 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Informasi Umum Negara BRICS 2019 | 2 |
| 2. Pertumbuhan Ekonomi Negara BRICS 2014-2020 (Persen) | 5 |
| 3. Indikator <i>Good Governance</i> BRICS Berdasarkan Rata-Rata per Tahun 2014-2020 | 10 |
| 4. <i>Voice and Accountability</i> Negara BRICS 2014-2020 (Indeks)..... | 13 |
| 5. <i>Government Effectiveness</i> Negara BRICS 2014-2020 (Indeks) | 15 |
| 6. <i>Control of Corruption</i> Negara BRICS 2014-2020 (Indeks)..... | 16 |
| 7. <i>Value of Imports and Exports of Goods and Commercial Services</i> (<i>Million US\$</i>) | 19 |
| 8. <i>Trade Openness</i> Negara BRICS 2014-2020 (Persen) | 20 |
| 9. Tinjauan Empiris | 61 |
| 10. Ringkasan Variabel Penelitian | 67 |
| 11. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian..... | 82 |
| 12. Hasil Uji Chow | 84 |
| 13. Hasil Uji LM | 85 |
| 14. Hasil Uji Hausman | 85 |
| 15. Hasil Deteksi Multikolinieritas, <i>Correlation</i> | 86 |
| 16. Hasil Regresi Uji <i>White</i> | 87 |
| 17. Hasil Estimasi Regresi Data Panel Pendekatan <i>Fixed Effect</i> | 88 |
| 18. Hasil Uji Parsial (Uji t) | 89 |
| 19. Hasil Uji Simultan (Uji F)..... | 91 |
| 20. Nilai <i>Individual Effect</i> Intersep di Lima Negara BRICS | 110 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 1. Pertumbuhan ekonomi BRICS, EURO AREA-5, dan ASEAN-5 2021 dalam persen secara rata-rata | 6 |
| 2. Hubungan <i>Voice and Accountability</i> dan Pertumbuhan Ekonomi Negara BRICS Berdasarkan Rata-rata per Tahun | 13 |
| 3. Hubungan <i>Government Effectiveness</i> dan Pertumbuhan Ekonomi Negara BRICS Berdasarkan Rata-rata per Tahun | 15 |
| 4. Hubungan <i>Control of Corruption</i> dan Pertumbuhan Ekonomi Negara BRICS Berdasarkan Rata-rata per Tahun | 17 |
| 5. Hubungan <i>Trade Openness</i> dan Pertumbuhan Ekonomi Negara BRICS Berdasarkan Rata-rata per Tahun | 21 |
| 6. Kerangka Pemikiran | 65 |
| 7. Hasil Uji Normalitas | 86 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah "BRICS" awalnya digunakan untuk merujuk pada aliansi ekonomi BRIC, yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, dan Cina, pada tahun 2001 oleh Jim O'Neal, seorang ekonom Amerika di lembaga keuangan global Goldman Sachs (Priangani, 2015). Lebih lanjut menurut Priangani (2015) dengan berjalannya waktu negara-negara BRIC ingin memperluas pengaruhnya pada negara-negara berkembang dengan mulai menjalin kerja sama dengan Afrika Selatan atas undangan Cina karena Cina sudah dulu mulai secara aktif membina hubungan kerja baik di ekonomi, politik, dan investasi di benua Afrika, yang berpotensi memasok bahan pangan, mineral, dan energi dunia, di masa depan. Fajarlie (2022) menjelaskan bahwa negara-negara BRICS itu organisasi antar pemerintahan internasional yang dibentuk sejak 2006 yang dulunya bernama BRIC sebelum Afrika Selatan bergabung pada September 2010 dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama pada 16 Juni 2009 di Kota Yekaterinburg, Rusia.

BRICS adalah lima negara yang tergabung dalam kelompok untuk mendukung dan mewadahi negara-negara yang baru memasuki sektor industri yang diyakini sebagai juru bicara negara berkembang dan diyakini dapat mewakili hampir seperlima dari perekonomian global (Priangani, 2015). Dalam alasan perekonomian global negara-negara BRICS bertujuan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan negara, terutama pada saat negara-negara anggota mengalami krisis ekonomi akibat pengaruh Eropa dan Amerika. Asosiasi ekonomi BRICS juga bekerja untuk memainkan peran penting dalam kelompok G20 dan G7 sebagai suara perwakilan negara-

negara berkembang untuk mendapatkan pengakuan secara global dan membawa perubahan kuantitatif dengan bantuan yang diberikan.

Secara lingkup internasional melalui perannya dalam menyelesaikan masalah di berbagai bidang, antara lain bidang militer, teknologi, hubungan diplomatik antar bangsa, dan ekonomi dalam skala global (Puspitasari, 2011). Priangani (2015) menjelaskan bahwa hegemonik AS pernah berfungsi sebagai jangkar ekonomi global, tetapi telah berubah sebagai akibat globalisasi, seperti yang terlihat oleh perdagangan bebas dan kebangkitan negara-negara BRIC sebagai kekuatan ekonomi baru.

Kehadiran dan pencapaiannya, kelompok negara BRICS menjadi topik penelitian yang menarik. Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan bahwa tahun 2001 sampai 2010, volume perdagangan negara-negara BRICS meningkat rata-rata 28% per tahun, mencapai US\$230 miliar pada tahun 2010 (Priangani, 2015). Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari USD 16 triliun, atau 20% dari PDB global, negara-negara BRICS pada tahun 2014 memiliki populasi sekitar tiga miliar, atau hampir 40% dari seluruh dunia.

Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh BRICS *Joint Statistical Publication 2020* bahwa *share of population* untuk negara Brazil sebesar 2,7%, Rusia sebesar 1,9%, India sebesar 17,3%, Cina sebesar 18,3%, dan Afrika Selatan sebesar 0,8% yang berarti sebesar 40,9% populasi dunia masih dikuasai oleh negara-negara BRICS dan sisanya 59,1% untuk *rest of the world*.

Tabel 1. Informasi Umum Negara BRICS 2019

| Negara | Area of Teritory (1000 km²) | Capital City | Mid-year population (Million persons) |
|---------------------|---|---------------------|--|
| <i>Brazil</i> | 8.516 | <i>Brasilia</i> | 210 |
| <i>Russia</i> | 17.125 | <i>Moscow</i> | 147 |
| <i>India</i> | 3.287 | <i>New Delhi</i> | 1.338 |
| <i>China</i> | 9.600 | <i>Beijing</i> | 1.398 |
| <i>South Africa</i> | 1.221 | <i>Pretoria</i> | 59 |

Sumber: BRICS *Joint Statistical Publication (2020)*

Tabel 1, menunjukkan bahwa untuk data terbaru pada pertengahan 2019 negara Brazil memiliki 210 penduduk juta orang dengan pembagaian area

kawasan 8.516 per 100 km². Rusia memiliki 147 penduduk juta orang dengan pembagian area kawasan 17.125 per 1000 km². India memiliki 1.338 penduduk juta orang dengan pembagian area kawasan 3.287 per 1000 km². Cina memiliki 1.398 penduduk juta orang dengan pembagian area kawasan 9.600 per 1000 km² dan Afrika Selatan memiliki 59 penduduk juta orang dengan pembagian area kawasan 1.221 per 1000 km². Data bank dunia 2019 menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto negara-negara BRICS mewakili 24% dari dunia (Fajarlie, 2020).

Berdasarkan laporan dari BRICS *Joint Statistical Publication 2020* yang menunjukkan *Gross Domestic Product (GDP)* dalam (*current prices/billion US\$*) negara-negara BRICS tahun 2019. Brazil memiliki 1840 Milyar US\$, Rusia memiliki 1700 Milyar US\$, India memiliki 2713 Milyar US\$, Cina memiliki 14.363 Milyar US\$, dan Afrika Selatan memiliki 351 Milyar US\$. Untuk *Per capita GDP* dalam (*current prices/US\$*), Brazil memiliki 8754 US\$, Rusia memiliki 11.584 US\$, India memiliki 2045 US\$, Cina memiliki 10.276 US\$, dan Afrika Selatan memiliki 5979 US\$.

Untuk kegiatan ekonomi tahun 2019 pada *share of primary industry to GDP*, Brazil memiliki 5,2%, Rusia memiliki 3,8%, India memiliki 2,3%, Cina memiliki 7,1%, dan Afrika Selatan memiliki 10,4%. Untuk *share of secondary industry to GDP*, Brazil memiliki 20,9%, Rusia memiliki 35,9%, India memiliki 26,6%, Cina memiliki 39%, dan Afrika Selatan memiliki 20,9%. Untuk *share of tertiary industry to GDP*, Brazil memiliki 73,9%, Rusia memiliki 60,3%, India memiliki 54,0%, Cina memiliki 53,9%, dan Afrika Selatan memiliki 68,7%. Pada pembagian area kawasan untuk lahan pertanian pada *cereals production*, untuk Brazil sebesar 99 juta ton (2018), Rusia sebesar 121 juta ton (2019), India sebesar 273.5 juta ton (2019), Cina sebesar 614 juta ton (2019), dan Afrika Selatan sebesar 19 juta ton (2019). Untuk *meat production*, Brazil menghasilkan 25.091 (1000 tons) tahun 2017, Rusia menghasilkan 10.866 (1000 tons) tahun 2019, India menghasilkan 8114 (1000 tons) tahun 2018, Cina menghasilkan 77.588 (1000 tons) tahun 2019, dan Afrika Selatan menghasilkan 2893 (1000 tons) tahun 2017.

Bersumber dari *BRICS Joint Statistical Publication 2020* bahwa *value of exports of goods and commercial services* untuk Brazil sebesar 271.977 juta US\$ (2018), Rusia sebesar 481.493 juta US\$ (2019), India sebesar 238.097 juta US\$ (2019), Cina sebesar 2.643.377 juta US\$ (2019), dan Afrika Selatan sebesar 104.916 juta US\$ (2019). Untuk *foreign exchange reserves*, Brazil memiliki 365.544 juta US\$ (2018), Rusia memiliki 433.297 juta US\$ (2019), India memiliki 481.892 juta US\$ (2019), Cina memiliki 3.107.924 juta US\$ (2019), dan Afrika Selatan memiliki 55.058 juta US\$ (2019).

Menjalinkan hubungan yang solid antar pada lima negara ini bukanlah hal yang mudah. Negara-negara BRICS bergabung dengan asal benua yang berbeda, Brazil dari Benua Amerika (Amerika Serikat), Rusia dari Benua Eropa Timur untuk bagian barat dan Benua Asia untuk bagian utara. Sementara India dari Benua Asia (Asia Selatan), Cina dari Benua Asia (Asia Timur), dan Afrika Selatan dari Benua Afrika (Afrika Selatan). Perekonomian kelima negara tersebut tidak saling melengkapi, sehingga tidak mampu menopang satu sama lain. Negara-negara Asia lainnya adalah konsumen utama komoditas Cina, dan ekonomi Brazil diarahkan untuk memenuhi permintaan negara-negara Amerika Selatan. Selain itu, sistem politik negara-negara anggota BRICS yang beragam membuat sulit untuk menyatukan mereka menjadi satu blok.

Secara khusus, ekonomi antar negara berbeda secara signifikan karena Afrika Selatan lebih berpusat pada produk pertanian, Brazil menjual bahan mentah dan produk industri, Cina hanya mengekspor barang industri, Rusia hanya mengekspor bahan mentah, dan ekonomi India sebagian besar masih tertutup. Akibatnya, negara-negara ini cukup beragam, namun pasar yang menarik menyatukan negara-negara ambang industri ini (Priangani, 2015).

Pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan ekonomi suatu negara, yang menghasilkan lebih banyak produk dan jasa, pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara (Marselina, 2021). Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu

indikator penting sebagai cerminan kondisi perekonomian suatu negara dan dapat menjadi acuan dalam membuat serta merumuskan kebijakan berdasarkan kondisi perekonomian yang sesuai. Nilai GDP yang menghitung nilai produk dan jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja lokal dan asing selama periode waktu tertentu dan disesuaikan dengan inflasi, dapat digunakan untuk menentukan jumlah pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Aida *et al.*, 2021).

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditunjukkan oleh kinerja perekonomian yang baik (Dewi & Triaryati, 2015). Namun, bagi beberapa negara di dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi bukanlah tugas yang mudah. Berbagai permasalahan, terutama di negara berkembang dan terbelakang, akan berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut, antara lain rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, tingginya angka kemiskinan, usia harapan hidup yang pendek, dan ketimpangan pendapatan. Sehingga permasalahan yang sering dijumpai memang tak dipungkiri muncul menjadi persoalan serius dan sekaligus menjadi tujuan jangka panjang banyak negara (Todaro & Smith, 2011).

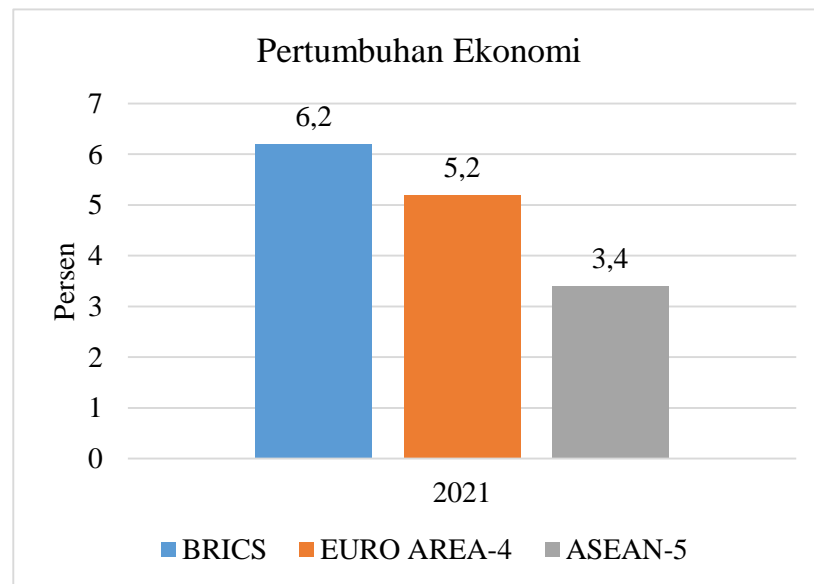
Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Negara BRICS 2014-2020 (Persen)

| Tahun | Brazil | Rusia | India | Cina | Afrika Selatan |
|--------|--------|-------|-------|------|----------------|
| 2014 | 0.5 | 0.74 | 7.41 | 7.43 | 1.41 |
| 2015 | -3.55 | -1.97 | 8 | 7.04 | 1.32 |
| 2016 | -3.28 | 0.19 | 8.26 | 6.85 | 0.66 |
| 2017 | 1.32 | 1.83 | 6.8 | 6.95 | 1.16 |
| 2018 | 1.78 | 2.81 | 6.45 | 6.75 | 1.49 |
| 2019 | 1.22 | 2.2 | 3.74 | 5.95 | 0.11 |
| 2020 | -3.88 | -2.68 | -6.6 | 2.24 | -6.43 |
| Rerata | -0.84 | 0.45 | 4.87 | 6.17 | -0.04 |

Sumber: *World Bank (2022), data diolah*

Tabel 2 menunjukkan bahwa lima negara BRICS yaitu Brazil sebesar -0,84%, Rusia sebesar 0,45%, India sebesar 4,87%, Cina sebesar 6,17%, dan Afrika Selatan sebesar -0,04% memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata dari tahun 2014 hingga 2020. Setiap tahunnya, kelima negara tersebut menghadapi kenaikan dan penurunan yang berbeda-beda dari lima negara tersebut dapat terjadi karena peningkatan dan penurunan faktor produksi dan efek

pandemi Covid-19 pada tahun 2020. *World Economic Outlook* memprediksi pertumbuhan ekonomi BRICS global akan kembali tumbuh positif bahkan melampaui Euro Area (Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol) dan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam), yaitu sebesar 5,12% rata-rata (IMF, 2020). Ramalan tersebut terbukti dengan laporan perekonomian IMF tahun 2021 yang diperlihatkan dalam Gambar 1. di bawah ini.



Sumber: *World Economic Outlook from International Monetary Fund (2021), data diolah*

Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi BRICS, EURO AREA-5, dan ASEAN-5 2021 dalam persen secara rata-rata.

Berdasarkan Gambar 1, bahwa secara rata-rata pada 2021 yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kelompok Negara BRICS sebesar 6,2% dibandingkan Kelompok Negara EURO AREA-4 dan ASEAN-5 yang sebesar 5,2% dan 3,4%. Hal yang menarik adalah pergerakan pertumbuhan ekonomi yang tak menentu dalam periode 2014-2020 dan kembali meningkat secara positif pada 2021 dengan baik yang dialami BRICS ini merupakan suatu pencapaian yang bagus di tengah perekonomian yang sedang dalam pemulihan. Bahkan, sebelumnya karya besar oleh Jim O'Neil dengan mengeluarkan buku terbarunya, *"The Growth Map: Economic Opportunity in the BRICS and Beyond,"* yang kurang lebih isinya bahwa BRICS yang lebih khusus pada empat negara terbesarnya yaitu Brazil, Rusia, Cina, dan India diprediksi akan

tumbuh sebagai wilayah pertumbuhan terbesar abad ke-21 karena mengingat perkembangan masa depan dalam perekonomian global dan wilayah pertumbuhan potensial memiliki potensi besar di masa depan nantinya (O'Neil, 2011). Negara-negara BRICS memiliki kinerja ekonomi yang jauh lebih baik dibanding negara maju karena terjadi ekspansi ekonomi akibat peningkatan input, skala besar populasi, dan sumber daya (Radulescu *et al.*, 2014). Peringkat efisiensi rata-rata global dimiliki oleh negara berkembang di posisi teratas (India, Cina, dan Brazil) yang menonjol di atas rata-rata (Camioto & Pulita, 2022). Dengan demikian, sangat penting untuk variabel relevan saat ini yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara BRICS.

Jika diperhatikan, pertumbuhan ekonomi sering dikaji secara luas dengan menggunakan faktor-faktor ekonomi antara lain investasi, suku bunga, inflasi, FDI (*Foreign Direct Investment*), pajak, dan lain-lain. Wibowo (2013) berpendapat bahwa dewasa ini, tata kelola yang baik dapat mendorong berjalannya mekanisme pasar yang efisien, sehingga menarik untuk mengkaji variabel-variabel kuantitatif yang jarang diteliti dari sudut pandang tata kelola. Mahriun & Putri (2020) mengemukakan bahwa bantuan atau sumbangsih peran dari berbagai pihak terutama pemerintah sangat dibutuhkan dalam perekonomian sebagai wujud atas kegiatan ekonomi suatu negara selalu menjadi faktor utama yang menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu negara dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Kebijakan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi diharapkan nantinya dapat meningkatkan perekonomian negara tersebut. Pendukung awal gagasan tata pemerintahan yang baik adalah Bank Dunia, UNDP, dan Bank Pembangunan Asia (ADB) lalu berbagai pakar, khususnya di negara-negara terbelakang, telah mengembangkan mengenai konsep pemerintahan (Annur, 2019).

Samarasinghe (2018) berpendapat bahwa tata kelola merupakan konsep yang luas dan kompleks dengan pilar-pilarnya. Pengkajian mengenai peran *Good Governance* yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 30 tahun belakangan ini telah dilakukan yang terbukti dengan munculnya beberapa studi

pustaka seperti yang dilakukan tokoh terkenal Daniel Kaufmann di 2002 dan 2010 (Kaufmann, 2010). Hasil penelitian yang didapat Kaufmann muncul menjadi inspirasi bagi penelitian seterusnya dengan berbagai metode regresi Widjanarko (2021) bahwa enam indikator terkait memiliki pengaruh dengan efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut bahwa hasil penelitian lainnya menghasilkan dengan adanya perbaikan pada *Good Governance* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tepatnya terdapat dua indikator penting yaitu efektivitas pemerintah dan supremasi hukum (Adzima & Baita, 2019).

Kajian empiris oleh Widjanarko (2021) mengungkapkan bahwa stabilitas politik dan kebebasan berpikir dan bertindak berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi empiris juga telah dilakukan di 21 negara di Afrika Utara dan Timur Tengah (MENA) menghasilkan bahwa jika terjadi peningkatan capaian satu unit maka terjadi kenaikan sebesar dua persen pada pendapatan per kapita (Emara & Chiu, 2016). Alam *et al.*, (2017) menggunakan data panel dari 81 negara menunjukkan bahwa efisiensi pemerintah secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penjelasan lebih lanjut diberikan, menekankan peran penting tata pemerintahan yang baik dalam pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs).

Menurut hasil kajian dari Radzeviča & Bulderberga (2018) mengenai dampak dari beberapa pendorong indikator kelembagaan pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan indikator pemerintahan yang baik menghasilkan efektivitas pemerintah dan kualitas peraturan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Studi empiris juga dilakukan di Cina yang menghasilkan bahwa kualitas tata kelola memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi karena tata pemerintahan yang baik memperkuat “bantuan” atau melemahkan “indikasi perebutan” kekuasaan (Liu *et al.*, 2018). Menurut temuan penelitian oleh Liu *et al.*, (2018), kualitas kelembagaan dapat mendorong aktivitas ekonomi di negara-negara tersebut karena berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 29 negara berkembang dari tahun 2002 hingga 2015.

Indikator tata kelola memiliki pengaruh dan pada akhirnya menentukan kemajuan ekonomi negara dalam dua cara. Pertama, tata kelola yang lebih baik menciptakan serangkaian lembaga penting yang meningkatkan produktivitas modal manusia dan fisik, dan menarik investasi untuk mengembangkan modal manusia dan fisik. Kedua, tata kelola yang lebih baik meningkatkan lembaga-lembaga utama negara dan menciptakan seperangkat kebijakan pemerintah yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi sehingga institusi dan kebijakan pemerintah yang lebih baik membuat lingkungan yang menarik untuk investasi yang tinggi dalam manusia dan fisik pengembangan modal, sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi (Samarasinghe, 2018). Setiap negara terutama yang tergolong negara berkembang berkeinginan untuk melakukan berbagai bidang dengan harapan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga terjadi kemakmuran masyarakat dan tercapainya keadilan dengan pemerataan pendapatan yang dirasakan.

Dalam *Governance Capacities in the BRICS from Sustainable Governance Indicators* disebutkan bahwa terlepas dari peningkatan yang mengesankan dan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut pada negara-negara BRICS, ternyata negara-negara BRICS dihadapkan dengan masalah pembangunan internal yang serius sehingga pencegahan dan penyelesaian secara efektif sangat diperlukan agar tetap di jalur pembangunan yang kuat sambil memastikan keberlanjutan jangka panjang (Stiftung, 2013). Kelemahan BRICS diidentifikasi adalah tingkat korupsi yang tinggi dan ideologi politik yang berbeda (Radulescu *et al.*, 2014). Mengingat kondisi sosial ekonomi dan politik yang berbeda yang membuat mekanisme penyelesaian permasalahan akan berbeda satu negara ke negara lainnya.

Kelompok BRICS apabila disandingkan perekonomian satu sama lain secara umum dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan diversifikasi di Cina, perekonomian yang didominasi oleh bahan mentah di Rusia, *shrinking societies* (penyusutan masyarakat atau partisipasi masyarakat yang terbatas) di Cina dan Rusia, pertumbuhan populasi di India, sistem otoriter, pluralistik

demokrasi dan strategi pembangunan yang didorong oleh ekonomi nasional yang diliberalisasi (Joeriben & Steinhilber, 2008).

Pemerintahan sebagai perangkat institusi tradisi dan institusi untuk menjalankan kewenangannya (Kaufmann *et al.*, 2010). Suara dan Akuntabilitas, Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan, Efektivitas Pemerintah, Kualitas Regulasi, Supremasi Hukum, dan Pengendalian Korupsi adalah enam karakteristik yang disebut *Worldwide Governance* digunakan untuk mengukur tata kelola (*Governance*). Menurut tiga laporan Bank Dunia, pemerintahan yang stabil, kondisi sosial ekonomi yang membaik, dan pemerintahan yang baik semuanya berjalan seiring. Tata kelola yang baik dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui pemberian pinjaman dan hibah (Kaufmann *et al.*, 2011).

Tabel 3. Indikator *Good Governance* BRICS Berdasarkan Rata-Rata per Tahun 2014-2020

| Negara | VA | PS | GE | RQ | RL | CC |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Brazil | 2.80 | -2.83 | -2.07 | -0.98 | -1.38 | -3.02 |
| Rusia | -7.61 | -5.34 | -0.99 | -3.38 | -5.59 | -6.14 |
| India | 2.44 | -6.23 | 0.91 | -1.89 | -0.22 | -2.18 |
| Cina | -11.08 | -2.69 | 3.37 | -1.83 | -1.83 | -1.72 |
| Afrika Selatan | 4.55 | -1.52 | 0.90 | 0.76 | -0.38 | -0.32 |
| Rerata | -1.78 | -3.72 | 0.42 | -1.46 | -1.88 | -2.68 |

Sumber: *World Bank (2022), data diolah*

Tabel 3, menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan baik dari urutan tertinggi secara rata-rata BRICS terdapat pada indikator *Government Effectiveness* (0.42), *Regulatory Quality* (-1.46), *Voice and Accountability* (-1.78), *Rule of Law* (-1.46), *Control of Corruption* (-2.68), dan *Political Stability and Absence of Violence* (-3.72).

Tiga dari enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini, *Voice and Accountability* (VA), *Government Effectiveness* (GE), dan *Control of Corruption* (CC) yang dipilih berdasarkan enam indikator *Good Governance* dengan skor rata-rata tertinggi pada Tabel 3 yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara BRICS. Indikator Pengendalian Korupsi digunakan sebagai pengganti indikator

Kualitas Regulasi karena penelitian sebelumnya oleh Wibowo (2013) dan Bayar (2016) tidak menemukan pengaruh yang jelas antara Kualitas Regulasi dan pertumbuhan ekonomi.

Karena pembuat kebijakan dan *rent seeker* tetap mengabaikan kepentingan pihak yang seharusnya lebih berhak menikmati dan diuntungkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut, padahal pemerintah mampu membuat dan melaksanakan kebijakan dan peraturan publik serta mengembangkan sektor swasta sebagai implementasi dari Kualitas Regulasi, hal ini masih belum bisa dijadikan tolak ukur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Wibowo, 2013). Kepentingan masyarakat di negara BRICS masih kurang diperhatikan yang ditunjukkan oleh ketimpangan sosial yang melebar yang terus membebani negara (Hartmann *et al.*, 2011). Menurut Kaufmann *et al.*, (2010) bahwa kemampuan pemerintah untuk mengambil keputusan kebijakan untuk mendorong perluasan sektor swasta digambarkan dengan kualitas regulasi, tetapi sebagai indikator pelengkap tata kelola dari efektivitas pemerintah. Untuk indikator *Rule of Law* tidak dipilih karena pengoperasian *Rule of Law* di negara-negara maju akan lebih terlihat dan kuat daripada di negara berkembang sehingga ketika negara berkembang menderita dari gangguan aturan hukum yang ditunjukkan lemahnya pengaruhnya maka ada kemungkinan peningkatan korupsi, pengambilalihan dan kekerasan akan bermunculan (Haggard & Tiede, 2011). Stiftung (2013) mengamati bahwa perbedaan antara negara-negara industri dan berkembang sangat besar artinya aturan hukum di negara berkembang termasuk negara anggota BRICS belum secara baik ditegakkan.

Alasan indikator *Political Stability and Absence of Violence* tidak dipilih karena pertimbangan bahwa BRICS memiliki sistem politik yang berbeda-beda (Priangani, 2015) dan hasil temuan penelitian lain, stabilitas politik secara statistik tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Pere, 2015). Pernyataan ini dibuktikan juga oleh Wibowo (2013) bahwa ketidaksignifikan stabilitas politik karena stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi adalah tujuan yang independen. Kemajuan yang dibuat menuju satu tujuan tidak selalu berkorelasi dengan kemajuan yang dibuat untuk mencapai

stabilitas politik juga, hanya berdampak kecil pada alokasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas politik.

Hasil penelitian diperkuat lagi oleh Mahriun & Putri (2020) bahwa hasil estimasi stabilitas politik tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian karena termasuk wilayah yang bebas konflik dan perang, seperti dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, hanya terjadi guncangan politik pada masa pemilihan tersebut tidak menyebabkan konflik berkepanjangan sehingga keadaan perekonomian akan kembali stabil dalam jangka pendek dan selama terjadinya proses pergantian atau pemilihan pemerintah, meskipun terjadi kerusuhan atau demonstrasi tetapi kegiatan perekonomian dan bisnis masih tetap berlangsung atau terjadi guncangan dari faktor eksternal, seperti perang dagang yang dilakukan AS-Cina juga dapat mengakibatkan perekonomian terguncang namun dalam jangka pendek dan terjadi secara natural maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan *Voice and Accountability*, *Government Effectiveness*, dan *Control of Corruption* adalah indikator tata kelola utama pemerintahan dari indikator *Good Governance* lainnya. Penelitian sebelumnya menghasilkan perpaduan dalam mengelola *Control of Corruption*, *Political Stability and Absence Violence* dalam penelitian ini diganti *Government Effectiveness*, dan *Voice and Accountability* secara efektif dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Samarasinghe, 2018). Begitupula pula hasil studi oleh Yuslian (2021) bahwa *Voice and Accountability*, *Government Effectiveness*, dan *Control of Corruption* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah yang memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong perekonomian sekaligus memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Partisipasi dan koordinasi tiga peran utama pejabat pemerintah, masyarakat umum, dan sektor swasta yang menentukan

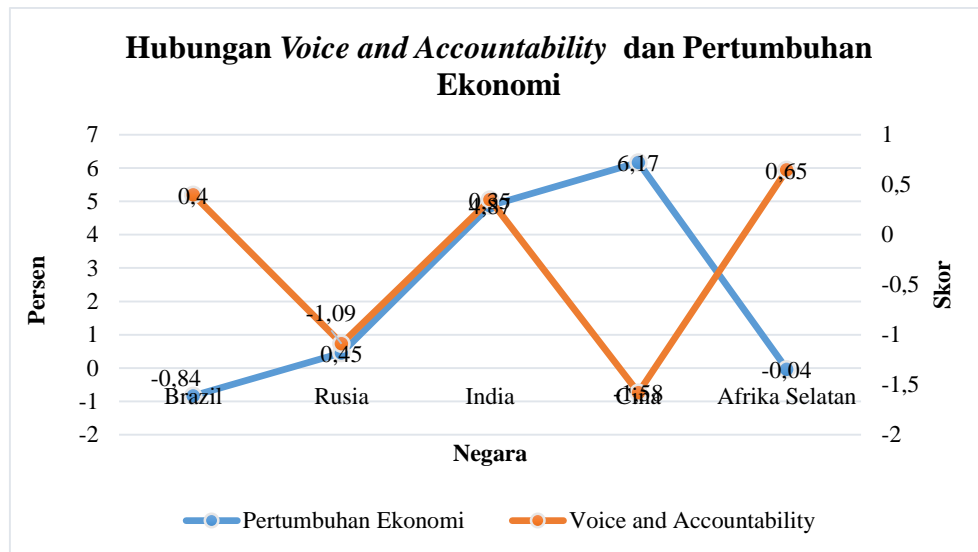
efektivitas kebijakan pemerintah dalam kerangka *Good Governance*. Tumbuhnya pertumbuhan ekonomi juga tidak terlepas dari efektivitas pemerintahan itu sendiri (Annur, 2019). Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Mahriun & Putri (2020) bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian perlu dilakukan sebab apabila perekonomian tidak dikendalikan dengan kebijakan dan peraturan akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang akan berakhir pada kerugian negara.

Tabel 4. *Voice and Accountability* Negara BRICS 2014-2020 (Indeks)

| Tahun | Brazil | Rusia | India | Cina | Afrika Selatan |
|--------|--------|-------|-------|-------|----------------|
| 2014 | 0.47 | -1.04 | 0.41 | -1.62 | 0.64 |
| 2015 | 0.46 | -1.09 | 0.43 | -1.66 | 0.65 |
| 2016 | 0.45 | -1.13 | 0.44 | -1.56 | 0.65 |
| 2017 | 0.45 | -1.09 | 0.39 | -1.50 | 0.63 |
| 2018 | 0.37 | -1.07 | 0.35 | -1.46 | 0.63 |
| 2019 | 0.30 | -1.12 | 0.27 | -1.63 | 0.65 |
| 2020 | 0.30 | -1.07 | 0.15 | -1.65 | 0.70 |
| Rerata | 0.40 | -1.09 | 0.35 | -1.58 | 0.65 |

Sumber: *World Bank (2022), data diolah*

Voice and Accountability adalah mencerminkan seberapa besar partisipasi penduduk suatu negara yang dapat mempengaruhi pembentukan pemerintahannya, termasuk partai dan kandidat yang mereka dukung, serta kebebasan berserikat, berekspresi, dan berpendapat. Tabel 4, menunjukkan bahwa pencapaian Afrika Selatan, Brazil, dan India antara tahun 2014 dan 2020 menunjukkan kualitas yang lemah dengan rata-rata masing-masing 0,65, 0,40, dan 0,35. Rusia dan Cina, sebaliknya, menunjukkan kualitas yang relatif buruk dengan nilai rata-rata masing-masing -1,09 dan -1,58, namun masih lebih buruk dari negara lain, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini.:



Sumber: *World Bank (2022)*, data diolah

Gambar 2. Hubungan *Voice and Accountability* dan Pertumbuhan Ekonomi Negara BRICS Berdasarkan Rata-rata per Tahun

Gambar 2, menunjukkan *Voice and Accountability* para pembuat keputusan dalam pemerintah yang baik, ternyata terdapat pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada lima negara tersebut yang terlihat adanya indikasi pergerakan fluktuatif yang cukup tajam sehingga sangat diperlukan adanya *Voice and Accountability* yang jelas dan dimungkinkan untuk membatasi pengambilan keputusan yang berbahaya bagi masyarakat terutama dalam kegiatan ekonominya. Fenomena pergerakan fluktuatif cukup tajam terjadi pada Cina dan Afrika selatan yaitu saat capaian *Voice and Accountability* yang lemah namun pertumbuhan ekonomi yang diperoleh cukup baik bahkan Cina merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara rata-rata di BRICS.

Studi empiris dari Wibowo (2013) menghasilkan bahwa *Voice and Accountability* sebagai salah satu variabel kualitas pemerintahan yang tidak memberikan hasil yang berarti sehingga bukanlah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Rendahnya *Voice and Accountability* antara lain disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang masih apatis dan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (*abstain*), serta maraknya praktik jual beli suara juga dapat menurunkan penilaian terhadap *Voice dan Accountability* yang tentunya akan berpengaruh pada efektifitas pemerintahan negara. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa suara dan akuntabilitas berdampak negatif

dan cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena demokrasi yang lebih besar memerlukan suara dan akuntabilitas yang lebih besar, yang pada gilirannya memungkinkan munculnya banyak partai politik namun reformasi ekonomi lebih sulit di bawah banyak partai politik karena reformasi menciptakan peningkatan risiko politik untuk masa jabatan berikutnya bagi partai penguasa yang ada (Gani, 2011).

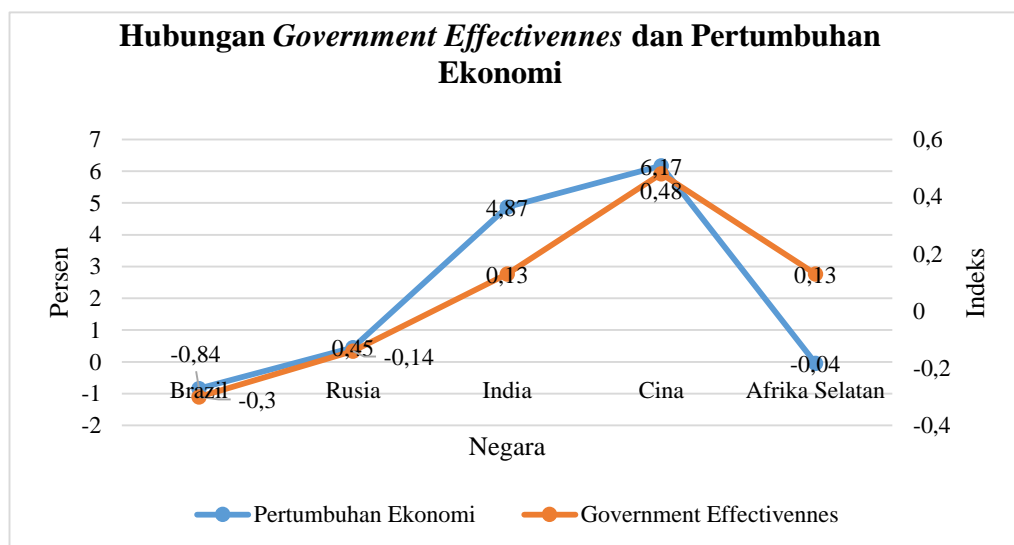
Keputusan politik elit didasarkan pada kepentingan pribadi dan ketidakpastian sementara tidak boleh mengambil tindakan yang diperlukan untuk melakukan reformasi kebijakan di bawah kepentingan pribadi dan ketidakpastian sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Adam, 2000). Berbeda dengan temuan penelitian Bayar (2016) bahwa suara dan akuntabilitas, termasuk tidak adanya kekerasan dan terorisme, berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi karena ketika warga negara merasa bahwa preferensi mereka tercermin secara akurat di lembaga pemerintah dan mereka menerima barang publik yang cukup, rasa memiliki mereka tumbuh, yang pada gilirannya meningkatkan keinginan mereka untuk berkontribusi pada negara mereka. Samarasinghe (2018) mendukung ini, mengatakan bahwa sangat penting untuk mengelola indikator Suara dan Akuntabilitas dengan benar karena merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5. *Government Effectiveness* Negara BRICS 2014-2020 (Indeks)

| Tahun | Brazil | Rusia | India | Cina | Afrika Selatan |
|--------|--------|-------|-------|------|----------------|
| 2014 | -0.18 | -0.19 | -0.23 | 0.35 | 0.16 |
| 2015 | -0.23 | -0.29 | 0.11 | 0.44 | 0.12 |
| 2016 | -0.22 | -0.29 | 0.09 | 0.38 | 0.13 |
| 2017 | -0.29 | -0.15 | 0.07 | 0.44 | 0.10 |
| 2018 | -0.50 | -0.06 | 0.30 | 0.52 | 0.13 |
| 2019 | -0.21 | 0.07 | 0.16 | 0.56 | 0.16 |
| 2020 | -0.44 | -0.08 | 0.41 | 0.68 | 0.10 |
| Rerata | -0.30 | -0.14 | 0.13 | 0.48 | 0.13 |

Sumber: *World Bank (2022), data diolah*

Government Effectiveness adalah salah satu indikator efektivitas pelayanan publik, pelayanan sipil, eksekusi kebijakan, dan komitmen pemerintah terhadap kebijakan. Tabel 5 menunjukkan bahwa kualitas rata-rata untuk lima negara BRICS yaitu Cina, India, Afrika Selatan, dan Rusia, masing-masing adalah 0,48, 0,13, dan 0,13. Nilai rata-rata masing-masing -0,14 dan -0,30, Rusia dan Brazil juga menunjukkan kualitas yang buruk, tetapi lebih tinggi dari negara lain, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.:



Sumber: *World Bank (2022)*, data diolah

Gambar 3. Hubungan *Government Effectiveness* dan Pertumbuhan Ekonomi Negara BRICS Berdasarkan Rata-rata per Tahun

Gambar 3, menunjukkan bahwa kemampuan lima negara BRICS dalam mengelola diri secara efektif berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut dan terlihat pula terdapat fenomena pergerakan fluktuatif yang awalnya berjalan sesuai arah positif namun pada Afrika Selatan terlihat pergerakan cukup tajam pada pertumbuhan ekonomi saat capaian efektivitas pemerintah cukup kuat. Menurut penelitian empiris Wibowo (2013), peningkatan kualitas pelayanan publik di suatu negara justru menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Bayar (2016) yang menemukan hubungan menguntungkan antara efektivitas pemerintahan dan pembangunan ekonomi.

Menurut Demarani (2018), efektivitas dan kualitas pelayanan publik suatu negara berarti pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membuat

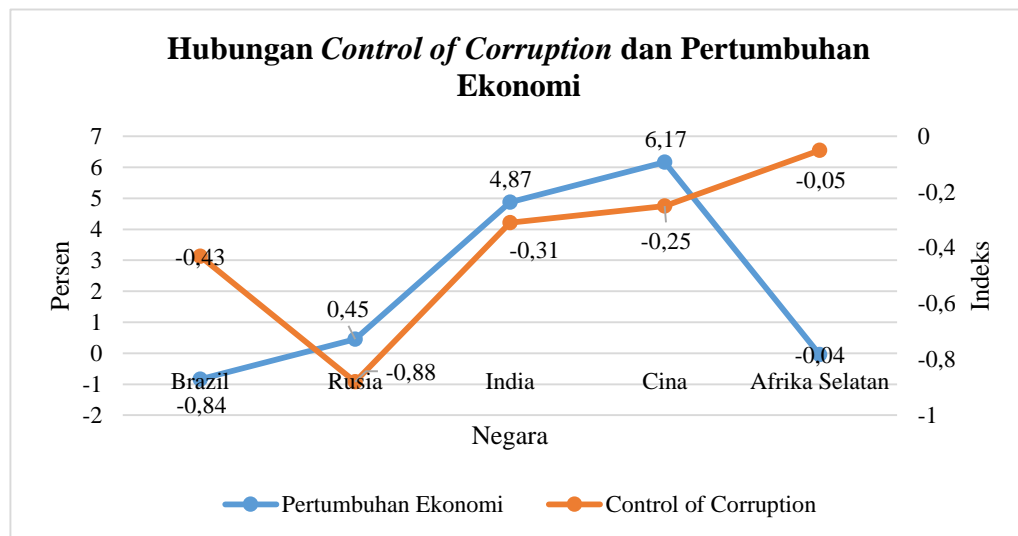
kebijakan dan menyediakan layanan publik akan lebih rendah, yang akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Artinya, biaya yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik akan menjadi lebih rendah, dan kualitas pelayanan publik suatu negara akan meningkat.

Tabel 6. *Control of Corruption* Negara BRICS 2014-2020 (Indeks)

| Tahun | Brazil | Rusia | India | Cina | Afrika Selatan |
|--------|--------|-------|-------|-------|----------------|
| 2014 | -0.37 | -0.92 | -0.46 | -0.34 | -0.12 |
| 2015 | -0.43 | -0.95 | -0.38 | -0.27 | -0.04 |
| 2016 | -0.42 | -0.82 | -0.31 | -0.24 | 0.04 |
| 2017 | -0.54 | -0.89 | -0.27 | -0.27 | -0.10 |
| 2018 | -0.46 | -0.85 | -0.21 | -0.26 | -0.11 |
| 2019 | -0.39 | -0.8 | -0.28 | -0.29 | 0.02 |
| 2020 | -0.41 | -0.91 | -0.27 | -0.05 | -0.01 |
| Rerata | -0.43 | -0.88 | -0.31 | -0.25 | -0.05 |

Sumber: *World Bank (2022)*, data diolah

Control of Corruption merepresentasikan persepsi tentang sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk kepentingannya sendiri, baik korupsi kecil maupun besar, serta “perebutan” negara oleh para elit (pemerintah) dengan saksi yang berlaku. Tabel 6 menunjukkan bahwa prestasi *Control of Corruption* lima negara BRICS dari tahun 2014-2020 untuk Rusia, Brazil, India, dan Cina memiliki indeks kualitas yang lemah dengan rata-rata -0.88, -0.43, -0.31, dan -0.25 untuk setiap negara. Afrika Selatan berkinerja buruk dalam indeks pengendalian korupsi tetapi lebih baik dari negara lain, dengan skor indeks rata-rata -0,05, seperti yang dapat dilihat dari Gambar 4 di bawah ini:



Sumber: *World Bank (2022)*, data diolah

Gambar 4. Hubungan *Control of Corruption* dan Pertumbuhan Ekonomi Negara BRICS Berdasarkan Rata-rata per Tahun

Gambar 4, menunjukkan *Control of Corruption* para pembuat keputusan dalam tata kelola pemerintah yang baik ternyata terdapat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada lima negara tersebut yang terlihat adanya indikasi pergerakan fluktuatif yang berbeda. Fenomena ini dapat dilihat bahwa saat capaian kontrol korupsi dari Rusia, India, Cina dalam kategori lemah namun pertumbuhan ekonomi mereka masih dalam nilai yang cukup bertahan di angka positif secara rata-rata sementara untuk Brazil sesuai dengan angka kontrol korupsi yang buruk atau lemah maka pertumbuhan ekonomi turun atau menyentuh angka minus. Berbeda dengan Afrika Selatan dengan capaian kontrol korupsi yang lebih baik dari negara lainnya meskipun masih masuk golongan lemah tetapi pertumbuhan ekonomi yang dicapai mengalami penurunan dan menyentuh angka minus secara rata-rata. Sehingga sangat diperlukan *Control of Corruption* yang jelas dalam pelaksanaan pemerintah yang baik.

Hasil studi menunjukkan korupsi tidak berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi (Pere, 2015). Bertentangan dengan ini, menyimpulkan ada penurunan pertumbuhan 0,72% tingkat per 1% peningkatan tingkat korupsi akibat ketidakstabilan politik (Mo, 2001). Menurut studi yang berbeda, pengaruh korupsi bervariasi dari satu negara ke negara lain tergantung pada sistem politik negara saat ini (Aidt *et al.*, 2008).

Hasil studi lainnya dihasilkan oleh Demarani (2018) bahwa terdapat hubungan positif pengendalian korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dan pernyataan ini didukung oleh hasil uji Samarasinghe (2018) bahwa pengendalian korupsi merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan satu unit dalam pemberantasan korupsi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat 6,9%.

Ternyata selain unsur internal *governance*, variabel eksternal juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Faktor keterbukaan perdagangan merupakan salah satu unsur eksternal yang akhir-akhir ini menarik perhatian para pakar dan beberapa organisasi internasional (Yuslian, 2021). Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah semakin pesatnya era globalisasi yang tersebar di seluruh belahan dunia dan hal membuat koneksi antar negara lebih terbuka, seperti halnya yang terjadi di lima negara: Afrika Selatan, Brazil, Rusia, India, dan Cina terintegrasi pada sebuah organisasi bernama BRICS.

Perdagangan menciptakan ruang yang menguntungkan bagi BRICS dengan hubungan ekonomi yang kuat di antara negara-negara BRICS dapat mengurangi kemungkinan konflik dan menciptakan kemungkinan suasana global yang damai (Shameem & Jayaprasad, 2020). Sejak didirikan pada tahun 2006, kelompok negara ini telah berkomitmen penuh untuk memperkuat dan memperluas hubungan dalam perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota dan seluruh dunia (Shayanewako, 2018). Negara-negara yang tergabung dalam BRICS telah menempatkan penekanan besar pada pembangunan infrastruktur yang difasilitasi oleh Bank Pembangunan BRICS dan sepenuhnya memanfaatkan berbagai peluang impor dan ekspor yang disajikan oleh upaya kolaboratif ekonomi (Huang & Chang, 2014). Kebijakan perdagangan BRICS telah berorientasi pada kerjasama perdagangan regional dan ekspansi ke pasar internasional yang mengakibatkan peningkatan perdagangan antar negara BRICS sebesar 70% antara 2009 dan 2015 (*World Bank*, 2015).

Tabel 7. *Value of Imports and Exports of Goods and Commercial Services (Million US\$)*

| <i>Country</i> | <i>Year</i> | <i>Value</i> |
|---------------------|-------------|--------------|
| <i>Brazil</i> | 2018 | 532.641 |
| <i>Russia</i> | 2019 | 836.255 |
| <i>India</i> | 2019 | 600.088 |
| <i>China</i> | 2019 | 5.122.632 |
| <i>South Africa</i> | 2019 | 208.063 |

Sumber: BRICS *Joint Statistical Publication (2020)*, data diolah

Menurut informasi terbaru dalam publikasi BRICS 2020 (Tabel 7), PDB Brasil mencapai 532,641 juta US\$ pada tahun 2018, Rusia mencapai 836,255 juta, India mencapai 600,088 juta, China mencapai 5.122.632 juta, dan Afrika Selatan mencapai 208.063 juta. Dapat diketahui bahwa pencapaian yang cukup besar dengan nilai tertinggi diduduki oleh Cina.

BRICS muncul dari krisis ekonomi global pada abad ke-21, berupaya meningkatkan sistem keuangannya dengan mengembangkan mata uang baru untuk menggantikan dolar dan sistem pembayaran internasional baru untuk menjaga stabilitas devisa setiap negara anggota (Ismanthono, 2010). Tujuan lainnya adalah untuk menegakkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi semua orang, serta untuk mempromosikan negara-negara berkembang dalam domain seperti perdagangan, teknologi, dan hubungan diplomatik antar negara (Puspitasari, 2011).

Memperluas keterbukaan ekonomi, khususnya keterbukaan perdagangan dan keuangan, merupakan ciri khas periode globalisasi. Keterbukaan perdagangan bermanfaat untuk memperluas arus pasar, yang dapat digunakan untuk menghemat biaya dan meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja. Keterbukaan keuangan, sementara itu dapat mendorong investasi internasional, mempercepat masuknya modal dan memfasilitasi transfer teknologi (Hidayah *et al.*, 2020). Disparitas biaya dan manfaat suatu produk yang dihasilkan suatu negara membuat negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Keterbukaan ekonomi dalam hal perdagangan dipandang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Assidiq, 2019).

Setiap negara dapat saling menukar komoditas produksi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri berkat keterbukaan sistem ekonomi demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pernyataan ini dibuktikan oleh Raghutla (2020) bahwa dalam penelitiannya dihasilkan keterbukaan perdagangan memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi Afrika Selatan, Brazil, Rusia, India, dan Cina. Khalid (2022) dengan studi empirisnya menghasilkan bahwa perdagangan terbuka berpengaruh positif signifikan di Turki. Sebelumnya kajian lain oleh Alam & Sumon (2020) menghasilkan bahwa *Trade Openness* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 15 negara Asia periode 1990-2017.

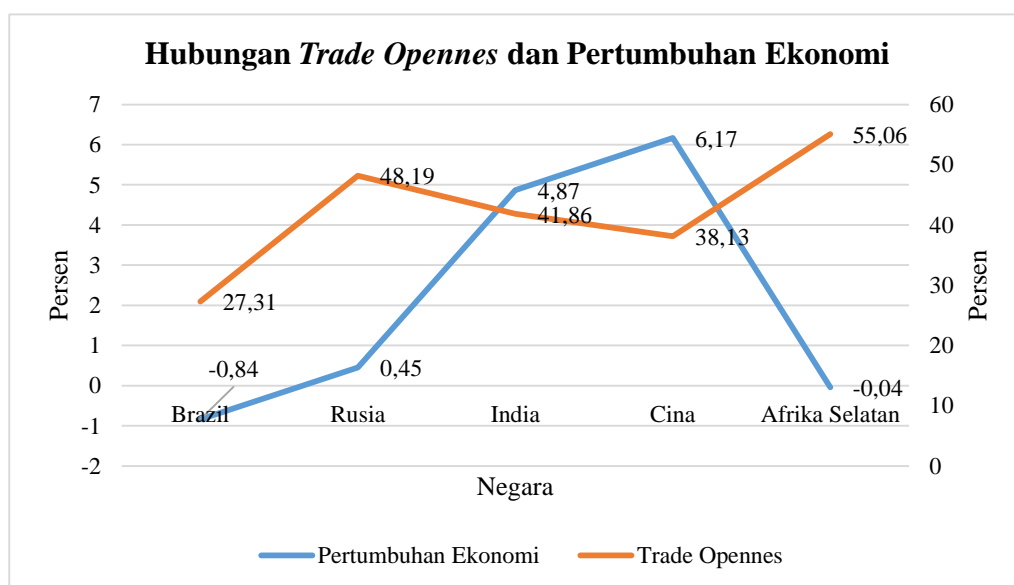
Keterbukaan ekonomi dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memberikan peluang untuk mengekspor komoditas dan mengimpor barang yang faktor produksinya menggunakan sumber daya yang melimpah menurut teori pertumbuhan ekonomi modern. Menurut Mudakir & Nuraini (2019) berpendapat bahwa peluang untuk mengekspor barang dengan pemanfaatan sumber daya yang melimpah dapat diciptakan melalui keterbukaan ekonomi. Jika diproduksi di dalam negeri, produksinya mahal. Ada dua jenis utama sistem ekonomi di dunia yaitu sistem ekonomi terbuka dan tertutup. Negara-negara dengan sistem ekonomi terbuka sering terlibat dalam perdagangan internasional dan jenis kerjasama lainnya, sedangkan negara-negara dengan sistem ekonomi tertutup berusaha untuk mengisolasi diri dari negara lain, yang berarti negara tersebut melakukan produksi perdagangan sendiri tanpa melakukan ekspor ataupun impor (Yuslian, 2021).

Tabel 8. *Trade Openness* Negara BRICS 2014-2020 (Persen)

| Tahun | Brazil | Rusia | India | Cina | Afrika Selatan |
|--------|--------|-------|-------|-------|----------------|
| 2014 | 24.69 | 47.8 | 48.92 | 44.91 | 59.50 |
| 2015 | 26.95 | 49.36 | 41.92 | 39.46 | 56.73 |
| 2016 | 24.53 | 46.52 | 40.08 | 36.89 | 55.86 |
| 2017 | 24.32 | 46.88 | 40.74 | 37.63 | 53.54 |
| 2018 | 28.88 | 51.58 | 43.62 | 37.57 | 54.51 |
| 2019 | 28.89 | 49.23 | 39.96 | 35.89 | 54.15 |
| 2020 | 32.89 | 45.96 | 37.81 | 34.59 | 51.13 |
| Rerata | 27.31 | 48.19 | 41.86 | 38.13 | 55.06 |

Sumber: *World Bank (2022), data diolah*

Data di atas mencerminkan bahwa ke lima negara BRICS melakukan perdagangan internasional. Menurut Tabel 9, tingkat rata-rata perdagangan terbuka antara lima negara BRICS dari tahun 2014 hingga 2020 adalah 27,31% untuk Brazil, 48,19% untuk Rusia, 41,86% untuk India, 38,13% untuk Cina, dan 55,06% untuk Afrika Selatan. Afrika Selatan mencapai tingkat keterbukaan tertinggi sementara Brazil mencapai tingkat terendah. Untuk melihat pengaruh keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi digambarkan pada Gambar 5 di bawah ini.



Sumber: *World Bank (2022), data diolah*

Gambar 5. Hubungan *Trade Openness* dan Pertumbuhan Ekonomi Negara BRICS Berdasarkan Rata-rata per Tahun

Gambar 5, menunjukkan pergerakan keterbukaan perdagangan yang ternyata terdapat pola hubungan dengan pertumbuhan ekonomi secara rata-rata pada lima negara BRICS. Dalam gambar tersebut terdapat suatu fenomena yang menarik yaitu di Afrika Selatan, saat besaran nilai *Trade Openness* tertinggi secara rata-rata tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada 0,04%. Sementara negara lainnya menunjukkan hubungan positif keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Organisasi IMF yang menganggap bahwa *Trade Openness* bahwa berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara (Yuslian, 2021).

Hasil penelitian Nuraini & Mudakir (2019) bahwa terdapat pengaruh positif signifikan keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dan salah satu yang mendasari hal tersebut karena keterbukaan adalah cara untuk mendorong pertumbuhan melalui lebih banyak akses ke pasar dan penelitian dan pengembangan. Sebelumnya studi empiris juga menghasilkan hubungan positif keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi karena memiliki potensi untuk meningkatkan akses ke barang dan jasa, alokasi sumber daya yang efisien dan peningkatan produktivitas faktor total melalui difusi teknologi dan pengetahuan (Frankel & Romer, 1999). Menurut studi oleh Shayanewako (2018), keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara BRICS terdapat pengaruh positif. Hasil studi lain bahwa kelompok BRICS adalah negara berkembang atau negara industri baru, namun memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan berdampak besar pada urusan lokal dan internasional karena liberalisasi perdagangan yang signifikan sehingga kemajuan dalam perdagangan intra-regional dan internasional telah membongkar semua hambatan tarif dan non-tarif perdagangan di wilayah tersebut (Rani & Kauro, 2018). Di sisi lain, berpendapat bahwa tidak ada hubungan keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi karena dapat menjadi penghambat pertumbuhan dengan menaikkan harga barang dan jasa dan lebih menonjol pada negara yang mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor serta tunduk pada guncangan persyaratan perdagangan (Hausmann *et al.*, 2007).

Pemilihan *Good Governance* dan *Trade Openness* didukung oleh berbagai studi empiris seperti, Samarasinghe (2018) menemukan terdapat pengaruh *Good Governance* terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu tepatnya variabel pengendalian korupsi. Variabel pengendalian korupsi yang merupakan penentu penting pertumbuhan ekonomi dan peningkatan satu unit dalam pengendalian korupsi menyebabkan rata-rata peningkatan 6,9 % dalam PDB riil per kapita pada tingkat signifikansi, jika semua variabel lainnya tetap. Perpaduan yang tepat antara pengendalian korupsi dan stabilitas politik akan memiliki efek positif pada akumulasi modal manusia dan fisik, meningkatkan kualitas lembaga

dan infrastruktur sosial lainnya, dan dengan demikian meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Negara perlu meningkatkan stabilitas politik dan pengendalian korupsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga terdapat Demarani (2018) melakukan penelitian, dan temuan menunjukkan pengaruh yang positif signifikan efektifitas pemerintah, kualitas peraturan, penegakan hukum, dan kontrol korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pernyataan tersebut diperkuat kembali oleh Annur (2019) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Government Effectiveness, Political Stability and Absence of Violence*, dan *Voice and Accountability* terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan. Terdapat pula penelitian baru yang dilakukan oleh Mahriun & Putri (2020) juga menegaskan bahwa terdapat pengaruh tata pemerintahan yang baik, yaitu pengurangan korupsi pada pertumbuhan ekonomi.

Kajian serupa telah dilakukan di bidang keterbukaan perdagangan dan hal tersebut mengindikasikan bahwa keterbukaan ekonomi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi (Hidayah et al., 2020). Hasil penelitian Yuslian (2021) mendukung penelitian Hidayah *et al.*, (2020) bahwa *Trade Openness* dan *Government Effectiveness, Control of Corruption*, dan *Voice and Accountability* dapat berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Terkait dua variabel bebas yang digunakan sebelumnya telah dibuktikan pula oleh Silberberger (2015) menghasilkan bahwa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ditekankan bahwa dua variabel ini menjadi penentu potensial karena pertumbuhan ekonomi positif suatu negara diperkuat oleh kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dan didukung hubungan integrasi ekonomi yang kuat.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang indeks tata kelola yang baik dan keterbukaan perdagangan dapat secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di lima negara BRICS berdasarkan konteks yang telah dibahas dengan judul "Pengaruh *Good Governance* dan

Trade Openness terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus pada Negara-Negara BRICS tahun 2014-2020)”.
 Negara BRICS tahun 2014-2020)”.
 Negara BRICS tahun 2014-2020)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini muncul pertanyaan berdasarkan latar belakang yang dapat dikemukakan dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Voice and Accountability*, *Government Effectiveness*, *Control of Corruption*, dan *Trade Openness* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara BRICS selama periode 2014-2020 secara parsial (individu)?
2. Bagaimana pengaruh *Voice and Accountability*, *Government Effectiveness*, *Control of Corruption*, dan *Trade Openness* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara BRICS selama periode 2014-2020 secara simultan (serentak)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh *Voice and Accountability*, *Government Effectiveness*, *Control of Corruption*, dan *Trade Openness* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara BRICS selama periode 2014-2020 secara parsial (individu).
2. Untuk menganalisa pengaruh *Voice and Accountability*, *Government Effectiveness*, *Control of Corruption*, dan *Trade Openness* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara BRICS selama periode 2014-2020 secara simultan (serentak).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan, rujukan, ataupun acuan bagi instansi pemerintah yang bekerja untuk meningkatkan perekonomian suatu negara serta sebagai bahan peraturan perundang-undangan

yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kinerja lembaga terkait.

2. Ilmu Pengetahuan

Studi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, memberikan wawasan baru, memajukan pemahaman ilmiah tentang perkembangan teori ekonomi, dan menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik dan keterbukaan perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara BRICS. Peneliti juga mengharapkan agar hasil penelitian ini memberikan dukungan terhadap penelitian sebelumnya sehingga dapat menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Fungsi dan Peran Pemerintah

Peran penting selalu dimainkan pemerintah dalam semua sistem ekonomi, baik ekonomi kapitalis, sosialis, maupun campuran, (Mangkoesebroto, 2001).

Menurut teori Adam Smith, pemerintah mempunyai fungsi, yaitu:

1. Menjunjung tinggi pertahanan dan keamanan negara.
2. Fungsi pemerintah dalam memberikan keadilan.
3. Fungsi pemerintah adalah menyediakan layanan yang tidak dapat dilakukan oleh pasar bebas.

Tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia yang menganut sistem kapitalisme murni, hal ini terlihat dari kemajuan dan perubahan yang terjadi di setiap negara. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa pemerintah akan memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan bagaimana perekonomian berkembang di era modern. Akibatnya, menurut Adam Smith, ruang lingkup operasi pemerintah sangat terbatas pada yang tidak dilakukan oleh sektor swasta, yaitu:

1. Melakukan peradilan
2. Melakukan tindakan pertahanan/keamanan.
3. Melakukan pekerjaan umum.

Perbedaan kepentingan antara pihak swasta dan karyawan menimbulkan ketidakharmonisan setiap pihak. Misalnya, keperluan pengusaha dan karyawan sering berbenturan, sehingga memerlukan peraturan pemerintah, perbaikan, atau arahan operasi swasta. Dalam perekonomian modern, peran pemerintah sebagai berikut.

1. Alokasi, di mana pemerintah kini bertanggung jawab untuk mengusahakan dan menjamin pengalokasian sumber daya ekonomi dilakukan seefektif mungkin.
2. Distribusi, yaitu peran serta pemerintah dalam upaya pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
3. Stabilisasi, meliputi upaya pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menjaga stabilitas harga barang-barang yang dibutuhkan oleh perekonomian.

Berkaitan dengan peran pemerintah dalam tiga indikator tata kelola pemerintah yang digunakan untuk mencapai pemerintahan yang baik demi tercapainya pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu:

1. Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam politik, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan keterbukaan, pemerintah dapat berperan terkait dengan suara dan akuntabilitas (Septiantoro *et al.*, 2020). Keterlibatan politik mengacu pada keterlibatan aktif seseorang atau kelompok dalam kehidupan politik, seperti upaya memilih pejabat negara atau membentuk kebijakan pemerintahan (Syarbaini *et al.*, 2002). Keterlibatan pemerintah yang mendorong tuntutan terorganisir akan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap partisipasi politik. Hak atas kebebasan berbicara secara tegas menggariskan tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi setiap orang dari penyalahgunaan wewenang negara dan memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui dalam undang-undang (Sujadmoko, 2015).
2. Pemerintah dapat berperan dalam meningkatkan standar pelayanan publik, standar pelayanan masyarakat, derajat kemandirian dari tekanan politik, standar perumusan dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen

pemerintah terhadap kebijakan tersebut (Septiantoro *et al.*, 2020). Keberhasilan pemerintah dalam membuat alokasi anggaran yang tepat sasaran, khususnya di bidang pelayanan kesejahteraan, dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai efektivitas pemerintahan. Bank Dunia menyoroti bahwa jumlah program anggaran layanan kesejahteraan yang akan dilakukan pemerintah menentukan alokasi anggaran untuk pemerintah tersebut. Barang publik termasuk pertahanan, hukum dan ketertiban, hak milik, dan stabilitas ekonomi makro termasuk dalam kategori ini (Bastian, 2016).

3. Peran pemerintah yang berkaitan dengan *Control of Corruption* dapat dilakukan dengan upaya atau strategi pemberantasan korupsi. *Global Program Against Corruption*, sering dikenal oleh *United Nations Anti-Corruption Toolkit* adalah serangkaian inisiatif atau strategi yang diciptakan oleh PBB untuk memberantas korupsi. Program Global Melawan Korupsi tersebut mengacu pada inisiatif PBB untuk mengakhiri korupsi (*United Nations*, 2004). Strategi tersebut antara lain, sebagai berikut:
 - a. Membuat organisasi tersendiri yang berfokus pada pemberantasan korupsi misalnya, ada lembaga Ombudsman suatu negara.
 - b. Meningkatkan efisiensi sistem hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lapas atau penjara permasalahatan.
 - c. Reformasi birokrasi dan sektor publik karena korupsi lebih mungkin terjadi, semakin banyak meja yang harus dilalui.
 - d. Menjamin masyarakat memiliki akses informasi yang lengkap tentang keputusan pemerintah yang berdampak signifikan bagi kehidupan banyak orang.
 - e. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko korupsi dan isu-isu terkait pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi dan berbagi informasi di area publik.
 - f. Memantau dan mengevaluasi semua inisiatif untuk memerangi korupsi.
 - g. Mempromosikan kerja sama internasional yang efektif, seperti Program *National Integrity System* di Bank Dunia dan Program *A Framework for Integrity and Transparency International*.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan penduduknya akan barang dan jasa diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikator keberhasilan tersebut. Akibatnya, kinerja ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonominya (Demarani, 2018). Prasyarat utama adalah kesejahteraan yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan penambahan GDP, yang berarti peningkatan pendapatan nasional (Tambunan, 2003). Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi bermakna terjadinya peningkatan kemampuan jangka panjang negara untuk memasok penduduknya dengan berbagai barang ekonomi (Wibowo, 2013).

Kemajuan atau modifikasi institusional (kelembagaan) dan ideologis untuk memenuhi kebutuhan yang bervariasi dari keadaan saat ini dapat memungkinkan peningkatan kapasitas itu sendiri. Dengan kata lain, Peningkatan produksi barang dan jasa merupakan proses yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan ekonomi masyarakat. Yuslian (2021) mengemukakan perkembangan GDP atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya digunakan sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ekonomi atau kinerja perekonomian suatu negara merupakan tanda semakin meningkatnya perputaran kegiatan ekonomi di negara tersebut. GDP mengukur nilai tambah yang diciptakan oleh semua unit bisnis, atau nilai barang dan jasa jadi yang diproduksi oleh semua unit ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk menilai keadaan ekonomi suatu negara. Annur (2019) dalam penelitiannya menjelaskan terdapat empat unsur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

1. Akumulasi modal, yang mencakup semua investasi baru dalam wujud lahan (tanah), mesin, dan sumber daya manusia.
2. Peningkatan populasi.
3. Perkembangan teknologi.
4. Kerangka kelembagaan.

Ekspansi ekonomi memiliki keuntungan sebagai berikut:

- a. Tingkat pertumbuhannya digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan nasional telah meningkatkan perekonomian. Tingkat kemakmuran penduduk diukur dengan pendapatan per kapita karena pendapatan per kapita yang lebih tinggi dengan lapangan kerja yang berkelanjutan sesuai dengan tingkat kemakmuran dan produktivitas penduduk yang lebih tinggi.
- b. Sebagai landasan untuk memperkirakan atau memproyeksikan penerimaan negara untuk perencanaan pertumbuhan nasional, sektoral, atau daerah. Dalam hal ini Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya akan memprioritaskan pemberian bantuan ke luar negeri.
- c. Menurut Dornbusch, sebagai dasar untuk meramalkan hasil bisnis. Pernyataan ini secara khusus mengacu pada persamaan penjualan yang digunakan oleh bisnis sebagai dasar untuk perencanaan produk dan pengembangan sumber daya, terutama tenaga kerja dan modal (Annur, 2021).

Dengan demikian dari paparan dan pendapat para peneliti tersebut, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan standar untuk menilai kinerja ekonomi dengan adanya peningkatan produksi dalam hal ini pertumbuhan faktor-faktor produksi barang dan jasa dalam periode tertentu yang dialami oleh suatu negara dan cerminan keberhasilan pembangunannya. Sehingga dalam hal ini *Department for International Development*, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen atau alat kuat bagi suatu negara untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya yang bermaksud dapat dilihat bahwa negara memiliki tanggung jawab penting mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil melalui sinergi yang baik antara Pemerintah, Dunia Usaha, dan Sektor Publik (Yuslian, 2021).

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Buku yang berjudul "*The General Theory of Employment, Interest, and Money*" yang terkenal dengan nama "*The General Theory*" karya John Maynard Keynes yang diterbitkan tahun 1936 dan di dalamnya berisi teorinya mengenai pertumbuhan ekonomi. Salah satu buku karya Keynes tersebut merupakan karya yang paling monumental yang bersifat pandangan original yang lebih fokus pada aspek makro daripada mikro dengan konstruksi baru tentang permintaan dan penawaran yang bersifat agregatif (Natsir, 2013).

Damarani (2018) menjelaskan bahwa konsep siklus aliran uang, yang menjadi dasar teori ekonomi Keynes, mendalilkan bahwa peningkatan konsumsi akan meningkatkan pendapatan, yang kemudian akan memicu peningkatan lebih lanjut baik dalam pengeluaran maupun pendapatan. Menurut teori Keynes, konsumsi satu orang dalam suatu ekonomi akan menghasilkan uang atau pendapatan dari ekonomi yang sama. Sehingga jika seseorang membelanjakan uangnya, maka akan memberikan kontribusi pada orang lain melalui peningkatan pendapatan. Siklus ini membuat perekonomian dalam keadaan normal. Orang-orang secara alami menahan pengeluaran mereka selama Depresi Hebat dan cenderung menimbun uang mereka sebagai tanggapan. Hal ini akan menghentikan siklus peredaran uang dan semakin melumpuhkan perekonomian.

Untuk meningkatkan permintaan efektif, Keynes menyarankan peningkatan permintaan melalui peningkatan pengeluaran. Dengan melakukan ini, lebih banyak barang akan diproduksi, dan perekonomian akan pulih. Keynes membalikkan Hukum Say dalam kasus ini, mengatakan bahwa permintaan mendorong penawaran bukan sebaliknya karena hanya ada sedikit pilihan untuk meningkatkan PDB selama masa sulit atau depresi ekonomi, pelaku bisnis mungkin ragu untuk berinvestasi (I), dan konsumen mungkin tidak mau meningkatkan pendapatan mereka untuk konsumsi (C) karena pendapatan yang tidak menentu. Akibatnya, Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak uang (pengeluaran) (Natsir, 2013).

Keynes menegaskan bahwa pemerintah dapat menggunakan peran sebagai penggerak ekonomi karena kebijakan perluasan dapat secara efektif meningkatkan permintaan. Teori dasar Keynes menyatakan bahwa peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dicapai melalui pembuatan kebijakan di tingkat pemerintah. Menurut teori Keynes, sejumlah faktor, termasuk investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor, berkontribusi terhadap kesehatan perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Faktor ini sebagai berikut.

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Keynes meyakini bahwa faktor pengaruh yang dijelaskan pada rumus di atas secara bersama-sama dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Melalui pemaksimalan anggaran dari berbagai sektor di atas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam Yuslian (2021) menjelaskan bahwa terdapat lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan, yaitu kenaikan tingkat pendapatan perkapita masyarakat, urbanisasi yang diikuti oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, ketidakefisienan kualitas birokrasi dalam perkembangan pemerintah, dan perkembangan demokrasi. Pernyataan ini didukung dalam Demarani (2018) bahwa terdapat kesimpulan Teori Keynes, ada alasan praktis untuk distribusi pendapatan, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa ketika lapisan masyarakat yang kurang mampu diberi sejumlah uang, biasanya akan digunakan daripada disimpan.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Teori pertumbuhan endogen secara konsisten telah di dalami oleh Paul Romer sejak tahun 1990-an yang mengantarkan Paul Romer sebagai penerima hadiah Nobel pada bidang ekonomi di tahun 2008. Definisi dari teori pertumbuhan endogen bermakna suatu teori pertumbuhan yang menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang bersumber dari dalam suatu sistem yang muncul sebagai kritik terhadap teori pertumbuhan Neoklasik mengenai *Diminishing Marginal Productivity of Capital* dan konvergenitas pendapatan di berbagai negara (Romer, 1990). Berdasarkan temuan studi

empiris, negara-negara industri telah menciptakan teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga tidak terjadi konvergensi pendapatan antar negara.

Yuslian (2021) memperjelas juga bahwa dalam teori ini pada pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan dalam mengakumulasi baik modal fisik maupun modal manusia berupa sumber daya manusia. Tidak hanya itu, teori ini menegaskan bahwa keterbukaan ekonomi berbasis perdagangan akan mampu mendorong R&D suatu negara karena adanya spesialisasi pekerjaan yang dilakukan pada perdagangan. Sedangkan untuk pemerintah, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dengan membuat asumsi bahwa faktor non-ekonomi seperti infrastruktur, undang-undang, peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan birokrasi merupakan berperan penting dalam mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan dari paparan teori yang sudah disebutkan sebelumnya ternyata memiliki karakteristik dan asumsinya masing-masing dalam memandang faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Perbedaan karakteristik yang ada akan memberikan penguatan antar teori yang digunakan dan nantinya akan menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini lebih lanjut karena melalui teori yang relevan diharapkan dan tentu akan menguatkan hipotesis penelitian yang sudah ditentukan dalam mengkaji permasalahan yang muncul dan ada pada penelitian ini.

2.1.3 Good Governance

2.1.3.1 Teori Governance

International Social Science Journal menerbitkan proposal Stoker (1998) untuk *Teori Governance* dengan judul "*Governance as Theory: Five Propositions.*" Pemerintahan, menurut Stoker (1998), adalah proses menciptakan semacam pemerintahan di mana batas-batas antara sektor publik dan swasta sudah mulai kabur. Untuk meningkatkan pelayanan publik, tata kelola diperlukan lebih dari seperangkat instrumen manajerial.

Hal ini konsisten dengan pernyataan Peters dan Pierre (1998) bahwa Manajemen Publik Baru (NPM) adalah hasil dan tata kelola adalah prosesnya. Ada banyak masalah dengan risiko kegagalan kepemimpinan yang sangat nyata, ketidaksesuaian jadwal dan tujuan prioritas di antara mitra penting, dan konflik masyarakat yang dapat menyebabkan kegagalan tata kelola. Hal ini menunjukkan bahwa ketokohan, kepekaan terhadap kompleksitas, motivasi, keragaman, dan keterlibatan masyarakat semuanya dapat membantu mengatasi hambatan dalam desain organisasi publik (Stoker, 1998). Menurut Peters dan Pierre (1998), tata kelola memerlukan perencanaan untuk menjaga kapasitas operasional pemerintah sambil menjaga kontrol politik atas sumber daya yang digunakan oleh sektor publik.

2.1.3.2 Sejarah *Good Governance*

Gagasan administrasi yang baik bukanlah hal baru; itu sudah ada sejak awal peradaban manusia. Faktanya, itu adalah salah satu konsep Konfusius yang menginformasikan konstitusi Chow di bawah kekuasaan Tiongkok Kuno (202 SM-219M). Kata Yunani "kybernan" dan "kybernetes," yang berarti mengarahkan atau mengendalikan sesuatu, adalah asal nama "pemerintahan". Ilmuwan politik pertama kali menggunakan istilah "pemerintahan yang baik" untuk mendefinisikan masyarakat demokratis. Ungkapan ini menjadi populer ketika organisasi keuangan internasional mengamanatkan adanya tata kelola yang baik agar mereka dapat menawarkan bantuan.

Sejak berakhirnya Perang Dingin ketika terjadi perubahan struktur kekuatan politik dunia, yang juga berdampak pada kebijakan pemberian bantuan kepada negara penerima, dimana sebelumnya bantuan difokuskan pada kebutuhan dasar manusia, persyaratan *good governance* menjadi salah satu kriteria dalam menggulirkan bantuan dari lembaga internasional tersebut, menurut Paul Streeten dalam artikelnya "*Good Governance: History and Development of The Concept*" yang mengembangkan konsep *good governance*.

2.1.3.3 Pengertian *Good Governance*

Saat ini, masalah terpenting dalam pengelolaan administrasi publik adalah *Good Governance* (LAN & BPKP, 2000). *Governance* diartikan sebagai metode mengelola urusan publik, cara mengelola urusan-urusan publik. Menurut Rosenbloom *et al.*, (2022) bahwa rendahnya kinerja pemerintah dan buruknya tata kelola merupakan tuntutan situasi sejalan dengan berbagai krisis yang dialami, mulai dari krisis keuangan dan ekonomi hingga krisis multidimensi yang melanda bangsa pada tahun 1997 dan 1998 dan masih terasa hingga saat ini. Krisis-krisis ini telah memicu tekad pemerintah untuk bertindak sebagai penyelenggara negara dengan menyelesaikannya secara bertahap untuk mengurangi dampak negatif yang berkepanjangan. Bank Dunia memberikan fokus yang lebih besar pada bagaimana pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan *United Nations Development Programme* lebih menekankan pada elemen politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola keuangan negara.

Definisi *Governance* menurut UNDP (2000) terdapat tiga komponen tata kelola, politik, ekonomi, dan administrasi. Tata kelola politik menggambarkan prosedur untuk merumuskan kebijakan dan strategi serta tingkat kekuasaan dan legitimasi yang dihasilkan dari sistem politik yang demokratis. Pengambilan keputusan ekonomi yang memengaruhi kepedulian terhadap pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup disebut sebagai tata kelola ekonomi. Tata kelola administratif menyinggung proses penerapan kebijakan. Birokrasi yang mampu mengelola kepentingan publik sambil merancang dan melaksanakan program menyediakan layanan publik yang efisien dan akuntabel.

Governance yaitu pengelolaan urusan negara di semua tingkatan melalui pelaksanaan otoritas ekonomi, politik, dan administrasi dikenal sebagai tata pemerintahan (UNDP, 2000). Semua lembaga, prosedur, dan teknik di mana individu dan organisasi masyarakat dapat mengekspresikan pandangan mereka, menggunakan hak hukum mereka, memenuhi kewajiban mereka, dan menyelesaikan konflik mereka berada di bawah payung pemerintahan.

Annur (2019) menurutnya *Good Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan Bank Dunia mendefinisikan tata kelola yang baik sebagai penghindaran alokasi dana investasi yang tidak tepat, pencegahan korupsi di tingkat politik dan administrasi, penerapan disiplin anggaran, dan pengembangan kerangka hukum dan politik untuk perluasan kegiatan bisnis. Menurut Yuslian (2021), *Good Governance* adalah suatu konsep yang mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjalankan berbagai fungsi dalam strukturnya sendiri sambil berpegang pada prinsip-prinsip manajemen yang efektif antara sektor publik dan swasta melalui praktik birokrasi yang adil, yang memungkinkan semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan manfaat yang sama.

Melalui sistem *Governance* yang baik, pemerintah melakukan koordinasi dan keselarasan antara unsur yang ada di negara tersebut, guna melancarkan kinerja negara dari segala aspek bidang. Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* dapat diartikan sebagai kemampuan seluruh komponen pemerintahan untuk bekerja secara kooperatif, tanpa konflik, meraih dukungan rakyat, dan bebas dari gerakan anarkis yang dapat memperlambat proses dan laju pertumbuhan. Selain itu, suatu pemerintahan dapat dianggap efektif jika memberikan hasil, yang dibuktikan dengan peningkatan produktivitas dan daya beli, serta indikator peningkatan kesejahteraan spiritual seperti peningkatan rasa aman dan bahagia serta rasa identitas nasional yang kuat (Demarani, 2018). Menurut UNDP (dalam Demarani, 2018) ada enam prinsip prinsip untuk pemerintahan yang baik: legitimasi, kebebasan berbicara, keterbukaan dan akuntabilitas, kinerja, dan keadilan.

2.1.3.4 Karakteristik *Good Governance*

Menurut UNDP (1997) ada 14 prinsip tata kelola yang baik, yaitu:

1. Visi ke depan (visioner);
2. Keterbukaan dan Transparansi;
3. Partisipasi Masyarakat (partisipasi);
4. Tanggung jawab (akuntabilitas);

5. Hukum dan ketertiban;
6. Demokratis;
7. Kompetensi dan profesionalisme (*competence and professionalism*);
8. Daya tanggap;
9. Efisiensi dan efektivitas;
10. Desentralisasi;
11. Kerjasama dengan pihak swasta dan kemitraan dengan masyarakat sipil;
12. Kewajiban untuk mengurangi ketimpangan;
13. Kewajiban menjaga lingkungan;
14. Dedikasi terhadap pasar yang adil.

Berikut penjelasan ringkas dari 14 prinsip tata kelola yang baik:

1. Tata kelola strategis dengan pandangan ke masa depan. Semua inisiatif pemerintah di semua tingkatan dan di semua bidang harus didukung oleh rencana implementasi yang dapat diterapkan, sukses, dan tahan lama yang didasarkan pada visi, tujuan, dan jadwal yang ditetapkan.
2. Penerapan nyata dari asas pemerintahan yang terbuka (transparan) ini antara lain dapat dilihat ketika masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pejabat publik, baik sebagai mereka dilakukan di tingkat nasional dan daerah.
3. Tata kelola yang mengedepankan keterlibatan masyarakat, masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam perumusan dan/atau proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat.
4. Instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab utamanya. Kebijakan, program, dan tindakan yang dilaksanakan juga dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pemerintahan yang mengedepankan supremasi hukum; tindakan yang diambil untuk menangani kasus KKN dan pelanggaran HAM; meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia; meningkatkan

pemahaman tentang hukum; dan menumbuhkan budaya hukum. Inisiatif ini dilakukan sesuai dengan norma dan proses yang terbuka, transparan dan tidak dipengaruhi oleh politik.

6. Tata kelola pemerintahan yang demokratis dan konsensus, dimana strategi pembangunan dikembangkan melalui proses demokrasi bukan hanya oleh administrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Agar setiap kebijakan publik benar-benar menjadi keputusan bersama antara cabang eksekutif dan legislatif, itu harus didasarkan pada konsensus.
7. Tata kelola yang berlandaskan profesionalisme dan kompetensi. Upaya penilaian kebutuhan, evaluasi tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, serta upaya peningkatan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi.
8. Pemerintahan yang tanggap (*responsive*), untuk memenuhi tujuan masyarakat, pejabat pemerintah harus cepat beradaptasi dengan keadaan dan kondisi baru serta berinisiatif memecahkan masalah masyarakat.
9. Untuk memastikan bahwa struktur dan sumber daya digunakan secara efektif dan efisien, baik pemerintah pusat maupun daerah harus menilai secara berkala seberapa baik mereka mendukung struktur yang ada. Mereka juga harus melakukan perbaikan struktural untuk memenuhi permintaan yang berubah dengan lebih baik, seperti menyelaraskan posisi dan struktur kelembagaan secara keseluruhan, dan harus terus bekerja untuk menghasilkan hasil terbaik dengan menggunakan uang dan sumber daya lain.
10. Desentralisasi pemerintahan, pengalihan tugas dan wewenang dari atas ke semua tingkatan aparaturnya untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan memberikan fleksibilitas yang cukup untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang efektif di tingkat nasional dan daerah.
11. Untuk memberdayakan masyarakat sipil melalui peningkatan partisipasi sektor publik dan swasta, tata kelola yang mendorong kemitraan dengan kelompok-kelompok tersebut harus membangun kemitraan atau hubungan

kerja sama antara sektor publik dan swasta serta masyarakat. Sangatlah penting untuk menghilangkan hambatan birokrasi yang mencegah terciptanya kemitraan yang setara dengan meningkatkan sistem penyampaian layanan sektor publik dan swasta dan menerapkan layanan terpadu.

12. Komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. Gagasan memperkecil disparitas dipraktikkan dengan mengurangi perbedaan di berbagai ranah, baik pusat dan daerah maupun lintas daerah secara adil dan proporsional. Ini juga melibatkan inisiatif untuk menghilangkan ketidakadilan hukum dan bentuk-bentuk diskriminasi lain yang merugikan perempuan dan laki-laki dalam situasi sosial.
13. Tata kelola yang bertanggung jawab terhadap lingkungan; daya dukung lingkungan berkurang akibat penggunaan yang tidak terkendali. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dilihat dari keharusan untuk terus menyusun analisis akibat lingkungan, menegakkan hukum lingkungan secara konsisten, melibatkan otoritas pengendalian dampak lingkungan, dan mengelola sumber daya alam secara lestari.
14. Tata pemerintah yang mendukung pasar. Pengalaman menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam masalah ekonomi menghabiskan anggaran dan bahkan merugikan pasar. Contoh nyata pengabdian pada pasar adalah upaya menghubungkan kegiatan ekonomi rakyat dengan pasar baik di dalam maupun antar daerah.

Menurut Bank Dunia, Tjokroamidjojo (2000) bahwa transparansi, akuntabilitas, prediktabilitas, yang sama dengan aturan hukum, dan partisipasi adalah empat prinsip utama tata pemerintahan yang baik. Setiap prinsip dimaksudkan untuk mendukung yang lain dan tidak dapat berdiri sendiri. menjaga sinergi interaksi yang saling menguntungkan antara negara, swasta, dan masyarakat (*society*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang kuat, akuntabel, efisien, dan efektif.

Menurut OECD, kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab merupakan komponen tata kelola yang baik kriteria *Good Governance* (Agoes, 2004). OECD adalah organisasi global dengan fokus pada peningkatan teknik

administrasi publik di negara-negara terbelakang. OECD memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan *New Public Management* (NPM). Gagasan di balik NPM adalah agar bisnis sektor publik berkinerja lebih baik, sektor publik harus menggabungkan teknik manajemen yang lebih canggih dari sektor swasta (Mahmudi, 2005).

2.1.3.5 Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*World Governance Index/WGI*)

Pengukuran *Good Governance Index* (IGG) merupakan alat yang digunakan oleh *Good Governance* dalam penerapannya pada tataran implementatif untuk mengukur efektivitasnya. Sejak tahun 1998, yang berfokus pada tata kelola secara khusus dilakukan dengan menggunakan indeks yang dibuat oleh Jeff Huther dan Anwar Shah. Namun selain indeks tersebut, ada beberapa cara lagi untuk membangun indeks berbasis tata kelola (Demarani, 2018). Menurut *Good Corporate Governance* (dalam Yuslian, 2021), ada banyak cara seperti *State of Governance Framework*, *Public Affairs Index* (PAI), *Quality of Governance*, *Worldwide Governance Index* (WGI), dan indeks tata kelola lainnya untuk menentukan kondisi tata kelola yang baik.

Untuk penelitian ini, pendekatan *Good Governance* dilihat enam indikator *Worldwide Governance Index* (WGI) dalam konteks data metode agregat WGI. *Worldwide Governance Index* adalah serangkaian indikator terkait tata kelola yang telah disediakan oleh Bank Dunia sejak tahun 1996 melalui *Macroeconomics and Growth Team-Development Research Group*. Peringkat tata kelolanya didasarkan pada 310 variabel yang telah dibagi menjadi 6 kategori variabel. Untuk perhitungan variabel ini berasal dari 33 lembaga yang berbeda, organisasi publik, swasta, dan non-pemerintah, dengan total sekitar 10.000 poin data plus yang menilai status tata kelola setiap negara untuk melihat indikator berdasarkan (1) proses pemilihan, pemantauan, dan penggantian pemerintah; (2) kemampuan pemerintah untuk membuat dan berhasil menerapkan kebijakan yang baik secara efektif; dan (3) penyelarasan sektor publik, swasta, dan pemerintah atas institusi yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial di antara ketiganya. Setiap indikator dalam pengukurannya dilakukan dengan menjumlahkan skor indikator yang sudah ditentukan untuk

melihat besaran nilai yang dimiliki suatu negara dalam tata kelolanya. Data pengukuran sebesar +2.5 sampai -2.5, artinya semakin mendekati +2.5 menandakan kualitas *Good Governance* yang baik dan jika mendekati -2.5 berarti menandakan kualitas *Good Governance* yang buruk (Yuslian, 2021).

2.1.3.6 Indikator *Good Governance*

Sejak tahun 1996, Kelompok Riset Pengembangan Tim Makroekonomi dan Pembangunan Bank Dunia telah menerbitkan enam ukuran untuk menilai tingkat tata kelola yang baik di setiap negara, sebagai berikut:

1. Voice and Accountability

Memiliki definisi sebagai indikator yang menilai persepsi terhadap suatu negara dalam menerapkan sistem kebebasan sipil, keterbukaan sistem hak politik, dan kemerdekaan berpendapat. Indikator ini melihat sistem keterbukaan dalam partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang terjadi di negara tersebut dan akuntabilitas suatu negara.

2. Political Stability and Absense of Violence

Memiliki definisi sebagai indikator yang menilai persepsi tingkat kestabilan politik dalam tata kelolanya, serta menilai tingkat ketidakadilan politik, yang nantinya akan dapat menimbulkan berbagai jenis kekerasan. Indikator ini penting melihat kondisi politik yang tegas dan tidak goyah pada suatu negara.

3. Government Effectiveness

Memiliki definisi sebagai indikator tingkat kualitas pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan. Indikator ini menilai tingkat kredibilitas pemerintah melalui penyerahan tugas yang diberikan kepada jajaran administrasinya dan pengimplementasian kebijakan yang ada. Penting bagi suatu negara dalam melaksanakan pelayanan yang dibutuhkan agar terjadi pemaksimalan pelayanan yang nantinya dapat terlihat keefektifan tata kelolanya.

4. Rule of Law

Memiliki definisi sebagai indikator yang mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Indikator ini mengukur efisiensi

dan keadilan dari sistem peradilan serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban yang sudah ada dalam tatanan masyarakat di suatu negara.

5. *Regulatory Quality*

Memiliki definisi sebagai indikator yang mengukur tingkat kemampuan pemerintah dalam membuat dan menjalankan kebijakan maupun peraturan yang dapat memberi keuntungan serta kemudahan sektor swasta untuk berkembang sebagai pilar pendukung pada pasar ekonomi yang dapat melihat kondisi iklim bisnis pada pasar yang dibuat oleh pemerintah.

6. *Control of Corruption*

Memiliki definisi sebagai indikator yang mengukur tingkat pengendalian tindak korupsi suatu negara yang dilakukan oleh pemerintah melalui sanksi berlaku. Setiap negara memiliki celah praktik korupsi melalui kekuasaan, baik skala besar maupun kecil. Maka dari itu, penting bagi pemerintah dapat mengontrol negaranya dari praktik korupsi yang merugikan.

Sudut pandang prinsip *Good Governance* sebenarnya mengarah pada keselarasan antara peran pemerintah, sektor publik, dan sektor swasta sebagai pendukung untuk mencapai pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.

2.1.3.7 Teori Ekonomi Kelembagaan

Teori kelembagaan dari warisan AS (*American Institutional Tradition*), termasuk Thorstein Veblen, Wesley Mitchel, John R. Commons, dan Clarence Ayres, termasuk yang pertama mengembangkan teori kelembagaan dalam studi sejarah. Variasi lain pada ekonomi klasik termasuk yang terkait dengan Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx, dan aliran Marxian lainnya; dengan sekolah-sekolah Austria seperti Menger, Von Wieser, dan Hayek; dengan Schumpeter; dan dengan Marshall dan tokoh neoklasik lainnya. Yang terakhir, umumnya dipandang sebagai kelanjutan dan perluasan elemen institusional yang ditemukan dalam ekonomi klasik, neoklasik, dan sekolah Austria (Ekonomi Austria), disebut sebagai "Ekonomi Institusional Baru" (*New Institutional Economics*). Pemikiran pertama dikenal sebagai "Ekonomi Institusional Lama" (*Old Institutional Economics*). Pemikiran *Old Institutional Economics* (OIE) berawal dari seorang ahli bernama Thorsten

Veblen. Veblen menganggap jika manusia dipengaruhi oleh behaviorisme multidimensi. Veblen juga beranggapan bahwa lingkungan fisik dan material manusia sangat mempengaruhi pandangan manusia (Saskara, 2017).

Dalam hal ini, Veblen membagi kelembagaan menjadi dua, yaitu pertama kelembagaan teknologi yang berupa metode produksi, teknologi, dan mesin; dan kedua kelembagaan seremonial yang berisi serangkaian hak-hak kepemilikan, kelembagaan ekonomi, dan struktur sosial. Untuk *New Institutional Economics* dipelopori pertama kali oleh Ronald Coase di tahun 1937 dalam artikelnya yang berjudul “*The Nature of The Firm*”. Dalam pemikiran NIE, poin yang diperkenalkan lebih kepada individualistik masyarakat untuk lebih rasional dalam menyikapi kondisi sosial ekonomi yang ada, Emilia (dalam Yuslian, 2021). Di luar latar belakang tersebut, sebenarnya jika ingin menjelaskan ekonomi institusional, kesulitan terbesar adalah ketika mendefinisikan institusi itu sendiri. Kadang-kadang untuk penyederhanaan, lembaga diberi sebutan sebagai kerangka hukum atau hak kodrati yang mengatur tindakan individu. Yustika (2012) pada saat yang lain kelembagaan dimengerti sebagai apa pun yang berhubungan dengan ‘perilaku ekonomi’ (*Economic Behavior*). Namun, norma sosial, kesepakatan, dan komponen lain dari kerangka interaksi sosial akan berfungsi sebagai definisi institusi yang lebih tepat.

Pengertian lain memaknai kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial, dalam konteks ini kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni aturan formal (*formal institutions*), aturan informal, dan mekanisme penegakan (North, 1990). Konstitusi, undang-undang, dan semua peraturan resmi lainnya adalah contoh aturan formal. Sistem politik (struktur pemerintahan, hak individu), sistem ekonomi (hak milik dalam menghadapi kelangkaan sumber daya, kontrak), dan sistem keamanan (peradilan, polisi) semuanya dibentuk oleh aturan formal. Aturan informal, di sisi lain, mencakup segala sesuatu yang memengaruhi bagaimana kesan subjektif individu terhadap

lingkungan tempat tinggalnya, termasuk pengalaman, kebijaksanaan konvensional, agama, dan elemen lainnya (Pejovich, 1995).

Terakhir adalah penegakan, tanpa sistem untuk menegakkan kebijakan mereka, tidak satupun dari lembaga ini akan berhasil. Alih-alih memilih perilaku tertentu, yang merupakan subjek ekonomi ketika membahas kelangkaan dan rasionalitas, definisi ekonomi institusional berkonsentrasi pada studi tentang struktur dan operasi sistem sosial atau budaya, yang secara eksplisit mencakup perilaku dan keinginan individu sambil juga mempertimbangkan perilaku kelompok dan tujuan masyarakat (*public*).

Secara umum Marselina (2021), perekonomian yang mengutamakan hak milik dapat digunakan untuk mendefinisikan ekonomi institusional. Pemilik sarana atau faktor produksi, apakah mereka orang atau organisasi, menghasilkan ekonomi. sehingga mereka memiliki kebebasan atau kekuatan untuk menguasai sektor ekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhannya. Pemilik komponen produksi dalam skenario ini berperan sebagai agen pertumbuhan ekonomi. Ternyata berbagai elemen, termasuk pertimbangan sosial, politik, dan lainnya, mempengaruhi bagaimana keputusan dibuat oleh orang-orang dalam kehidupan nyata. Pada tahap ini, ekonomi kelembagaan menegaskan bahwa aktivitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh organisasi pelaku ekonomi (teori ekonomi politik), rancangan aturan main (teori ekonomi biaya transaksi), norma dan standar, dan kerangka kelembagaan dari ekonomi.

Dalam situasi ini, lembaga-lembaga non pasar dituntut untuk menjaga pasar agar tidak terjerat dalam kegagalan yang tiada henti, yaitu dengan menciptakan aturan main atau lembaga (institusi). Dengan kata lain, ekonomi kelembagaan menekankan betapa pentingnya lembaga dan kebijakan pemerintah memberikan dampak bagi perekonomian karena kemakmuran suatu negara tidak hanya diukur secara kuantitatif tetapi juga dalam segala aspek kehidupan, termasuk norma-norma sosial dan praktik budaya yang dimiliki berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Perdagangan Internasional

2.1.4.1 Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri adalah pertukaran komoditas dan jasa antar negara di luar batas negara berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan dari perbedaan sumber daya, iklim, lokasi, keahlian, populasi, tingkat harga, dan struktur ekonomi dan sosial (Amir, 2000). Kebutuhan penduduk negara tersebut tidak terpenuhi karena kondisi yang berbeda-beda, maka perlu dilakukan kegiatan perdagangan internasional, termasuk impor dan ekspor. Kepatuhan negara pada sistem ekonomi terbuka memunculkan aktivitas perdagangan internasional, oleh karena itu muncul juga ungkapan “keterbukaan perdagangan”. Tingkat keterbukaan perdagangan adalah ukuran seberapa besar GDP suatu negara dari jumlah ekspor dan impor (Yuslian, 2021).

2.1.4.2 Trade Openness

Tingkat keterbukaan suatu negara umumnya dihitung sebagai proporsi volume perdagangan luar negeri terhadap PDB selain penggunaan proporsi impor terhadap PDB (Romer, 1986) dan laju peningkatan ekspor (Chow, 1987). Mercan *et al.*, (2013) menyatakan keterbukaan juga menunjukkan ketergantungan negara terhadap perdagangan luar negeri. Besar kecilnya tingkat keterbukaan menunjukkan tingkat kepentingan perdagangan luar negeri bagi perekonomian suatu negara. Dengan adanya keterbukaan negara, peningkatan dapat dilihat pada penerimaan dan pengeluaran valas pada hasil peningkatan volume ekspor dan impor. Pangsa perdagangan luar negeri dalam GDP akan meningkat dengan peningkatan volume perdagangan luar negeri.

Dengan membatasi atau melonggarkan kontak antar negara, keterbukaan ekonomi merupakan alat kebijakan untuk mengatur arus modal internasional dan barang dan jasa (Yanikkaya, 2003). Tujuan pelaksanaan kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pergerakan ekonomi. Ada dua arah keterbukaan ekonomi global. Pergerakan produk dan jasa diatur oleh keterbukaan perdagangan. Keterbukaan keuangan adalah faktor kedua dalam mengelola arus global. Kegiatan *Trade Openness* menciptakan

keunggulan tiap negara, yang nantinya akan melakukan spesialisasi produksi dan meningkatkan kondisi produksi di negara tersebut (Yuslian, 2021).

Perdagangan internasional terjadi karena tidak semua barang dan jasa dimiliki oleh semua negara, sehingga setiap orang bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya (Case & Fair, 2007). Akibatnya, perdagangan internasional dihasilkan dari faktor penawaran (perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas, cara menggabungkan faktor produksi dalam proses manufaktur, atau perbedaan produksi) dan faktor permintaan (permintaan barang atau jasa yang didorong oleh selera dan pendapatan) yang dapat menyebabkan perbedaan harga. Oleh karena itu, istilah “perdagangan internasional” mengacu pada pertukaran barang dan jasa di pasar global antar negara.

Rasio perdagangan terhadap GDP, terkadang disebut sebagai rasio keterbukaan perdagangan, digunakan oleh OECD untuk menilai kepentingan relatif perdagangan lokal dan internasional. Indikator ini dihitung untuk setiap negara dengan menggunakan rata-rata sederhana dari jumlah total barang yang diekspor dan diimpor dalam kaitannya dengan GDP. Berlawanan hal tersebut, rasio yang rendah tidak selalu menunjukkan hambatan tarif atau non-tarif yang tinggi terhadap perdagangan internasional. Ini bisa jadi karena hal-hal seperti ukuran ekonomi yang terlibat dan jarak fisik antara mitra dagang.

Boediono (1997) mengatakan bahwa keterbukaan perdagangan yang ditandai dengan perdagangan internasional yang semakin terbuka memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Kuantitas dan kualitas kegiatan produksi dalam negeri, serta spesialisasi produksi yang dapat terjadi antar negara telah meningkat.
- b. Meningkatkan kesempatan kerja, negara pengekspor dapat meningkatkan produksi untuk konsumsi ekspor karena perdagangan antara mereka menjadi lebih terbuka. Kesempatan kerja akan meluas sebagai akibat dari kenaikan tingkat produksi ini. Negara-negara yang mengimpor barang juga diuntungkan, karena mereka tidak dapat memproduksi barang yang

dibutuhkan untuk menggunakan sumber daya mereka untuk usaha yang lebih menguntungkan.

- c. Salah satu sumber penerimaan kas negara atau devisa adalah dari bea masuk, pajak, dan pungutan lainnya yang terkait dengan ekspor dan impor.
- d. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, khususnya di sektor industri, dapat membantu memproduksi lebih banyak barang dalam waktu yang lebih singkat seiring perkembangan teknologi baru.
- e. Meningkatkan kerjasama internasional dan ikatan persaudaraan. Ekspansi ekonomi suatu negara dapat didorong oleh kerja sama.

2.1.4.3 Teori Perdagangan Internasional

Teori Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage*) dari Adam Smith dan Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) dari David Ricardo adalah dua teori utama yang membentuk teori klasik perdagangan internasional.

1) Teori Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage Theory*)

Menurut gagasan Adam Smith tentang keunggulan absolut, negara dapat berspesialisasi dalam barang yang efisien untuk mengekspor dan mengimpor barang yang kurang efisien. Jika suatu negara berfokus pada produk yang menggunakan sumber daya yang sama tetapi dengan harga lebih rendah dari negara lain, negara tersebut dianggap memiliki keunggulan absolut (Yuslian, 2021). Smith melihat kemampuan suatu negara untuk menghasilkan komoditas dan jasa, atau kapasitas produksinya, sebagai tanda kesejahteraannya. Terdapat asumsi dalam teori ini, yaitu:

1. Hanya dua negara, seperti negara X dan Y, yang akan melakukan perdagangan satu sama lain.
2. Hanya dua produk, seperti komoditas A dan B, yang dapat dibuat.
3. Tenaga kerja adalah satu-satunya input yang digunakan dalam produksi barang-barang ini, dan tenaga kerja di suatu negara dianggap homogen atau bergerak sempurna.

2) Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage Theory*)

Meskipun tidak memiliki efisiensi produk, suatu negara tetap dapat melakukan perdagangan yang menguntungkan di wilayah di mana keunggulan absolutnya buruk, menurut teori keunggulan komparatif David Ricardo. Dengan menekankan pembuatan dan ekspor barang-barang dengan kerugian absolut yang lebih kecil dan mengimpor barang-barang dengan kerugian absolut yang lebih besar, suatu negara dapat menghindari hal ini (Yuslian, 2021). Menurut Adam Smith, negara-negara tanpa keunggulan absolut tidak dapat berdagang, tetapi menurut David Ricardo, perdagangan dapat berjalan selama masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif.

2.1.5 Hubungan Antar Variabel

2.1.5.1 Hubungan *Good Governance* dan Pertumbuhan Ekonomi

Munculnya teori endogen baru telah mengarahkan para ahli untuk menentukan sumber alternatif pertumbuhan ekonomi dan perbedaan antara tingkat pembangunan ekonomi negara (Acemoglu *et al.*, 2004). Dalam kaitan ini, dampak tata kelola publik, dengan kata lain, kualitas administrasi publik, terhadap pertumbuhan ekonomi telah diteliti secara teoritis dan empiris. Tata kelola publik adalah penentu utama lingkungan ekonomi dan kelembagaan, yang memiliki dampak signifikan pada proses pengambilan keputusan pelaku ekonomi utama dan yang memengaruhi investasi dalam modal fisik dan manusia serta teknologi, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, tata kelola publik berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui banyak saluran langsung dan tidak langsung.

1. *Voice and Accountability* terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel suara dan akuntabilitas terkait dengan sistem politik negara. Itu Partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan tinggi dalam sistem demokrasi dibandingkan dengan sistem yang lebih otoriter. Tingkat demokrasi yang lebih tinggi berarti peningkatan tingkat suara dan akuntabilitas, yang pada gilirannya memungkinkan munculnya banyak partai politik. Reformasi ekonomi lebih sulit di bawah banyak partai politik karena reformasi menciptakan peningkatan risiko politik untuk masa jabatan berikutnya bagi partai penguasa yang ada (Samarasinghe, 2018). Menurut Annur (2019), ada korelasi substansial antara

suara dan akuntabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebebasan sipil yang diberikan pemerintah di suatu negara mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat merangsang ekspansi ekonomi. Menyusul pemberian kebebasan sipil oleh negara, warga negara akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan nasional untuk memilih pemerintahan baru. Yuslian (2021) juga melakukan studi empiris yang menyimpulkan bahwa indikator *Voice dan Accountability* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. *Government Effectiveness* terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kaufmann *et al.*, (2010) menjelaskan efektivitas pemerintah diukur dengan kualitas layanannya, keterampilan yang digunakannya untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, dan kapasitasnya untuk mempengaruhi kemajuan ekonomi. Temuan studi Demarani (2018) yang menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi, mendukung pernyataan tersebut. Bayar (2016) juga melakukan penelitian yang menemukan korelasi kuat antara efektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

3. *Control of Corruption* terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Korupsi memiliki hubungan dengan sistem sosial, ekonomi, budaya dan peradilan suatu negara (Ata & Arvas, 2011). Yuslian (2021) menjelaskan ketika negara mampu mengendalikan tindakan korupsi, dalam pemungutan pajak misalnya, nantinya akan membantu negara dalam mengalokasikan pendapatan tersebut secara maksimal ke seluruh aspek pembangunan sehingga dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Tindakan korupsi dapat dilihat dari keadaan status institusi negara tersebut karena korupsi yang terjadi di suatu negara juga akan membuat asumsi negatif para investor dalam melakukan investasinya di negara tersebut. Ketika hal tersebut terjadi tentu akan mengakibatkan produktivitas rendah, sehingga laju perekonomian terhambat sementara ketika suatu negara memiliki institusi yang bersih dari tindak korupsi tentu akan memperlancar laju perekonomiannya. Studi empiris yang dilakukan oleh Samarasinghe (2018) mendapatkan hasil bahwa pengendalian korupsi merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan hasil penelitian didukung oleh Mahriun & Putri (2020) bahwa *Control of Corruption* berpengaruh positif signifikan terhadap perekonomian.

2.1.5.2 Hubungan *Trade Openness* terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Negara yang memiliki sistem ekonomi terbuka cenderung akan lebih terbuka untuk melakukan berbagai kegiatan kerja sama antar negara dibanding dengan negara yang memiliki sistem ekonomi tertutup. Kerja sama di bidang perdagangan internasional, baik komoditas maupun jasa, merupakan salah satu yang sering dilakukan oleh negara-negara (Yuslian, 2021). Perekonomian yang secara bebas berinteraksi dengan perekonomian lain di seluruh dunia dikatakan memiliki perekonomian terbuka, dan interaksi ini terlihat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian empiris oleh Maulina (2019) dan Hidayah *et al.*, (2020) yang menunjukkan bahwa variabel *Trade Openness* berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi mendukung klaim tersebut. Dalam literatur lainnya juga menghasilkan adanya pengaruh signifikan perdagangan terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu negara (Karras, 2003; Mohan, 2007; Iyoha & Okim, 2017).

2.2 Tinjauan Tentang BRICS

2.2.1 Sejarah Pembentukan BRICS

Krisis ekonomi global abad ke-21, yang telah menyebabkan penurunan ekonomi, bangsa yang signifikan harus menyusun strategi baru untuk keluar dari kemerosotan (Puspitasari, 2011). Negara-negara besar seperti Eropa dan Amerika Serikat kini mengendalikan organisasi keuangan internasional sebagai akibat dari krisis ekonomi. Ruang lingkup hak, kebebasan, dan partisipasi yang menyusut dalam organisasi global, akibatnya negara-negara berkembang menderita. Oleh karena itu kita memerlukan suatu forum yang dapat membantu negara-negara berkembang meningkatkan dominasinya terhadap ekonomi dunia.

2.2.1.1 BRICS Muncul sebagai Asosiasi Ekonomi

Jim O'Neill, seorang ekonom Inggris, menyumbangkan idenya untuk pembentukan organisasi keuangan internasional. Jim O'Neill, mantan ketua Goldman Sachs di Amerika Serikat, percaya bahwa negara-negara pada akhirnya akan tumbuh dan mampu bersaing dan mendukung rezim barat. Akhirnya pada tahun 2001, Brazil, Rusia, India, dan Cina membentuk asosiasi ekonomi BRIC. Negara-negara berkembang melihat peningkatan ekuitas pasar sebagai hasil dari

aliansi ekonomi empat negara ini. Negara-negara anggota BRIC (Brazil, Rusia, Cina, dan India) memiliki populasi 40 persen dari total dunia, mencakup seperempat dari total luas daratan dunia, dan menempati peringkat ekonomi keempat dalam hal kinerja ekonomi mereka (Priangani, 2015). Vladimir Putin yang hadir dalam sidang tersebut, tampil setelah presentasi asosiasi tentang ekonomi. BRICS (2015) menyatakan bahwa Majelis Umum PBB di New York telah menyarankan untuk mengadakan pertemuan tingkat menteri BRIC berikutnya, yang diadakan pada tanggal 20 September 2006 dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota serta Menteri Pertahanan dari India. Untuk pertama kalinya, negara-negara anggota BRIC berkumpul untuk membahas secara spesifik perluasan kerja.

Afrika Selatan adalah salah satu wilayah di mana BRIC mulai menawarkan peluang kerja sama karena memperluas pengaruhnya di negara-negara berkembang. Pada tahun 2011, mereka memutuskan bahwa Afrika Selatan harus menjadi anggota blok ekonomi BRICS, yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, negara-negara BRICS, berpartisipasi dalam organisasi dan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, G-20, dan Gerakan Non-Blok. Setiap negara mengambil bagian dalam organisasi internasional seperti Uni Ekonomi Eurasia dan Perjanjian Keamanan Kolektif Organisasi Persemakmuran Negara-Negara Independen, di mana Rusia menjadi salah satu anggotanya. Cina dan Rusia juga tergabung dalam organisasi yang sama, *Asia-Pacific Economic Cooperation* dan *Cooperation Organization of Shanghai*. Brazil, Afrika Selatan, dan India adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan, Asosiasi Asia Selatan untuk Kerja Sama Regional, MERCOSUR, dan Komunitas Bangsa-Bangsa Amerika Latin. Afrika Selatan juga merupakan anggota Uni Afrika dan Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (BRICS, 2015). Selain itu, Cina dan Rusia terlibat dalam sejumlah organisasi internasional.

Secara geografis, anggota BRICS tidak berbatasan satu sama lain, dan dari kejauhan sejarah ekonomi masing-masing negara dapat terlihat berbeda (Puspitasari, 2011). China dan Rusia mengungguli negara lain dalam hal kinerja ekonomi. Kesenjangan ideologi di antara para anggota juga menunjukkan bahwa

tidak ada kesamaan ideologi, ekonomi, atau wilayah geografis. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, para anggota memiliki populasi yang sama, akses ke sumber daya yang melimpah, dan tujuan ekonomi yang membantu pertumbuhan ekonomi negara anggota dan pengaruhnya di panggung global.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), yang memiliki agenda tahunan untuk membicarakan peristiwa terkini dan tantangan global, menguraikan semua kegiatan yang disetujui dan dilaksanakan oleh BRICS. Negara-negara anggota akan memiliki opsi untuk menjadi tuan rumah KTT setiap tahun. Pencapaian BRICS dalam meluncurkan lembaga keuangan *New Development Bank* (NDB) pada tahun 2014 merupakan bukti pencapaian berkelanjutan mereka dalam memperluas dominasinya di seluruh negeri melalui kerja sama multilateral. Griffith Jones (2014) mengklaim bahwa pembangunan ini nantinya akan menyediakan pendanaan untuk semua proyek, termasuk infrastruktur dan program pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh negara anggota baik negara maju maupun negara berkembang.

Sebagai akibat dari perdagangan bebas, perpindahan dari sistem kapitalisme ke globalisasi mendorong semua negara untuk terlibat dan berkontribusi dalam hubungan bilateral ini, yang pada gilirannya memperkuat karakter industri kompetitif masing-masing negara. Setiap negara BRICS dianggap mampu terlibat dalam perdagangan bebas untuk memajukan ekonomi mereka. Selain itu, di era globalisasi dan perdagangan bebas, negara-negara tetap bergantung satu sama lain (Priangani, 2015).

2.2.1.2 Tujuan Pembentukan BRICS

Perkembangan afiliasi keuangan BRICS ini mutlak dimiliki alasan-alasan berbeda. BRICS didirikan sebagai sarana untuk mengatasi penurunan ekonomi yang disebabkan oleh krisis yang melanda ekonomi abad ke-21. Selain itu, dalam perekonomian dunia yang didominasi oleh Eropa dan Amerika Serikat, BRICS merupakan kelompok ekonomi yang pada akhirnya akan bersaing dengan IMF dan Bank Dunia. Ketentuan yang telah dibuat oleh Barat, tidak diragukan lagi, digunakan oleh Bank Dunia dan IMF, yang secara alami lebih memihak

penguasa (maju) daripada negara peserta (berkembang). Ketersediaan cadangan devisa diprioritaskan dalam upaya mengurangi kerugian negara anggota akibat pengaruh pihak lain dalam BRICS. Dalam upaya meniru lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, BRICS bermaksud untuk meningkatkan sistem keuangannya dengan mengganti dolar dengan mata uang baru dan memastikan stabilitas devisa masing-masing negara anggota melalui metode pembayaran internasional yang baru (Ismanthono, 2010).

BRICS didirikan tidak hanya untuk mendukung ekonomi global tetapi juga untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kebaikan bersama. Untuk menghindari konflik dan perang dingin yang konfrontatif, tujuan perdamaian dan keamanan adalah menyebarkan demokrasi dan kesetaraan di seluruh hubungan internasional. Ismanthono (2010), BRICS menawarkan dukungan kepada negara-negara berkembang dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, teknologi, pertahanan, dan hubungan diplomatik. BRIC bertujuan untuk pemerataan dan kelengkapan dalam memberikan bantuan pembangunan kepada setiap negara. Meskipun negara-negara maju terus mengendalikan ekonomi global, BRICS berusaha untuk berkontribusi dalam pembentukan tatanan global dan penegakan keadilan. Mengembangkan strategi di bidang kerja sama saat ini seperti perang melawan perdagangan narkoba, reformasi IMF, penerapan dan kemajuan teknologi sesuai dengan standar, prinsip, dan norma yang berlaku, dan pembentukan perdagangan bebas hambatan adalah tujuan lain dari para pemimpin negara anggota.

Akuisisi tersebut dimaksudkan untuk memastikan stabilitas pertumbuhan di negara yang sedang mengalami krisis ekonomi akibat pengaruh Eropa dan Amerika Serikat berkat keberadaan lima negara anggota. BRICS juga berharap menjadi suara yang signifikan bagi negara-negara miskin yang mengadvokasi perubahan kuantitatif dalam kelompok G-20 dan G-7. Melalui bantuan yang mereka berikan kepada negara-negara berkembang, asosiasi ekonomi BRIC diakui dalam skala global atas peran mereka dalam menyelesaikan masalah di berbagai bidang. Kuota Bank Dunia dan IMF serta hak suara yang diberikan kepada negara berkembang dapat berubah sebagai hasil dari upaya BRICS untuk mempromosikan tata kelola global dan reformasi keuangan. Menurut John

(2012), dalam upaya BRIC untuk mengubah kekuatan suara dan kuota internal, organisasi internasional ini dapat menjadi rencana untuk mengembangkan tatanan sistem keuangan baru yang tidak didominasi oleh *Bretton Woods*. Menurut Amadeo (2019), *Bretton Woods* adalah nama perjanjian tahun 1944 yang menetapkan dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia dan AS sebagai kekuatan keuangan teratas di dunia.

2.2.1.3 Peran dan Kepentingan Ekonomi Politik Negara Anggota BRICS

Asosiasi ekonomi BRICS dipengaruhi oleh pengaruh berbagai peran masing-masing negara anggota. India adalah contoh negara yang memainkan banyak peran ekonomi, politik, dan sosial. Dalam hal ekonomi, promosi perdagangan intra-BRICS India memerlukan impor dari negara anggota lainnya. Nantinya, fleksibilitas perdagangan mata uang lain, seperti dolar, dapat ditambahkan, meningkatkan nilai mata uang masing-masing pihak dan berpotensi mendevalusi Dolar AS. India telah memberikan kontribusi sebesar 18 miliar dolar kepada Pengaturan Cadangan Kontinjensi dan Bank Pembangunan Baru. India juga menginginkan setiap anggota berkembang menjadi negara yang kuat sehingga tanggung jawab penguatan tidak hanya dibebankan pada satu atau dua negara saja. Misalnya, India mengembangkan program pengembangan eksekutif di seluruh dunia dan menghabiskan sekitar \$4 miliar di Afrika Selatan untuk melatih para pekerjanya.

Cina juga berkontribusi pada upaya BRICS untuk mendorong kerja sama internasional. Ekonomi BRICS mendapat manfaat dari permintaan Cina yang signifikan akan makanan dan bahan baku, yang dapat menjadikan Cina mitra dagang strategis dan mendukung perdagangan bilateral. Dapat dilihat bahwa antara tahun 1999 dan 2010, Cina membelanjakan total US\$ 133 miliar untuk kedelai dan besi dari Brasil, US\$ 180 miliar untuk minyak dari Rusia, besi, kapas, dan US\$ 103 miliar untuk dan tembaga dari India (Oropeza García, 2014). Orang Cina juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendirian NDB dan CRA sebagai lembaga keuangan dengan menyumbang 41 miliar dolar AS.

Cina mengangkat negara-negara bagian untuk mengubah pola moneter global, termasuk mengubah sistem pemilihan IMF, karena percaya bahwa partisipasi yang lebih besar akan menjaga kepentingan semua negara agraris. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengusulkan pembentukan BRICS-Plus pada KTT Xiamen tahun 2017, yang akan bertindak sebagai forum baru untuk kerja sama Selatan-Selatan melalui aliansi BRICS. Kuota pemungutan suara IMF dapat diperluas dengan menggunakan BRICS-Plus untuk memperluas perbatasan negara-negara anggota. Selain itu, dapat memudahkan negara anggota untuk memperluas perjanjian perdagangan bilateral atau regional (Donnelly, 2018).

Kontribusi Rusia terhadap pertumbuhan asosiasi ekonomi ini sama pentingnya. Pertemuan pertama para menteri luar negeri, yang berlangsung di New York pada 2006, dan kemudian pada pertemuan puncak di Yekaterinburg pada 2009, dimulai oleh Lavrov, menteri luar negeri Rusia (Stuenkel, 2014). Dengan berinvestasi di lembaga keuangan NDB dan CRA BRICS, yang menyumbang US\$18 miliar untuk operasi, Rusia juga ikut ambil bagian. Untuk memperkuat posisinya dalam politik internasional, Rusia menyarankan untuk mengembangkan layanan konsultasi untuk konflik regional tertentu dan tantangan hukum internasional kontemporer (BRICS, 2015). Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, yang meneliti ekonomi dan kebijakan dalam dan luar negeri negara-negara anggotanya, memberikan kontribusi untuk pendidikan atas nama Rusia. Institusi pendidikan tinggi di Rusia juga mendukung pertumbuhan inisiatif pendidikan dan bahasa nasional. Dalam Deklarasi Ufa, Rusia juga mengusulkan konsep tambahan di berbagai bidang pada KTT ketujuh.

Pendirian NDB dan CRA juga dimungkinkan oleh pemberian dari Brazil, yang menyumbangkan uang untuk menutupi biaya prasyarat fungsional Bank Pembangunan sebesar US\$ 18 miliar, yang dapat digunakan oleh semua pemerintah negara bagian. Brazil juga memiliki cadangan minyak terbanyak dari negara mana pun di dunia, menjadikannya kekuatan penting di antara anggota UE karena kepemilikannya atas sumber daya domestik tersebut. Brazil juga semakin memimpin negara-negara BRICS dalam negosiasi global, khususnya di Putaran Doha Organisasi Perdagangan Dunia (Daemmrigh & Musacchio, 2011). Brazil memiliki tanah yang sangat luas dengan sumber daya

alam yang melimpah, termasuk mata air bersih, iklim tropis, dan tanah subur, yang dapat membantu negara-negara BRICS dalam meningkatkan ketahanan pangan. Karena Brazil menghasilkan daging sapi dan kedelai paling banyak, Menteri Pertaniannya, Blairo Maggi, setuju untuk meningkatkan perdagangan dengan para anggotanya (Rosa, 2017). Oleh karena itu, Brazil dapat berfungsi sebagai pasar yang lebih menguntungkan untuk produk pertanian negara anggota.

Dalam memajukan kebijakan luar negeri dan mencapai tujuan politik, Afrika Selatan memiliki peran penting. Afrika Selatan dan BRICS memiliki tujuan yang sama untuk memperkuat basis dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. BRICS bekerja sama dengan Afrika Selatan untuk mendukung pembangunan infrastruktur benua Afrika. Dengan cadangan mineral senilai \$2,5 triliun, Afrika Selatan juga merupakan negara terkaya di dunia dan produsen utama platinum, kromium, vanadium, dan mangan. Ini juga menawarkan layanan ahli untuk penambangan emas, yang akan membantu negara-negara anggota BRICS yang miskin sumber daya (BRICS, 2013). Perjanjian NDB dan CRA diperkuat oleh Afrika Selatan, yang baru saja bergabung dengan lembaga keuangan BRICS pada tahun 2011 dan menyumbangkan aset sebesar US\$ 5 miliar.

2.2.1.4 Peran BRICS dalam Dunia Internasional

Negara berkembang BRICS sekarang mampu mendukung pembangunan suatu negara dan menyuarakan kepentingannya sebagai hasil dari peningkatan kerjasama. Pada akhir tahun 2007, menurut bank Amerika Goldman Sachs, mereka akan mencapai 10% dari PDB global melalui kemitraan yang berkembang, yang mungkin mengarah pada pemulihan pasar saham yang sama seperti BRICS. Pada akhir tahun 2007, bobot ekonomi gabungan mereka menyumbang 15% dari ekonomi global. Sebelum kedatangan Afrika Selatan, pertumbuhan pasar saham negara-negara BRIC juga meningkat drastis, mencapai 369 persen di Brazil, 49 persen di India, 630 persen di Rusia, dan 201 persen di Cina (O'Neill, 2007).

Karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat di setiap negara anggota, BRICS memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi global di tahun-tahun

setelah pembentukannya. Negara-negara anggota yang mengalami transformasi besar termasuk Brazil, yang pada akhir 1980-an mendorong privatisasi dan menerapkan rencana stabilitas ekonomi dalam upaya memerangi hiperinflasi. Cina menghindari krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an, dan Rusia juga berhasil merebut kembali prestise ekonominya melalui kebijakan yang diberlakukan untuk melakukannya. India bukan satu-satunya negara yang mengadopsi perubahan ekonomi signifikan secara efektif pada 1990-an (Puspitasari, 2011).

Dari tahun 2005, menurut perkiraan, GDP BRIC dapat melampaui Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman, Prancis, dan Jepang pada tahun 2050. Menurut prediksi yang dibuat dalam makalah tahun 2003 oleh Goldman Sachs, mereka dapat menjadi ekonomi global. kekuatan dalam 50 tahun ke depan, sekitar tahun 2050. Di masa depan, BRICS berpotensi untuk berperan besar dalam ekonomi global. Dampak terhadap ekonomi global negara-negara berkembang ini telah banyak ditunjukkan. Seperti Cina, yang levelnya meningkat 10% selama sepuluh tahun terakhir. Pencapaian ini berkembang lebih cepat daripada ekonomi negara-negara G7, yang meliputi AS, UE, Jepang, Prancis, Inggris, Kanada, dan Italia. Kontribusi negara-negara BRICS terhadap perdagangan global telah berkembang pesat sebagai hasil dari upayanya untuk mengembangkan ekonominya, menyalip pasar industri. Bahkan Eropa, yang sedang mengalami krisis keuangan pada tahun 2010, mungkin mendapat manfaat darinya. Bantuan diberikan dalam bentuk pembelian obligasi dan aset Jerman yang diterbitkan Inggris (Lisbet, 2013).

Investasi dilakukan di sektor produksi dan keuangan saat Eropa mengalami krisis keuangan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi penyebabnya. Selain menjadi anggota organisasi internasional dan multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia, G-20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua negara BRICS secara aktif berpartisipasi dan bergabung dengan kontribusi bijaksana dari BRICS, yang negara-negara anggotanya memberikan \$75 kepada KTT Grup G20 di Los Cabos, Meksiko (Singh & Dube, 2014). Di hadapan ekonomi global, asosiasi ekonomi ini dapat menunjukkan kekuatan dan perlawanan yang signifikan. Ikatan ekonomi yang kuat memungkinkan beberapa negara

berkembang secara ekonomi lebih cepat daripada negara berkembang lainnya. Potensi negara berkembang berasal dari dua sumber, fakta bahwa stok modal mereka lebih kecil daripada negara maju dan membutuhkan lebih banyak investasi modal, dan fakta bahwa negara berkembang mengejar pertumbuhan mereka dan dapat memanfaatkan teknologi dari negara maju.

Menurut agenda tahunan kelima di Durban, Afrika Selatan, yang mengarah pada kebijakan BRICS untuk menciptakan Bank Pembangunan sebagai bagian dari peran BRICS dalam mendorong tingkat kerjasama yang lebih besar, bank akan membantu negara-negara berkembang di sektor keuangan membangun infrastruktur dan menyediakan dana asing. cadangan devisa sehingga secara bertahap dapat menggantikan IMF pada saat krisis ekonomi. Tujuan keikutsertaan BRICS dalam pertemuan reguler perwakilan tetap di PBB, yang diselenggarakan di New York dan Jenewa, kontribusi BRICS dengan harapan dapat berkolaborasi dengan visi jangka panjang BRICS yaitu membahas strategi untuk mendirikan sekretariat virtual, dewan bisnis atau *business council*, dan pembiayaan *think tank forum*.

Berikut peran multilateral BRICS menurut Patra (2021) dalam tulisannya yang berjudul *Growth and Development in the BRICS Economies* :

1. Bank Pembangunan Baru (NDB) dimulai berfungsi pada tahun 2015 dan telah menyetujui tentang 80 proyek di negara-negara anggotanya melibatkan portofolio sebesar USD 30 miliar di bidang-bidang seperti transportasi, air dan sanitasi, energi bersih, infrastruktur digital, infrastruktur sosial dan perkembangan perkotaan. Sejak September 2021, NDB menyetujui anggota baru (Uruguay; UEA; Bangladesh). NDB telah menetapkan target sebesar USD 10 miliar untuk dukungan terkait COVID yang lebih dari USD 7 miliar telah dicairkan.
2. Pengaturan Cadangan Kontinjensi atau CRA adalah mekanisme dengan korpus total USD 100 miliar untuk menyediakan swap jangka pendek dukungan selama krisis neraca pembayaran. Swap memiliki porsi *delinked* 30 per persen yang dapat diperpanjang sebagai keadaan darurat dukungan

likuiditas dan bagian terkait dari 70 persen, yang bergantung pada negara peminta yang memiliki IMF program di tempat.

3. Kemitraan Ekonomi Strategis BRICS 2021-2025 memberikan *roadmap* ekonomi kerjasama antar negara anggota, dengan fokus pada perdagangan dan investasi, ekonomi digital dan berkelanjutan perkembangan.
4. Keamanan Informasi BRICS Saluran adalah inisiatif terbaru yang dimulai selama Kepresidenan Rusia pada tahun 2020, dengan fokus pada pertukaran informasi tentang keamanan siber dan insiden terkait dunia maya.
5. Satuan Tugas BRICS pada publik swasta Kemitraan (PPP) dan Infrastruktur adalah inisiatif lain untuk membentuk forum untuk membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan kerjasama dalam infrastruktur. Pada tahun 2021, fokusnya adalah pada infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan).
6. Satuan Tugas Pembayaran BRICS (BPTF) adalah inisiatif bank sentral untuk mendorong kerjasama dalam sistem pembayaran, termasuk proposal tentang pembayaran lintas batas.
7. Dewan Bisnis BRICS telah dibuat sebagai platform untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan bisnis, perdagangan dan investasi di antara komunitas bisnis BRICS dan memastikan bahwa ada dialog reguler antara mereka dan pemerintah BRICS negara.
8. Aliansi Bisnis Wanita BRICS (WBA) bertujuan untuk mempromosikan kewirausahaan perempuan di negara-negara BRICS.
9. Forum Akademik BRICS (BAF) adalah platform untuk musyawarah dan diskusi antara lembaga akademik terkemuka dari negara-negara BRICS, mencari ide dan solusi pada berbagai sosial, lingkungan dan masalah pendidikan.
10. Dewan Pemikir BRICS (BTTC) adalah dimulai pada tahun 2013 untuk meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan peningkatan kapasitas, antara lain komunitas akademik negara-negara BRICS.
11. Kerjasama Riset Energi BRICS Platform mempromosikan berkelanjutan berbasis energi pengembangan, berbagi teknologi energi canggih, perluasan kerja sama pada program pendidikan, pertukaran data statistik dan rencana pembangunan sistem energi nasional, dan informasi tentang praktik terbaik

dan kerangka peraturan di sektor energi. Platform ini juga bertujuan dalam menciptakan sinergi dalam kerjasama energi BRICS di berbagai platform.

12. BRICS Ramah Lingkungan Platform Teknologi (BEST), diluncurkan pada 2015, bertujuan untuk memfasilitasi akumulasi dan pertukaran pengalaman/informasi terbaik praktik yang tersedia dan lingkungan ramah ("hijau") teknologi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
13. Laporan Keuangan Digital Inklusi menyatukan inisiatif, inovasi dan reformasi yang dilakukan di negara-negara BRICS di bidang keuangan inklusi dengan memanfaatkan teknologi digital peralatan. Laporan ini juga memetakan upaya-upaya tersebut terhadap Pedoman Kebijakan Tingkat Tinggi G-20 tentang inklusi keuangan digital.

2.3 Tinjauan Empiris

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencari penelitian sebelumnya yang terkait dan relevan dengan subjek yang dicakup oleh penyelidikan sebelumnya. Studi-studi ini kemudian dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 9. Tinjauan Empiris

| Peneliti/ Tahun | Judul | Periode Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|--|---|-------------------------------|-----------------|---|
| Adila Sabila Yuslian, (2021) | Analisis Pengaruh <i>Trade Openness</i> dan Indikator <i>Good Governance</i> Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Asean | 2015-2019 | Data Panel, REM | Hasilnya adalah <i>Trade Openness, Government Effectiveness, Control of Corruption</i> , dan <i>Voice and Accountability</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. |
| Siti Nur Hidayah, Sudati Nur Sarfiah, dan Rian | Analisis Pengaruh Trade dan FDI terhadap Pertumbuhan | 2015-2018 | Data Panel, FEM | Variabel Trade <i>Openness</i> tidak berpengaruh signifikan dan <i>Foreign Direct Investment</i> |

| Peneliti/ Tahun | Judul | Periode Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|---|--|-------------------------------|-----------------|---|
| Destiningsih (2020) | n Ekonomi di Negara ASEAN -10 Pasca MEA Tahun 2015-2018 | | | berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN pasca integrasi MEA. |
| Dwi Mahriun dan Dewi Zaini Putri, (2020) | Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Penerimaan Pajak dan Ekspor terhadap Perekonomian di Asia Pasifik | 2010-2017 | Data Panel | <i>Control of Corruption</i> , penerimaan pajak, ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap perekonomian di 11 negara Asia Pasifik. |
| Muh Adnan Pratama Annur, (2019) | Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara di ASEAN Tahun 2007-2017 | 2007-2017 | Data Panel, REM | Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel <i>Government Effectiveness, Political Stability and Absence of Violence</i> dan <i>Voice and Accountability</i> berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 5 negara ASEAN. |
| Rahmi Nuraini dan Drs. Y. Bagio Mudakir, (2019) | Analisis Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: ASEAN | 2007-2017 | Data Panel, FEM | Variabel <i>Trade Openness and Foreign Direct Investment</i> berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. |

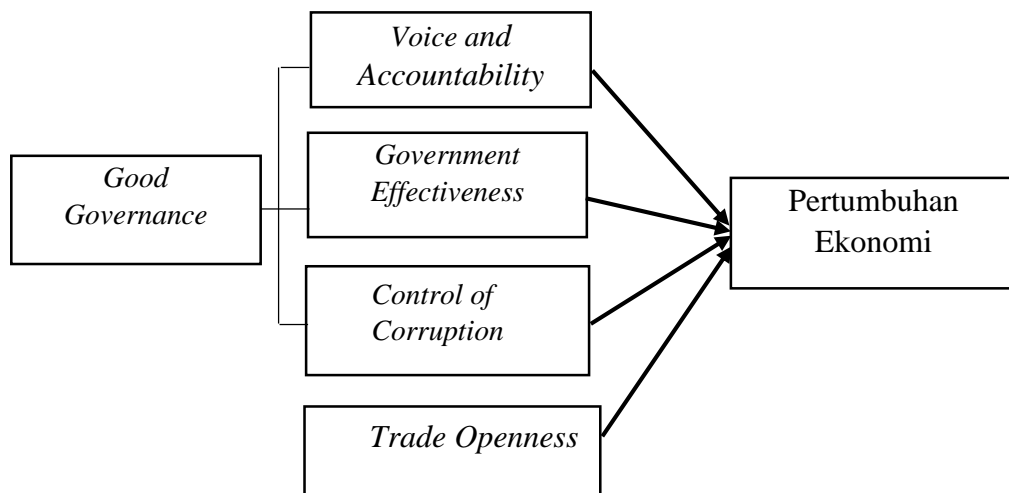
| Peneliti/ Tahun | Judul | Periode Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|---|--|---|-----------------------|---|
| | Tahun 2007-2017) | | | |
| Nala Maulana, (2019) | Analisis Pengaruh Keterbukaa n Perdaganga n, Penanaman Modal Asing, Inflasi, dan Populasi Terhadap Produk Domestik Bruto Negara Anggota ASEAN Periode 2008-2017 | 2008-2017 | Data Panel, REM | Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel perdagangan terbuka, penanaman modal asing inflasi, dan populasi berpengaruh positif signifikan terhadap PDB sedangkan variabel inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap PDB. |
| Tharanga Samarasin ghe, (2018) | <i>Impact of Governance on Economic Growth</i> | 2002-2014 145 negara yang diambil dari Uni Eropa, Amerika Utara, Timur Tengah, dan Afrika Utara | Data Panel, FEM | Variabel <i>Control of Curruption</i> (pengendalian korupsi) merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan satu unit dalam pemberantasan korupsi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat 6,9 %. |
| Finindya Demarani, (2018) | <i>The Effect of Government and Tax Ratio to Economic Growth (Case Study</i> | 2006-2015 6 Negara ASEAN | Data Panel, FEM | Pengaruh efektifitas pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan |

| Peneliti/ Tahun | Judul | Periode Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|------------------------------------|---|---|---|--|
| | <i>in ASEAN Countries)</i> | | | ekonomi, kualitas peraturan berpengaruh berpengaruh positif signifikan, penegakan hukum berpengaruh negatif signifikan, dan kontrol korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. |
| Milton Iyoha dan Ajan Okim, (2017) | <i>The Impact of Trade on Economic Growth in ECOWAS Countries: Evidence from Panel Data</i> | 1990-2013 15 negara yang tergabung masyarakat ekonomi Afrika Barat | 4 estimat or yaitu data panel: PLS, FEM, REM dan Dynam ic Panel Regress ion Model. | Variabel <i>Openness</i> berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. |
| Marlina Lumban Gaol, (2016) | Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN | 2004-2014 | Data Panel, FEM | Variabel <i>Political Stability and Absense Violence</i> dan <i>Regulatory Quality</i> signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. |
| Yilmaz Bayar, (2016) | <i>Public Governance and Economic Growth In The Transitional</i> | 2002-2013 | Data Panel, REM | Hasil menunjukkan bahwa semua indikator tata kelola kecuali kualitas regulasi secara statistik memiliki dampak |

| Peneliti/ Tahun | Judul | Periode Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|--------------------|--|-----------------------|--------|---|
| | <i>Economies of The European Union</i> | | | positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. |

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori yang telah dikemukakan mengenai hubungan antara mengenai hubungan variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) kemudian dikembangkan menjadi kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut.



Gambar 6. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- —→ : Variabel Independen (X) secara parsial mempengaruhi Variabel Dependen (Y)

2.5 Hipotesis

Adapun perumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga *Voice and Accountability* berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2020 di Negara-Negara BRICS.
2. Diduga *Government Effectiveness* berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2020 di Negara-Negara BRICS.

3. Diduga *Control of Corruption* berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2020 di Negara-Negara BRICS.
4. Diduga *Trade Openness* berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2020 di Negara-Negara BRICS.
5. Diduga *Voice and Accountability, Government Effectiveness, Control of Corruption*, dan *Trade Openness* berpengaruh serentak signifikan terhadap terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2020 di Negara-Negara BRICS.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengolahan data dengan menggunakan eviws dan berdasarkan referensi penelitian sebelumnya guna menganalisis pengaruh dari indikator *Good Governance*, antara lain *Voice and Accountability*, *Government Effectiveness*, dan *Control of Corruption*, serta Keterbukaan Perdagangan (*Trade Openness*) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *World Bank* dan *World Bank (Worldwide Governance Indicators)* yang menerbitkan jenis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Daftar variabel yang digunakan dalam penelitian ini diberikan di bawah ini.

Tabel 10. Ringkasan Variabel Penelitian

| Nama Variabel | Satuan Ukuran | Sumber Data |
|---------------------------------|---------------|-------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi | Persen | <i>World Bank</i> |
| <i>Voice And Accountability</i> | Indeks | <i>World Bank</i> |
| <i>Government Effectiveness</i> | Indeks | <i>World Bank</i> |
| <i>Control of Corruption</i> | Indeks | <i>World Bank</i> |
| <i>Trade Openness</i> | Persen | <i>World Bank</i> |

Lima negara BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang menjadi fokus penelitian ini dari tahun 2014 hingga 2020. Dalam bentuk data panel, data sekunder dikumpulkan dan dianalisa untuk penelitian ini. Data deret waktu (Time Series) dan data individual (Cross Section) digabungkan untuk membuat data panel (Pooled Data) yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang menjadi fokus analisis diuraikan di bawah ini.

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai keadaan di mana suatu negara menghasilkan lebih banyak komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu, berkembang menuju kondisi ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan kekayaan nasional. Informasi yang digunakan adalah data pertumbuhan GDP (persen tahunan), yaitu pertumbuhan GDP dengan data dari Bank Dunia yang dinyatakan dalam satuan (persen) berdasarkan harga konstan 2015 (dalam US dolar) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Berikut ini dapat digunakan sebagai perhitungan atau formula untuk pertumbuhan ekonomi.

$$GE = (GDP_t - GDP_{t-1}) / GDP_{t-1} \times 100\%$$

Dimana:

GE = Pertumbuhan Ekonomi

GDP_t = GDP tahun t

GDP_{t-1} = GDP tahun sebelumnya

3.2.2 *Voice and Accountability*

Voice and Accountability adalah salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik yang diukur dari proses politik, kebebasan sipil, dan hak politik rakyat untuk menentukan pemerintahan yang baik. Data yang digunakan untuk Suara dan Akuntabilitas berasal dari Afrika Selatan, Brasil, Rusia, India, dan Cina, dan mencakup tahun 2014 hingga 2020. Variabel ini menggunakan unit indeks. Indeks ini berkisar dari -2,5 hingga 2,5, atau dari nilai indeks "lemah" hingga nilai indeks "kuat", dan memberikan skor keseluruhan suatu negara secara agregat. Jumlah kebebasan berekspresi di suatu negara sangat rendah ketika

Suara dan Akuntabilitas mendekati -2,5, sebaliknya, ketika Suara dan Akuntabilitas mendekati 2,5, negara lebih terbuka dan dapat menghormati kebebasan berpendapat yang memengaruhi pengambilan keputusan.

3.2.3 *Government Effectiveness*

Government Effectiveness adalah indikator yang mengukur kualitas pelayanan publik, sensitivitas tekanan politik, efektivitas pengembangan dan implementasi kebijakan, dan legitimasi kepatuhan pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Informasi untuk negara-negara Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan dari tahun 2014 hingga 2020. Variabel ini menggunakan unit indeks. Indeks ini berkisar dari -2,5 hingga 2,5, atau dari nilai indeks "lemah" hingga nilai indeks "kuat", dan memberikan skor keseluruhan suatu negara secara agregat. Efektivitas pemerintah di suatu negara sangat buruk ketika nilai *Government Effectiveness* mendekati -2,5; Namun, ketika nilai *Government Effectiveness* mendekati 2,5, negara tersebut memiliki kebijakan pemerintahan yang lebih efektif.

3.2.4 *Control of Corruption*

Control of Corruption adalah indikator dengan persepsi tentang sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk keuntungan pribadi, termasuk korupsi kecil dan besar, serta “penangkapan” negara oleh elit dan kepentingan pribadi. Data negara Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang dimulai tahun 2014-2020. Variabel ini menggunakan satuan indeks. Indeks ini memberikan peringkat kepada negara berdasarkan jumlah total indikator, mulai dari -2,5 hingga 2,5, atau -2,5 (lemah) hingga 2,5 (kuat). Semakin rendah nilai *Control of Corruption* atau mendekati -2.5 maka tingkat kontrol korupsi di suatu negara sangat rendah yang menunjukkan tingkat korupsi di suatu negara sangat tinggi, sebaliknya ketika nilai *Control of Corruption* mendekati 2.5 maka kontrol korupsi di suatu negara sangat tinggi yang menunjukkan tingkat korupsi di suatu negara sangat rendah sehingga dengan tingkat yang mendekati indeks sebesar 2.5 juga memperlihatkan kondisi *Governance* yang semakin baik.

3.2.5 Trade Openness

Keterbukaan perdagangan adalah implementasi perdagangan bebas global oleh negara-negara dengan ekonomi terbuka dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama global dan mempertahankan keadaan ekonomi dalam negeri. Bank Dunia mendefinisikan keterbukaan perdagangan sebagai rasio jumlah ekspor terhadap jumlah impor barang dan jasa sebagai bagian dari GDP, atau $[(\text{ekspor} + \text{impor} / \text{GDP})] \times 100\%$. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan keterbukaan perdagangan di situs web Bank Dunia, www.worldbank.org. Dari tahun 2014 hingga 2020, variabel ini dalam satuan persentase. Kinerja perdagangan suatu negara diukur dengan menggunakan keterbukaan perdagangan, dan hal ini diduga berdampak positif terhadap PDB, sehingga semakin tinggi nilai keterbukaan perdagangan maka semakin besar kontribusi PDB untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Marbun, 2018). Tingkat keterbukaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok: tingkat keterbukaan rendah, yang meliputi keterbukaan antara 0 hingga 50%, keterbukaan sedang, yang mencakup keterbukaan antara 50% hingga 100%, dan tingkat keterbukaan yang tinggi, yang mencakup keterbukaan di atas 100% (Nowbutsing, 2014).

3.3 Metode Analisis

Metode data panel digunakan dalam penelitian ini. Terdapat keuntungan dari penggunaan data panel. Terdapat beberapa keunggulan penggunaan metode data panel (Gujarati D. , 2004). Pertama, dengan adanya variabel khusus individu, data panel dapat secara eksplisit menjelaskan heterogenitas individu. Data panel kemudian dapat digunakan untuk menguji dan membuat model perilaku yang lebih baik sebagai hasil dari kemampuan untuk mengontrol heterogenitas individu. Kedua, menggunakan data panel akan secara dramatis mengurangi masalah variabel yang dihilangkan jika efek individu cukup terkait dengan variabel penjelas lainnya. Ketiga, metode data panel layak digunakan sebagai kajian penyesuaian dinamis karena didasarkan pada pengamatan *Cross Section (Time Series)* yang berulang. Keempat, sejumlah besar pengamatan berimplikasi pada data yang lebih berwawasan dan beragam, penurunan

kolinearitas lintas variabel, dan derajat kebebasan yang lebih besar, memungkinkan temuan estimasi yang lebih akurat.

3.4 Metode Estimasi Data Panel

Analisis regresi dengan data panel digunakan dalam penelitian ini. Francis Galton memperkenalkan untuk pertama kali istilah regresi (Gujarati, 2009). Tujuan analisis regresi adalah untuk memperkirakan dan/atau memprediksi rata-rata (populasi) atau nilai rata-rata dari sampel atau populasi dengan memeriksa hubungan antara satu variabel (variabel dependen) dan satu atau lebih faktor lain (variabel penjelas) menggunakan analisis regresi data panel.

$$Y = F(X_1, X_2, X_3, X_4) \quad (3.1)$$

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan variabel terikat di BRICS persamaan (3.1) ditransformasikan menjadi model regresi berganda panel:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 VA_{it} + \beta_2 GE_{it} + \beta_3 CC_{it} + \beta_4 TO_{it} + e_{it} \quad (3.2)$$

Keterangan:

- PE_{it} = Pertumbuhan Ekonomi di negara i pada periode t (Persen)
- VA_{it} = *Voice and Accountability* di negara i pada periode t (Indeks)
- GE_{it} = *Government Effectiveness* di negara i pada periode t (Indeks)
- CC_{it} = *Control of Corruption* di negara i pada periode t (Indeks)
- TO_{it} = *Trade Openness* di negara i pada periode t (Persen)
- β₀ = *Intercept*/Konstanta
- β₁, β₂, β₃ = Koefisien Regresi
- e_{it} = error term di negara i pada tahun t

3.5 Prosedur Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Untuk memahami karakteristik secara luas dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan analisis statistik deskriptif. Temuan pengukuran rata-rata (*mean*), maksimum, dan minimum untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel statistik deskriptif sebagai hasil analisis.

3.5.2 Metode Estimasi Regresi Data Panel

Tiga teknik perhitungan yang berbeda yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) yang biasanya digunakan dalam estimasi dengan data panel. Ketiga pendekatan tersebut secara signifikan berbeda satu sama lain.

3.5.2.1 Metode *Common Effect Model* (CEM)

Teknik estimasi yang hanya mengintegrasikan data lintas individu (*Cross-Section*) dan deret waktu atau *Time Series* ini merupakan tipe estimasi paling dasar dalam pengujian data panel (Widarjono, 2018). Persamaan model CEM Gujarati (2012) adalah sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \quad (3.3)$$

Keterangan:

| | |
|-------------------------|--|
| Y_{it} | : Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t |
| X_{1it} dan X_{2it} | : Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t |
| β_0 | : Konstanta (<i>Intercept</i>) |
| $\beta_{1,2}$ | : Koefisien regresi |
| e_{it} | : <i>Error term</i> individu ke-i dan waktu ke-t |

3.5.2.2 Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

Untuk kemiringannya tetap sama namun konstanta (*Intercep*) antar lintas individu adalah berbeda yang diasumsikan dalam metode ini (Gujarati D. , 2012). Teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan *Dummy Variable* untuk mengetahui adanya perbedaan intersep disebut teknik model *Fixed Effect* (Widarjono, 2018). *Dummy* berfungsi menangkap perbedaan intersep antar lintas individu. Menurut Gujarati (2012) *Metode Least Square Dummy Variables* (LSDV) lebih umum digunakan untuk menggambarkan persamaan model ini. Persamaan LSDV dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + \beta_4 D_{2it} + \beta_n D_{nit} + e_{it} \quad (3.4)$$

Keterangan:

| | |
|---------------------------|--|
| Y_{it} | : Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t |
| X_{1it} dan X_{2it} | : Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t |
| $D_1, D_2, D_3 \dots D_n$ | : 1 untuk lintas individu yang berpengaruh dan 0 |

untuk lintas individu yang tidak berpengaruh

| | |
|------------------------------------|--|
| β_0 | : Konstanta (<i>Intercept</i>) |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots$ | : Koefisien regresi |
| e_{it} | : <i>Error term</i> individu ke-i dan waktu ke-t |

3.5.2.3. Metode *Random Effect Model* (REM)

Hubungan antara lintas individu dan runtun waktu dengan menggunakan pendekatan variabel gangguan (*Error Term*) melalui metode *Random Effect Model* (REM) (Widarjono, 2018). Pendekatan ini sering mendeteksi perubahan antar individu dan antar waktu. Derajat kebebasan (*Degree of Freedom*) pada pemodelan sebelumnya yaitu *Fixed Effect Model* dengan penambahan *Dummy Variable* dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan yang pada gilirannya menurunkan efektivitas parameter yang dihitung. Untuk menyempurnakan model FEM, metode REM hadir dengan menggunakan variabel gangguan (*Error Term*) (Widarjono, 2018). Persamaan model ini sebagai berikut

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \quad (3.5)$$

Dalam hal ini β_{0i} tidak lagi tetap tetapi bersifat random dan diasumsikan sebagai variabel acak dengan nilai rata-rata β_0 . Nilai konstanta untuk masing-masing unit lintas individu (*Cross Section*) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\beta_{0i} = \bar{\beta}_0 + \mu_i \text{ dimana } i = 1, 2, \dots, n \quad (3.6)$$

Untuk $\bar{\beta}_0$ adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan intersep populasi dan μ_i adalah *Random Error Term* yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku secara individu. Dengan demikian persamaan *Random Effect Model* (REM) awal dapat dituliskan kembali menjadi:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_0 X_{1it} + \beta_0 X_{2it} + e_{it} + \mu_i$$

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_0 X_{1it} + \beta_0 X_{2it} + v_{it} \quad (3.7)$$

di mana,

$$v_{it} = e_{it} + \mu_i$$

Keterangan:

Y_{it} : Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t

$X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}$: Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t

| | |
|-----------------|--|
| β_0 | : Intersep |
| $\beta_{1,2,3}$ | : Koefisien slope |
| e_{it} | : <i>Error term</i> individu ke-i dan waktu ke-t |
| μ_i | : <i>Error term</i> individu |
| v_{it} | : $e_{it} + \mu_i$ |

3.5.3 Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Tiga metode yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), digunakan untuk mengestimasi data panel. Pemilihan model yang optimal untuk pengujian ini sangat diperlukan. Ada banyak pengujian untuk memilih metodologi estimasi data panel, menurut Widarjono (2018), adalah sebagai berikut.

3.5.3.1 Uji Chow atau Uji F

Uji Chow dilakukan untuk memilih pemodelan terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Adapun hipotesis dari pengujiannya sebagai berikut.

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$$H_a = \text{Fixed Effect Model}$$

Apabila F-hitung lebih besar ($>$) nilai F-tabel maka H_0 ditolak, artinya menerima H_a dan memiliki kesimpulan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Sebaliknya F-hitung lebih kecil ($<$) nilai F-tabel maka H_0 diterima, artinya gagal menerima H_a dan memiliki kesimpulan bahwa model yang paling tepat untuk digunakan adalah *Common Effect Model*. Atau dapat juga membandingkan nilai *P-value*. Apabila *P-value* $<$ dari taraf nyata (α) maka model *Fixed Effect* lebih tepat, namun apabila *P-value* $>$ dari taraf nyata (α) maka model *Common Effect Model* lebih tepat.

3.5.3.2 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM diperlukan untuk memilih yang tepat antara model CEM atau *Random Effect Model* (REM). Breusch-Pagan adalah tokoh yang mengembangkan uji ini. Metode ini didasarkan pada nilai residual dan metode OLS. Uji LM dapat

diketahui dengan melihat nilai distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sesuai jumlah variabel bebas. Hipotesis untuk model LM adalah sebagai berikut.

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$$H_a = \text{Random Effects Model}$$

Apabila nilai p-value ($<$) dari taraf nyata ($\alpha=5\%$) maka tolak hipotesis nol, dengan demikian estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *random effect* daripada metode OLS atau dapat juga jika nilai LM statistik kurang ($<$) dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis maka gagal tolak hipotesis nol, dengan demikian model yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

3.5.3.3 Uji Hausman

Hausman mengembangkan uji statistik untuk memilih antara model *fixed effect* atau *random effect*. Hipotesisnya adalah sebagai berikut.

$$H_0 = \text{Random Effect Model}$$

$$H_a = \text{Fixed Effect Model}$$

Ketentuannya adalah jika *Chi-Square* hitung lebih besar ($>$) dari nilai *Chi-Square* tabel maka H_0 ditolak, maka terima H_a dan model yang paling tepat digunakan yaitu *Fixed Effect Model*. Sebaliknya jika *Chi-Square* hitung kurang ($<$) dari nilai *Chi-Square* tabel maka H_0 diterima, maka gagal menerima H_a dan model yang paling tepat digunakan yaitu *Common Effect Model*. Selain itu juga dapat dilihat dari nilai P-value. Apabila P-value lebih besar ($>$) α yang berarti H_0 diterima dan jika p-value kurang ($<$) dari α maka H_0 ditolak.

3.5.4 Pengujian Asumsi Klasik

Estimator OLS optimal yang tersedia bergantung pada pemenuhan asumsi klasik. Persyaratan harus tidak bias, linier, dan memiliki varian rendah (BLUE, *Best Linear Unbiased Estimator*) karena ini sangat penting dalam analisis regresi. Widarjono (2018) menegaskan bahwa sejumlah uji, antara lain uji autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan normalitas, dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu model penduga mengikuti asumsi klasik atau tidak karena harus dipenuhi agar estimator OLS yang tersedia menjadi yang terbaik.

3.5.4.1 Uji Normalitas Residual

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai dalam model regresi yang efektif terdistribusi secara teratur. Residual dapat ditentukan terdistribusi secara teratur atau tidak dengan menggunakan dua metode: analisis grafis dan pengujian statistik. Pendekatan Jarque-Bera, yang menguji nilai probabilitas, dapat digunakan untuk melakukan uji normalitas. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ atau lebih besar dari $\alpha = 5\%$ atau besaran alfa yang digunakan. Pada metode ini juga dapat melihat hasil *Jarque – Bera Test* (J – B). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara Chi-tabel yang merupakan nilai signifikan yaitu sebesar 0.05 atau besar alfa yang digunakan dan df sebesar 2, dengan nilai Jarque-Bera (nilai Chi-statistik). Data biasanya tersebar normal jika nilai Jarque-Bera (Chi-Statistics) lebih rendah. Sebaliknya, data tidak terdistribusi secara normal jika nilai Jarque-Bera (Chi-Statistic) lebih tinggi. Dengan hipotesis yaitu:

H_0 : Residual terdistribusi normal

H_a : Residual tidak terdistribusi normal

3.5.4.2 Deteksi Multikolinieritas

Rahner Frish adalah tokoh yang menciptakan kata "multikolinieritas." Multikolinieritas regresi mengacu pada interaksi variabel bebasnya (Widarjono, 2018). Ada berbagai cara untuk mengidentifikasi multikolinieritas dalam suatu model, antara lain sebagai berikut: (1) Nilai R^2 tinggi, tetapi variabel independen yang signifikan hanya sedikit; (2) Variabel bebas berkorelasi parsial; (3) Regresi auxiliary; (4) Teknik identifikasi klien; dan (5) *Varians Inflation Factor* dan *Tolerance*. Data yang berkorelasi parsial antar variabel independen akan digunakan untuk mengidentifikasi masalah multikolinieritas dalam penelitian ini. Menurut aturan umum, masalah multikolinieritas dalam model terdeteksi jika koefisien korelasi di atas 0,85 yang dianggap cukup tinggi (Widarjono, 2018). Semakin rendah nilai koefisien korelasi maka model tidak terdapat masalah multikolinieritas.

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Ketika residual dari variabel yang digunakan dalam model tidak memiliki varians yang sama, ini disebut heteroskedastisitas. Suatu kondisi yang dikenal sebagai heteroskedastisitas menyebabkan varian meningkat dengan ukuran populasi atau ukuran sampel dan estimasi regresi menjadi bias. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan apakah residual pengamatan model regresi memiliki varians yang tidak merata. Jika varian residu antara satu pengamatan dan pengamatan berikutnya tidak berbeda, fenomena tersebut disebut sebagai homoskedastisitas; dan merupakan model regresi yang efektif. Ada banyak teknik untuk mengidentifikasi masalah heteroskedastisitas. Dalam menguji masalah heteroskedastisitas secara informal dapat dilihat melalui grafik. Jika grafik mengikuti pola tertentu misal linier berarti pada model tersebut terjadi heteroskedastisitas, begitupun sebaliknya.

Untuk menentukan apakah terdapat variasi dalam varian residu dari semua unit pengamatan dalam model regresi linier, tepatnya melihat masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Teknik uji *white* digunakan dalam penelitian ini. Teknik *White* dipandang lebih unggul daripada metode Breusch-Pagan karena tidak didasarkan pada kenormalan variabel gangguan. Menurut Widarjono (2018), teknik *white* telah berkembang menjadi metode yang tidak memerlukan anggapan adanya kenormalan pada variabel gangguan.

Adapun langkah dalam Metode *White* tepatnya *White* dengan *Cross Terms* sebagai berikut.

1. Melakukan estimasi pada persamaan 3.2 dengan metode panel yang dipilih dan mendapatkan residualnya (\widehat{e}_{it}).
2. Melakukan regresi pada persamaan berikut yang disebut Regresi *Auxiliary*: Regresi *Auxiliary* dengan perkalian antar variabel independen (*cross terms*) sebagai berikut:

$$\widehat{e}_{it}^2 = \alpha_0 + \alpha_1 VA_{it} + \alpha_2 GE_{it} + \alpha_3 CC_{it} + \alpha_4 TO_{it} + \alpha_5 VA_{it}^2 + \alpha_6 GE_{it}^2 + \alpha_7 CC_{it}^2 + \alpha_8 TO_{it}^2 + \alpha_9 VA_{it} \cdot GE_{it} + \alpha_{10} VA_{it} \cdot CC_{it} + \alpha_{11} VA_{it} \cdot TO_{it} + \alpha_{12} GE_{it} \cdot CC_{it} + \alpha_{13} CC_{it} \cdot TO_{it} + V_{it} \quad (3.8)$$

Untuk \widehat{e}_{it}^2 adalah residual kuadrat yang diperoleh dari persamaan 3.2 yang diestimasi dengan model data panel yang dipilih. Dari persamaan 3.8 diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2).

3. Dalam *Auxiliary Regression*, variabel independen tidak termasuk konstanta untuk melihat derajat kebebasan, sehingga uji *White* didasarkan pada jumlah sampel atau observasi (n) dikalikan dengan R^2 , yang akan mengikuti distribusi chi-kuadrat dengan derajat kebebasan yang ditetapkan. Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan nilai yang ditentukan statistik chi-kuadrat.

$$n \cdot R^2 \sim \chi^2_{df}$$

4. Apabila nilai chi-squares hitung yaitu $n \cdot R^2$ lebih besar dari nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayaan pada 0.05 maka ada heteroskedastisitas sebaliknya apabila chi-squares hitung lebih kecil dari nilai χ^2 kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

Berikut hipotesis yang digunakan:

H_0 : $\beta_i = 0$, homoskedastisitas (Tidak terdapat hubungan antar variabel independen dan residual).

H_a : paling tidak satu $\beta_i \neq 0$, heteroskedastisitas (terdapat hubungan antara variabel independen dan residual).

3.5.4.4 Uji Autokorelasi

Menurut Widarjono (2018), autokorelasi menggambarkan hubungan antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Data deret waktu seringkali memiliki masalah autokorelasi, namun data *cross section* juga dapat memiliki masalah autokorelasi. Uji Durbin Watson (DW), Uji Breusch-Godfrey (BG), atau Uji *Langrange Multiplier* (LM) dapat digunakan untuk menentukan apakah model memiliki masalah autokorelasi. Uji DW akan digunakan dalam investigasi ini. Berikut hipotesisnya.

H_0 : tidak terdapat autokorelasi

H_a : terdapat autokorelasi

Berikut ketentuan keputusan uji DW menurut Santoso (2019): terjadi autokorelasi positif bila nilai DW kurang dari -2, tidak ada autokorelasi bila nilai DW antara -2

dan +2, dan negatif autokorelasi ketika nilai DW lebih dari +2.

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah bagian utama dari pengujian ekonometrika. Selain digunakan untuk menilai kebenaran data, uji ini bermanfaat untuk dijadikan temuan penelitian. Ada tiga (tiga) jenis pengujian yang akan dilakukan saat menguji hipotesis yang akan dilakukan sebagai berikut.

3.5.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Dengan mengasumsikan bahwa semua variabel independen lainnya tetap konstan, uji t digunakan untuk menilai signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 2009). Uji signifikansi parameter individu pada tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan 95% serta $[df = (n-K)]$.

Dalam penelitian ini, uji-t adalah sebagai berikut.

a) *Voice and Accountability*

Ho (1) : $\beta_1 = 0$ *Voice and Accountability* diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020.

Ha (1) : $\beta_1 > 0$, *Voice and Accountability* diduga berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020 .

b) *Government Effectiveness*

Ho (2) : $\beta_2 = 0$ *Government Effectiveness* diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020.

Ha (2) : $\beta_2 > 0$ *Government Effectiveness* diduga berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020.

c) *Control of Corruption*

Ho (3) : $\beta_3 = 0$ *Control of Corruption* diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020.

Ha (3) : $\beta_3 > 0$ *Control of Corruption* diduga berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020.

d) *Trade Openness*

Ho (4) : $\beta_4 = 0$ *Trade Openness* diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020

Ha (4) : $\beta_4 > 0$ *Trade Openness* diduga berpengaruh positif signifikan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020.

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.05 dan dengan derajat kebebasan ($df = n-K$), dimana n adalah jumlah observasi dan K adalah jumlah parameter yang digunakan. Maka dapat dirumuskan kriterianya adalah apabila nilai t -hitung lebih besar ($>$) dari t -tabel maka gagal menerima H_0 , sebaliknya apabila nilai t -hitung lebih kecil ($<$) t -tabel maka berhasil menerima H_0 . Atau dapat melihat nilai probabilitas, apabila nilai probabilitas $> \alpha = 0.05$ maka menerima H_0 , sebaliknya jika nilai probabilitas < 0.05 maka menolak H_0 .

3.5.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk memastikan apakah setiap variabel independen secara serentak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka menurut Gujarati (2012), perlu dilakukan uji signifikansi simultan (uji F). Hipotesis dalam pengujian F-statistik, sebagai berikut.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ Semua variabel independen tidak berpengaruh secara serentak terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, setidaknya satu variabel independen berpengaruh secara serentak terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan ($df_1 = K-1$) dan ($df_2 = (n-K)$), dimana K adalah jumlah parameter yang digunakan dan n adalah jumlah observasi. Kriterianya apabila F -hitung lebih kecil ($<$) dibandingkan F tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya secara simultan variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya apabila F -hitung lebih besar ($>$) dibandingkan F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3.5.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya atau persentase total varians pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dinyatakan sebagai koefisien determinasi (R^2) (Gujarati D., 2009). Kisaran koefisien determinasi (R^2) adalah dari 0 sampai 1. Selain itu, jika R^2 sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dan terikat dan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dapat dikatakan bahwa pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen berkurang jika R^2 mendekati 0. Pada sisi lain, jika R^2 mendekati 1, ini menunjukkan pengaruh yang lebih besar dari faktor independen terhadap variabel dependen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Temuan hasil penelitian dalam analisis data dan pembahasan ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara parsial, menghasilkan bahwa *Voice and Accountability* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebebasan berpendapat melalui partisipasi politik yang ada dapat mendorong Penambahan Produk Domestik Bruto yang terus menerus menunjukkan adanya peningkatan pendapatan nasional yang artinya sebagai indikator yang menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Iklim demokrasi di Brazil bergerak cukup bagus sebagai negara demokrasi, negara ini pelan-pelan mulai mengurangi kekuasaan militer dalam politik dan berusaha memunculkan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis, dapat dilihat dalam pemilihan umum yang sah dan bebas, jaminan hak-hak individu, dan partisipasi masyarakat dalam perumusan perencanaan kebijakan yang tertuang dalam Konstitusi Brasil Baru. Rusia semenjak runtuhnya Uni Soviet, pemerintahan Rusia sudah mulai condong ke paham demokrasi sehingga Rusia memutuskan untuk berubah haluan menjadi negara Federal berpaham demokrasi republik dan sistem pemerintahan presidensial artinya kekuasaan pemerintah harus lebih mendengarkan aspirasi masyarakat meskipun bukanlah yang mudah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan keragaman etnik yang tinggi dan wilayah yang cukup luas. India adalah negara demokrasi terbesar di dunia, dan setiap Hari Republik India, pesta konstitusi diadakan sebagai cara untuk melihat capaian partisipasi masyarakat dan merayakan pencapaian pemerintah dengan kebijakan yang dibuat. Kebebasan berpendapat di Cina memang masih terbatas dibandingkan negara lainnya

di BRICS dengan sistem kepartaian yaitu satu partai tepatnya dikuasai oleh Partai Komunis Cina. Tetapi, sistem kepartaian yang ditetapkan sudah mulai disesuaikan secara relevan artinya untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan ilmiah oleh partai-partai yang berkuasa dan di berbagai tingkat pemerintahan, serta mencegah kekacauan politik dan disorganisasi yang disebabkan oleh perselisihan antar partai. Afrika Selatan telah mencapai kemajuan dalam mencapai kebebasan berbicara, yang ditunjukkan dengan penerapan sistem politik presidensial multipartai yang relatif demokratis dengan mengadakan pemilihan umum dan didukung dengan berakhirnya era *apartheid*.

2. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh efektivitas pemerintah, yang merupakan ukuran seberapa baik kinerja pemerintah dalam penelitian ini. Kompleksitas dan panjangnya birokrasi yang rumit dan bertele-tele akan mengakibatkan pengeluaran yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat. Brazil masih berupaya menghadapi masalah yang mendesak, khususnya dalam bentuk infrastruktur yang tidak memadai dan tingkat ketimpangan sosial yang tinggi, sangat terasa di bidang pendidikan. Begitu pula, kinerja pada bidang kebijakan yang dinilai Brazil masih tertinggal dalam hal proyek infrastruktur dan kebijakan industri. Situasi di Rusia terlihat masih tertinggal dalam hal pemerintahan pusat mengenai kapasitas perencanaan strategis, koordinasi antar kementerian yang kurang efektif dan kapasitas implementasi. Keefektifan pemerintah India dilihat masih kurang meskipun tingkat nasional dinilai memiliki kemampuan pengarahannya pemerintah pusat India secara positif. Pemerintah harus mampu mengatasi persoalan yang cukup besar seperti mengatasi kesenjangan sosial, memodernisasi infrastrukturnya, dan membuat kemajuan terutama sektor kesehatan dan pendidikan. Untuk Cina masih terus berupaya mengurangi risiko tertentu oleh tingginya tingkat ketidaksetaraan sosial, perkembangan demografis dan masalah lingkungan yang berkembang. Situasi pemerintah Afrika Selatan dinilai masih kurang menunjukkan peningkatan di bidang koordinasi antar kementerian yang

efektif, implementasi kebijakan dan kebijakan komunikasi seperti di bidang utama pendidikan dan kebijakan pasar tenaga kerja, Afrika Selatan masih menunjukkan kelemahan yang mencolok karena anggaran di tingkat sub nasional dan lokal kurang digunakan secara efektif.

3. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan *Control of Corruption* yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki kualitas institusi yang rendah maka korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya kualitas institusi dalam pengendalian korupsi membuat pemerintah lebih mengeluarkan aturan birokrasi dan *Control of Corruption* yang lebih ketat. Imbas dari adanya peningkatan pengendalian korupsi ini dapat mendorong pegawai pemerintah tepatnya pembuat kebijakan untuk bekerja lebih keras dalam upaya pemberantasan korupsi. Peradilan Brazil sangat terbebani dan birokratis yang menyebabkan proses panjang dan tumpukan kasus sehingga dianggap sistem peraturan pengendalian korupsi berjalan tidak efisien. Sistem peradilan memang ada tetapi terdapat indikasi korupsi dengan risiko yang tinggi karena peradilan secara formal sebagian besar independen tetapi kapasitas yang terbatas sehingga hakim rentan terhadap suap dan serta penyuapan yang kerap terjadi bagi perusahaan saat memperoleh layanan publik. Rusia merupakan negara otoriter yang dinilai pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal terlebih lagi pemerintah rusia telah melakukan penangkapan gerakan anti korupsi yang digerakkan oleh masyarakat Rusia sehingga cukup sulit untuk dimusnahkan. Keadaan korupsi di India terus merajalela yang disebabkan oleh kurangnya efektivitas manajemen dan organisasi seperti rendahnya pengontrolan dan pengawasan proses administrasi dan kesalahan penunjukkan pejabat publik yang tidak bertanggung jawab. Cina dinilai merupakan negara yang begitu berani dalam memberantas tindak korupsi terutama di kalangan pemerintah yang dibuktikan dengan hukuman mati yang terdapat dalam undang-undang Hukum Pidana Cina. Afrika Selatan memiliki permasalahan yang cukup mencolok dalam hal tingkat patronase, korupsi, dan nepotisme yang cukup

tinggi. Sebenarnya Afrika Selatan sudah memiliki sebuah unit investigasi terhadap kejahatan dan korupsi yang bernama Scorpions yang dibentuk tahun 2002 tetapi dihentikan.

4. Secara parsial, menghasilkan *Trade Openness* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara juga terjadi karena melalui keterbukaan perdagangan dengan adanya perdagangan internasional menyebabkan peningkatan produktivitas sumber daya ekonomi dalam negeri melalui transfer pengetahuan dan teknologi yang lebih mempermudah kegiatan perekonomian suatu negeri, hal ini akan mendorong pertumbuhan output yang meningkatkan pendapatan nasional suatu negara merupakan suatu tanda pertumbuhan ekonomi. Brazil dalam memasuki perdagangan dunia lebih memfokuskan strategi sektor pertanian. Strategi dalam sektor tersebut dilakukan dengan dua akses utama, yang pertama pemberian insentif besar bagi perusahaan agribisnis baik dalam ekspor seperti yang diterapkan pada sektor kedelai dan gandum. Akses yang kedua melalui pemberian insentif kepada perusahaan agribisnis dalam akuisisi perusahaan asing sebagai strategi dalam akses pasar luar negeri. Rusia adalah negara dengan sumber daya yang melimpah, terutama di industri pertambangan, minyak, dan gas, yang memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerjanya. BRICS menjadi salah satu alternatif Rusia dalam mengembangkan perdagangan internasional nya dengan pasar komoditi utamanya adalah Migas. Keanggotaan BRICS di India menguntungkan perekonomian India. Brazil dipandang lebih baik dalam impor dan ekspor perangkat lunak, sehingga India ingin bekerja sama dengannya untuk menjadikan negaranya pemain terkemuka dalam ekonomi politik dunia sekaligus menambah suntikan dana bagi pembangunan negaranya. Perdagangan antara Cina dengan negara-negara BRICS dinilai sangat saling melengkapi dan diduga dapat mempertahankan pertumbuhannya dengan kerja sama ekonomi melalui keterbukaan perdagangan semakin solid. Cina merupakan pengekspor produk mekanik dan elektronik dan padat karya terbesar dan negara lainnya sebagai pengimpor produk energi,

pertanian, dan biji logam. Keterlibatan Afrika Selatan dengan bergabung dengan BRICS dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan Afrika Selatan di masa depan. Bidang kebijakan ekonomi, perdagangan, investasi, pertanian, pertambangan, minyak, infrastruktur, kesehatan, penelitian, dan teknologi merupakan bidang kerja sama yang dijalankan dengan negara anggota BRICS.

5. Secara simultan, hasil perhitungan uji ini menghasilkan bahwa seluruh variabel bebas serentak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. *Voice and Accountability* berdasarkan hasil penelitian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara BRICS. Dalam hal ini pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan yang terus mendukung peningkatan *Voice and Accountability*. Supremasi hukum, serta mengadopsi penilaian yang mempertimbangkan kepentingan individu, tidak diragukan lagi akan membantu mengurangi guncangan politik seperti protes radikal dan ketegangan antar negara. Menjaga iklim politik yang relatif stabil juga membuat suatu negara dapat lebih efektif dalam menjalankan operasional negara. Pemerintah juga diharapkan memberi ruang aspirasi masyarakat yang lebih untuk mengembangkan ide dalam persepsi pembangunan dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Karena bagaimanapun, secara jangka panjang *Voice and Accountability* akan memberi efek preferensi dan meningkatkan inovasi masyarakat dalam kualitas kebijakan publik. Secara spesifik seperti pada Brazil harus benar-benar menerapkan kebijakan pemerintahan yang demokratis dan berusaha mengurangi kekuasaan militer sehingga masyarakat akan lebih berani bersuara baik terutama dalam perumusan kebijakan pembangunan yang menandai peningkatan partisipasi masyarakatnya. Rusia dengan berubah haluan menjadi negara berpaham demokrasi republik diharapkan dapat mulai

bangkit dan lebih menerapkan kebijakan dalam memperbaiki gejala dalam pemerintahan dengan keragaman etnik melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti asas pemerintahan yang terbuka, berstrategi untuk masa depan, pertanggungjawaban, dan sebagainya. India memang terkenal dengan negara yang demokratis namun demokratis tidak hanya ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang besar-besaran tetapi pemerintah India harus lebih berpikir terbuka mengenai kesenjangan sosial yang ada antar masyarakat melalui kebijakan yang lebih mengedepankan keterlibatan masyarakat agar keinginan ataupun keluhan yang ada merata bukan untuk golongan tertentu saja. Cina merupakan negara yang paling terbatas dalam mengemukakan pendapat karena demi sistem kepartaian tunggal sehingga suara dari masyarakat sulit untuk di dengar. Oleh karena itu, diharapkan Cina harus mulai menyesuaikan kebijakan yang ada dan berusaha lebih sedikit terbuka dengan masukan yang ada untuk mengurangi kegaduhan politik demi tercapainya pertumbuhan ekonomi. Afrika Selatan diharapkan agar lebih mempertahankan praktik demokratis yang ada terlebih lagi setelah tidak berlakunya lagi praktik perbedaan ras dalam negara ini. Namun, tetap harus melalui kebijakan pemerintah dengan strategi dan tujuan yang diperlukan baik melalui kebijakan untuk peningkatan pelayanan infrastruktur komunikasi, teknologi, dan edukasi sosial untuk mencegah perselisihan karena perbedaan antar ras yang mengurangi partisipasi masyarakat demi perekonomian yang lebih baik.

2. Untuk *Government Effectiveness* berdasarkan hasil penelitian dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi tetapi tidak signifikan maka dari itu pemerintah diharapkan agar lebih berupaya dalam melakukan efisiensi birokrasi tanpa harus memotong pengeluaran pemerintah yang terlalu banyak, agar permintaan agregat dari pengeluaran pemerintah tetap terjaga dan berimbang. Selain itu, pemerintah harus mampu memperkuat pengawasan dan penilaian terhadap para pekerja sipil tersebut, memaksimalkan efisiensi birokrasi, dan menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar di antara negara-negara yang tergabung. Agar lebih

berkonsentrasi pada tujuan yang ingin dicapai yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi negara anggota dan menjadi lebih bermanfaat bagi negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia. Secara spesifik seperti pada Brazil harus mampu memperbaiki birokrasi yang lemah karena kinerja kebijakan yang masih tertinggal dari negara lainnya. Kebijakan yang berorientasi pada reformasi birokrasi yang lebih kuat dan handal sangat diperlukan dalam hal memperbaiki kinerja pemenuhan barang publik dalam hal infrastruktur, pendidikan, maupun industri. Pemerintah Rusia harus berani untuk lebih keluar dari negara otoriter sehingga partisipasi publik dan para pakar lebih terdengar untuk perekonomian yang lebih baik. Rusia diharapkan menciptakan dan memperbaiki hubungan dan komunikasi yang lebih harmonis antara pemerintahan pusat, kementerian, dan daerah sehingga berbagai strategi pembangunan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. India mengenai keefektifan pemerintahannya masih rendah sehingga perlu diperbaiki, maksudnya perlu koordinasi dan konsultasi dalam setiap lapisan masyarakat yang lebih baik karena wilayah yang luas cukup sulit dilakukan. Pemerintah India harus mampu menempatkan urusan negara dengan urusan budaya atau adat istiadat dan memberikan edukasi perihal hal tersebut karena sistem perbedaan status sosial yang masih kental di India juga menyebabkan penyaluran kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat kerap tidak merata. Cina merupakan negara yang paling menonjol dalam efektifitas pemerintahannya karena srategi perencanaan jangka panjang dan koordinasi antar pemerintah yang lebih baik. Tetapi masih perlunya pembentukan kebijakan regional yang kuat untuk mengatasi perbedaan pelayanan pada masyarakat pinggiran. Untuk Afrika Selatan sangat diperlukan pembenahan birokrasi yang harus lebih meningkatkan pengaturan antar elemen yang tegas dan kuat, pembentukan kebijakan dalam mempererat koordinasi dan komunikasi antar lembaga sehingga alokasi anggaran dan implementasi kebijakan seperti penyaluran pendidikan lebih berjalan efisien karena penggunaan anggaran yang tepat.

3. Untuk *Control of Corruption* berdasarkan hasil penelitian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi tidak signifikan. Untuk itu, diharapkan bagi pemerintah dapat terus berupaya dalam pengendalian dari praktik korupsi yang dapat merugikan negara melalui sanksi yang berlaku. Meskipun dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan tetapi terdapat pengaruh positif yang diduga masih lemah sehingga perlunya peningkatan pengendalian korupsi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tindakan pengendalian korupsi yang lebih tegas dan transparan diperlukan jika publik, investor, dan/atau sektor swasta ingin sepenuhnya percaya pada kemampuan pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan menguntungkan. Pemerintah juga dapat menjalin kerja sama dengan lembaga anti korupsi di negara lain yang memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah, sehingga upaya-upaya yang berhasil diimplementasikan dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara dengan membangun karakter yang taat, jujur, dan gaya hidup sederhana seperti melalui lembaga pendidikan yang lebih berkualitas. Brazil harus mengeluarkan kebijakan internal seperti penguatan pada sistem peradilan dengan memberikan kapasitas yang lebih banyak sehingga kinerja hakim dapat diawasi. Brazil juga diharapkan membenahi proses birokratis panjang sehingga terjadi tumpukan kasus, seharusnya harus mampu mengeluarkan kebijakan melalui pembentukan aturan yang secara tegas dan kuat dengan meningkatkan efisiensi sistem hukum dan reformasi birokrasi serta sektor publik yang lebih terkontrol. Rusia terkenal dengan negara otoriter tetapi berkaitan dengan pengendalian korupsi dalam negara ini masih kurang maksimal sehingga pemerintah Rusia perlu menegakkan peraturan hukum yang berlaku yang tidak berat sebelah terutama pada aktor negara dan publik. Rusia harus melakukan reformasi sistem hukum pidana dan sistem keuangan negara yang lebih aman sehingga dapat memperkecil kesempatan yang ada. Pemerintah India perlu mengeluarkan kebijakan internal dalam mendukung efektivitas manajemen sehingga pengontrolan dan pengawasan proses administrasi dapat lebih baik. Wawasan mengenai bahaya korupsi perlu dilakukan

seperti pengadaan program pendidikan dalam pemberantasan korupsi sehingga kesadaran masyarakat untuk tidak menyuap di setiap proses administrasi maupun institusi politik akan tumbuh seiring dengan pemahaman mengenai bahaya yang timbul. Cina dinilai sudah baik dalam pemberantasan korupsi. Kebijakan birokrasi yang kuat dengan sanksi yang tegas berhasil menurunkan kasus korupsi di Cina. Kebijakan tegas tanpa pandang bulu yang diterapkan Cina dengan program pengendalian yang handal ke depannya harus tetap dipertahankan dan bisa memberikan contoh serta menjalin kerja sama dengan negara lainnya. Untuk Afrika Selatan diketahui patronase, korupsi, dan nepotisme yang cukup tinggi. Afrika Selatan harus memantau dan mengevaluasi kebijakan yang ada. Perlunya pembentukan lembaga yang kuat dan independen sehingga terbebas dari intervensi pihak lain dan kebijakan pengendalian seperti pengontrolan pada kinerja lembaga khususnya sektor publik yang ketat. Pemerintah juga harus berupaya menjalin kerja sama dan belajar dengan negara BRICS untuk memberantas korupsi.

4. Untuk *Trade Openness* berdasarkan hasil penelitian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lima negara BRICS. Untuk mengoptimalkan produktivitas dan memungkinkan masyarakat dan swasta bersaing dengan bangsa lain, pemerintah dituntut untuk mampu menyediakan dan meningkatkan fasilitas yang diperlukan. Dalam hal perdagangan dan inovasi teknis, negara-negara BRICS tentunya memiliki banyak keuntungan dan peluang, tetapi ada kekhawatiran bagi negara anggota yang memang pertumbuhannya jauh dari negara Cina untuk mampu bersaing dalam pasar ekspor maupun investasi yang ada sehingga dimungkinkan Bank Pembangunan BRICS akan menggulirkan pinjaman sebagai investasi besar-besaran kepada negara anggota lainnya. Hal ini bisa berdampak positif maupun negatif bagi negara anggota sesuai bagaimana setiap negara menyikapinya dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mendukung kebijakan yang lebih tepat pada perubahan struktural yang berfokus pada peningkatan produktivitas berbagai sektor demi menghadapi peluang dan tantangan

masing-masing negara. Secara spesifik seperti pada Brazil mengenai keterbukaan perdagangan harus lebih berfokus pada kebijakan spesialisasi pada sektor pertanian baik dengan meningkatkan ekspor dan penerapan strategi insentif perusahaan agribisnis dan mendukung akuisisi perusahaan asing untuk lingkup pasar yang lebih luas. Pemerintah Rusia harus mampu memfokuskan diri pada pemanfaatan potensi pada sumber daya yang melimpah, terutama di industri pertambangan, minyak, dan gas, yang memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerjanya. Penerapan strategi kerja sama yang solid yang menguntungkan untuk menciptakan produksi yang lebih efisien. India memiliki potensi sumber daya manusia yang melimpah terlebih lagi perkembangan teknologi yang baik. Oleh karena itu, India harus mampu memanfaatkan kerja sama yang terjalin untuk kekuatan perekonomian sehingga harus lebih menerapkan dan mendukung kebijakan integrasi internasional terutama untuk sektor keuangan dalam mendukung penerapan teknologi dan infrastruktur yang lebih modern. Kebijakan pemerintah Cina secara global tidak diragukan lagi. Cina merupakan pengekspor produk mekanik dan elektronik dan padat karya terbesar dari negara lainnya, terbukti pertumbuhannya secara rata-rata dalam penelitian ini yang paling tinggi. Capaian Cina yang lebih mendominasi dari negara lainnya harus lebih terkontrol dan mampu memberikan manfaat bagi negara lainnya mengingat bukanlah yang mudah untuk menyamakan capaian perekonomian setiap negara sehingga perlunya dukungan pada peningkatan produktivitas dan perubahan struktural yang baik. Afrika Selatan diharapkan harus terus mendukung kebijakan peningkatan hubungan antar negara anggota. Untuk meningkatkan perekonomian, Afrika Selatan harus memanfaatkan peluang yang ada dengan akses pasar yang luas dalam peningkatan ekspor sektor perdagangan, investasi, pertanian, pertambangan, minyak, infrastruktur, kesehatan, penelitian, dan teknologi demi pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pengakuan di mata dunia.

5. Studi selanjutnya diharapkan lebih berkonsentrasi pada berbagai indikator tata kelola yang baik sehingga sudut pandang yang berbeda dapat disajikan

yaitu mengenai pengaruh *Good Governance* terhadap pertumbuhan ekonomi semakin beragam. Tidak hanya itu, untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor lain dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka sangat diharapkan menambah selain variabel-variabel ekonomi yang diteliti dalam penelitian ini, pada akhirnya akan membantu untuk mensinergikan berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi untuk lebih dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduraxmonovich, O. (2003). Economic Cooperation Between India and Central Asian Republics with Special Reference to Uzbekistan. *RIS Discussion Papers*, 8–9.
- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2004). *Institutions As The Fundamental Cause Of Long-Run Growth*. North Holland. <https://doi.org/10.3386/W10481>
- Adams, R. H. J. (2000). *The Politics Of Economic Policy Reforms In Developing Countries*. <https://documents.worldbank.org/En/Publication/Documents-Reports/Documentdetail/167161468766226964/The-Politics-Of-Economic-Policy-Reform-In-Developing-Countries>
- Adzima, K., & Baita, K. (2019). *The Impact Of Governance On Economic Growth: An Empirical Assessment In Sub-Saharan Africa*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3470607
- Agoes, S. (2004). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik (Kedua)*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. https://dl.scrib.com/download/Auditing-Sukrisno-Agoespdf_59fd24c1e2b6f56c598c39c8_Pdf
- Aida, N., Afif, F. Y., & Peni, T. S. (2021). Krisis Global Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 46–55. <https://doi.org/10.23960/Jep.V10i1.214>
- Aidt, T., Dutta, J., & Sena, V. (2008). Governance Regimes, Corruption And Growth: Theory And Evidence. *Journal Of Comparative Economics*, 36(2), 195–220. <https://doi.org/10.1016/J.Jce.2007.11.004>
- Amadeo, K. (2019). *US Economy: Monetary Policy*. <https://www.thebalance.com/bretton-woods%02system-and-1944-agreement-3306133>
- Amir. (2000). *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. PPM Jakarta.
- Alam, K. J., & Sumon, K. K. (2020). Causal Relationship Between Trade Openness And Economic Growth: A Panel Data Analysis Of Asian Countries. *International Journal Of Economics And Financial Issues*, 10(1). <https://doi.org/10.32479/Ijefi.8657>
- Alam, M. R., Kitenge, E., & Bedane, B. (2017). Government Effectiveness And Economic Growth. *Economics Bulletin*, 37(1), 222–227.
- Amrani, H. (2016). Upaya Pemberantasan Korupsi dengan Rezim Anti-Money Laundering: Perspektif Internasional. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(2), 157–

174. <https://doi.org/10.25105/prio.v4i2.382>
- Annur Pratama, M. A. (2019). *Pengaruh Good Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara Di ASEAN Tahun 2007-2017* [Universitas Islam Indonesia].
<https://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/18377/15313078.Pdf>
- Assidiq, T. (2019). *Pembuktian Teori Heckscher-Ohlin Dalam Ekspor Indonesia Tahun 1986- 2017* [Universitas Negeri Yogyakarta].
<http://Eprints.Uny.Ac.Id/Id/Eprint/63248>
- Ata, A., & Arvas, M. (2011). Determinants Of Economic Corruption: A Cross-Country Data Analysis. *International Journal Of Business And Social Science*.
<https://Www.Semanticscholar.Org/Paper/Determinants-Of- Economic-Corruption%3a-A-Data-Ata-Arvas/50982b7773d5d1a84c9efafc4191abd6edcbe058>
- Bastian, I. (2016). *Strategi Manajemen Sektor Publik*. Salemba Empat.
<https://Penerbitsalemba.Com/Buku/02-0306-Strategi-Manajemen-Sektor-Publik>
- Bayar, Y. (2016). Public Governance And Economic Growth In The Transitional Economies Of The European Union. *Transylvanian Review Of Administrative Sciences*, 48, 5–18.
https://Www.Researchgate.Net/Publication/305430607_Public_Governance_And_Economic_Growth_In_The_Transitional_Economies_Of_The_European_Union
- Boediono. (1997). *Ekonomi Internasional ; Pengantar Ilmu Ekonomi No.3* (1st Ed.). BPF. <https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.Asp?Id=478869>
- BRICS. (2013). *Home : South Africa's Role In BRICS, And Its Benefits To Job Creation And The Infrastructure Drive In South Africa*.
<http://Brics.Utoronto.Ca/Docs/120911-Nkoana-Mashabane.Html>
- BRICS. (2015). *BRICS : History Of BRICS*.
<http://Infobrics.Org/Page/National-Rubrics/%0D>
- Camioto, F. De C., & Pulita, A. C. (2022). Efficiency Evaluation Of Sustainable Development In BRICS And G7 Countries: A Data Envelopment Analysis Approach. *Gestão & Produção*, 29.
<https://Doi.Org/10.1590/1806-9649-2022v29e022>
- Case, K. E., & Fair, R. C. (2007). *Principles Of Economics*. Pearson Education International.
- Chow, P. C. Y. (1987). Causality Between Export Growth And Industrial Development. *Journal Of Development Economics*, 26(1), 55–63.
[https://Doi.Org/10.1016/0304-3878\(87\)90051-4](https://Doi.Org/10.1016/0304-3878(87)90051-4)
- Daemmrch, A., & Musacchio, A. (2011). Brazil: Leading The Brics? *Harvard Business School*, 24. <https://Hbsp.Harvard.Edu/Product/711024-HCB-ENG>
- Delly, T. R., & Pahlawan, I. (2016). Kepentingan Ekonomi Politik India dalam Membentuk Kerja Sama BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa). *JOM FISIP*, 3(1).
<https://www.neliti.com/publications/33148/kepentingan-ekonomi-politik-india-dalam-membnetuk-kerjasam-brics-brazil-rusia-in>

- Demarani, F. (2018). The Effect Of Government Governance And Tax Ratio To Economic Growth (Case Study In Asean Countries). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 195–222. [Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=1459626&Val=17700&Title=1 The Effect Of Government Governance And Tax Ratio To Economic Growth Case Study In Asean Countries](http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=1459626&Val=17700&Title=1%20The%20Effect%20Of%20Government%20Governance%20And%20Tax%20Ratio%20To%20Economic%20Growth%20Case%20Study%20In%20Asean%20Countries)
- Dewi, P. K., & Triaryati, N. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 4(4), 866–878. [Https://Repositori.Unud.Ac.Id/Protected/Storage/Upload/Repositori/5bbfca6878508939f9951d921414d457.Pdf](https://Repositori.Unud.Ac.Id/Protected/Storage/Upload/Repositori/5bbfca6878508939f9951d921414d457.Pdf)
- Emara, Noha, Chiu, I.-M. (2016). Governance And Economic Growth: The Case Of Middle Eastern And North African Countries. *Journal Of Development And Economic Policies*, 16(1), 47–71. [Https://Papers.Ssrn.Com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_Id=3810284](https://Papers.Ssrn.Com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_Id=3810284)
- Fachrunnisa, Z. H. (2017). *Analisis Skandal "Operasi Cuci Mobil (Petrobras)*. Academia.Edu. https://www.academia.edu/34200101/KASUS_PETROBRAS.pdf
- Fajarlie, N. I. (2022). Mengenal Forum Internasional BRICS, Awalnya Dibuat Oleh 4 Negara, Kini Banyak Yang Ingin Bergabung. *Kompas TV*, 1–2. [Https://Www.Kompas.Tv/Article/321083/Mengenal-Forum-Internasional-Brics-Awalnya-Dibuat-Oleh-4-Negara-Kini-Banyak-Yang-Ingin-Bergabung](https://Www.Kompas.Tv/Article/321083/Mengenal-Forum-Internasional-Brics-Awalnya-Dibuat-Oleh-4-Negara-Kini-Banyak-Yang-Ingin-Bergabung)
- Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does Trade Cause Growth? *American Economic Review*, 89(3), 379–399. [Https://Doi.Org/10.1257/Aer.89.3.379](https://Doi.Org/10.1257/Aer.89.3.379)
- GAN Integrity. (2020). *Laporan Risiko Korupsi Brazil*. Ganintegrity, Com. <https://ganintegrity-com.translate.google.com/country-profile/brazil/?xtrsl=en&xtrtl=id&xtrhl=id&xtrpto=tc>
- Gani, A. (2011). Governance And Growth In Developing Countries. *Journal Of Economic Issues*, 45(1), 19–40. [Https://Doi.Org/10.2753/JEI0021-3624450102](https://Doi.Org/10.2753/JEI0021-3624450102)
- García, A. (2014). The Role Of China And The Brics Project. *Mexican Law Review*, 7(1), 109–136. [Https://Doi.Org/10.1016/S1870-0578\(16\)30010-5](https://Doi.Org/10.1016/S1870-0578(16)30010-5)
- Gaol, M. L., & Sasana, H. (2016). *Pengaruh Good Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di ASEAN* [Universitas Diponegoro]. [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/49802/1/03_GAOL.Pdf](http://Eprints.Undip.Ac.Id/49802/1/03_GAOL.Pdf)
- Glass, L.-M., & Newig, J. (2019). Governance for achieving the Sustainable Development Goals: How important are participation, policy coherence, reflexivity, adaptation and democratic institutions? *Earth System Governance*, 2, 100031. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2019.100031>
- Greenpeace. (2015). *How loggers are destroying the Amazon and Getting Away With It*. <https://human-wrongs-watch.net/2015/06/12/how-loggers-are-destroying-the-amazon-and-getting-away-with-tt/>
- Griffith-Jones, S. (2014). A BRICS Development Bank : A Dream Coming True ? *UNCTAD Discussion Papers*, 215. [Https://Unctad.Org/System/Files/Official](https://Unctad.Org/System/Files/Official)

- Document/Osgdp20141_En.Pdf
- Guardian, T. (2017). *Brazil's Corruption Scandal Spreads Across South America*. https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.theguardian.com/world/2017/feb/11/brazils-corruption-scandal-spreads-across-south-america#q331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=16785592584762&referrer=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2017%2Ffeb%2F11%2Fbrazils-corruption-scandal-spreads-across-south-america
- Gujarati, D. (2004). *Basic Econometrics, Fourth Edition*. (4th Ed.). Tata Mcgraw Hill. https://www.academia.edu/28885949/Damodar_N_Gujarati_Economics_Basic_Econometrics_2004_5bmcgraw_Hill_5d
- Gujarati, D. (2009). *Basic Econometrics (Noelle Fox (Ed.); 5th Edition)* (5th Ed.). Mcgraw-Hill Irwin. https://openlibrary.org/books/OL17075482M/Basic_Econometrics
- Gujarati, D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1 Dan 2* (5th Ed.). Salemba Empat.
- Guo, B. (2020). A Partocracy with Chinese Characteristics: Governance System Reform under Xi Jinping. *Journal of Contemporary China*, 29(126), 809–823. <https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1744374>
- Haggard, S., & Tiede, L. (2011). The Rule Of Law And Economic Growth: Where Are We? *World Development*, 39(5), 673–685. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.10.007>
- Hartmann, C., Jan Hofmeyr, J., & Schmidt, S. (2011). *Country Report South Africa. Sustainable Governance In The BRICS. Sustainable Governance Indicators*. https://www.sgi-network.org/BRICS/PDF/Country_Report_South_Africa.Pdf
- Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What You Export Matters. *Journal Of Economic Growth*, 12(1), 1–25. <https://doi.org/10.1007/s10887-006-9009-4>
- Hendrawan, A., Atmojo, B. T., & Pratama, W. R. (2020). Demokrasi Brazil: Bagaimana Brazil Melewati Fase Transisi dan Konsolidasi Demokrasi? *Insignia: Journal of International Relations*, 7(2), 122. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2020.7.2.2584>
- Hendry. (2016). *Konstanta Negatif, Bagaimana?* Teorionline. <https://teorionline.wordpress.com/2014/06/24/konstanta-intercept-negatif-bagaimana/>
- Hidayah, S. N., Sarfiah., S. N., & D, R. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Di Negara ASEAN-10 Pasca Mea Analysys The Effect Of International Trade And FDI On*. <https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-PENGARUH-TRADE-DAN-FDI-TERHADAP-EKONOMI-DI-Hidayah-Sarfiah/301e2c4fbfd81001ea23c40f7123b7fb348af71b>
- Huang, L.-C., & Chang, S.-H. (2014). Revisit The Nexus Of Trade Openness And GDP Growth: Does The Financial System Matter? *The Journal Of International Trade & Economic Development*, 23(7), 1038–1058. <https://doi.org/10.1080/09638199.2013.830638>
- Huynh, K. P., & Jacho-Chávez, D. T. (2009). Growth and governance: A

- nonparametric analysis. *Journal of Comparative Economics*, 37(1), 121-143. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2008.08.003>
- IMF. (2020). *World Economic Outlook, A Long And Difficult Ascent*. <https://www.imf.org/En/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/World-Economic-Outlook-October-2020>
- Ibrahim, N. El. (2010). *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*. PT Balai Pustaka.
- Indra, P. A. N. (2016). *Resep Membasmi Korupsi Ala India*. Tirto.Id. <https://tirto.id/resep-membasmi-korupsi-ala-india-b4Y3>
- Ismanthono, H. (2010). *Kamus Istilah Ekonomi Dan Bisnis*. Buku Kompas.
- Iyoha, M., & Okim, A. (2017). The Impact Of Trade On Economic Growth In ECOWAS Countries: Evidence From Panel Data. *CBN Journal Of Applied Statistics*, 8(1), 23–49.
- Joeriben, B., & Steinhilber, J. (2008). *Die Fantastischen Vier Und Die Groven Sleben. Schwellenlander In Der Globalen Okonomie*. Sao Paulo: Friedrich Ebert Stiftung.
- John, L. (2012). Engaging BRICS: Challenges And Opportunities For Civil Society. *Oxfam India*. <https://policy-practice.oxfam.org/resources/engaging-brics-challenges-and-opportunities-for-civil-society-346589/>
- Kaka, Y. (2018). *Berantas Korupsi: Belajarlah dari China*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/yulius-kaka/berantas-korupsi-belajarlah-dari-china>
- Karina, E. N., & Winanti, P. S. (2014). *Strategi Brazil dalam Membangun Sektor Pertaniannya di Tengah Rezim Perdagangan Bebas* [Universitas Gadjah Mada]. <https://www.semanticscholar.org/paper/Strategi-Brazil-dalam-Membangun-Sektor-Pertaniannya-Karina-Winanti/45e367ef685eebd65eacd06383d528813cf3539a>
- Karras, G. (2003). Trade Openness And Economic Growth Can We Estimate The Precise Effect? *Econometrics And International Development*, 3(1). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1225622
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology And Analytical Issues. *Draft Policy Research Working Paper: The World Bank*. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents>
- Kaufmann, K. A. (2010). *Worldwide Governance Indicators Methodology And Analytical Issues*. The World Bank, <https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents>
- Kaufmann, Kraay, & Lobaton. (2011). *Good Governance And Human Development*. World Bank. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents>
- KBRI. (2018). *Profil Negara dan Kerja Sama*. Kemlu.Go.Id. <https://kemlu.go.id/brasilia/id/read/brazil/1397/etc-menu>
- KBRI Afrika Selatan. (2019). *Afrika Selatan*. Kemlu.Go.Id. <https://kemlu.go.id/pretoria/id/read/afrika-selatan/2557/etc-menu>
- KBRI New Delhi. (2018). *Country Profile India*. Kemlu.Go.Id. <https://kemlu.go.id/newdelhi/en/read/country-profile-india/2228/etc-menu>
- Khalid, Masoud, A. (2016). The Impact Of Trade Openness On Economic Growth In The Case Of Turkey. *Turki: Research Journal Of Finance And*

- Accounting. *Journal Of Finance And Accounting*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/The-Impact-Of-Trade-Openness-On-Economic-Growth-In-Khalid/703568283c491571cd0e3f13dd466cb03993ce0e>
- Khan, R. E. A., & Naeem, H. M. (2020). Corruption, Income Inequality and Human Resource Development in Developing Economies. *Asian Journal of Economic Modelling*, 8(4), 248–259.
<https://doi.org/10.18488/journal.8.2020.84.248.259>
- Khoiri, A. M. (2020). *Mengenal Pesta Konstitusi Terbesar di India*. Travel.Detik.Com. <https://travel.detik.com/international-destination/d-4874085/mengenal-pesta-konstitusi-terbesar-di-india>
- Kjøer, M., & Kinnerup, K. (2002). Good Governance: How Does It Relate to Human Rights? In *Human Rights and Good Governance* (pp. 1–18). The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.
https://doi.org/10.1163/9789004479357_003
- Kusrorong, R. P. B. (2016). *Analisis Keterlibatan Cina dalam BRICS terhadap Pergeseran Poros Ekonomi Politik Global* [Universitas Airlangga]. <https://123dok.com/document/y60dorgy-analisis-kerterlibatan-brics-pergeseran-poros-ekonomi-politik-global.html>
- LAN & BPKP. (2000). *Akuntabilitas Dan Good Governance, Modul 1 Dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Penerbit LAN. <https://www.semanticscholar.org/paper/Akuntabilitas-Dan-Good-Governance%2C-Modul-1-Dari-5-Negara-Pembangunan/Aaf5a1768a4b3fe462384f61a8e4ab9d5272d4d5>
- Larionova, M., & Shelepov, A. (2019). The G20 and BRICS: Engaging with international institutions for global governance. *South African Journal of International Affairs*, 26(4), 643–661.
<https://doi.org/10.1080/10220461.2019.1694065>
- Lisbet. (2013). Keberadaan Brics Dan Implikasinya Bagi Indonesia. *Info Singkat*. <https://sdip.dpr.go.id/search/detail/618>
- Liu, J., Tang, J., Zhou, B., & Liang, Z. (2018). The Effect Of Governance Quality On Economic Growth: Based On China's Provincial Panel Data. *Economies*, 6(4), 1–23. <https://doi.org/10.3390/Economies6040056>
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. <https://www.goodreads.com/book/show/6365836-Manajemen-Kinerja-Sektor-Publik>
- Mahriun, Dwi., & Dewi Zaini, P. (2020). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan , Penerimaan Pajak Dan Ekspor*. 2(September), 25–30.
- Mangkoesobroto, Guritno. (2001). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPF. E.
- Marbun, E. (2018). *Pengaruh Trade Openness, Foreign Direct Investment, Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Gross Domestic Product (GDP) Indonesia Tahun 1980-2016* [Universitas Lampung]. <https://fdocuments.in/document/pengaruh-trade-oppnessforeign-direct-tanpa-bab-pembahasanpdf-pengaruh-trade.html?page=2>
- Marselina. (2021). *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Suatu Tinjauan*.
- Maulina, N. (2019). *Analisis Pengaruh Keterbukaan Perdagangan, Penanaman Modal Asing, Inflasi, Dan Populasi Terhadap*

- Produk Domestik Bruto Negara Anggota ASEAN Periode 2008-2017*. Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents, L.
- Mazenda, A., & Cheteni, P. (2021). Governance and economic welfare: A BRICS panel analysis. *Journal of Governance and Regulation*, 10(2, special issue), 290–299. <https://doi.org/10.22495/jgrv10i2siart9>
- Mercan, M., & Göçer, İ. (2013). *The Effect Of Financial Development On Economic Growth In Bric-T Countries: Panel Data Analysis*. *Journal Of Economic And Social Studies*, 3(1), 199–218. <https://doi.org/10.14706/Jecoss11318>
- Mo, P. (2001). Corruption And Economic Growth. *Journal Of Comparative Economics*.
- Mohan, R. (2007). *A Panel Data Analysis Of Fdi, Trade Openness, And Liberalization On Economic Growth Of The ASEAN-5*. *The Empirical Economics Letters*, 6(January), 35–44.
- Muttaqien, A. (2012). *Good Governance: Indonesia dan BRIC*. Aripmuttaqien.Com. <http://aripmuttaqien.com/good-governance-indonesia-dan-bric/>
- Muzakir, Y Bagio., & R. N. (2019). *Analisis Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Asean Tahun 2007 – 2017)*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 20. <https://doi.org/10.14710/Jdep.2.2.20-35>
- Naidoo, S. (2012). *South Africa's presence 'drags down Brics.'* Mail & Guardian Online. <https://mg.co.za/article/2012-03-23-sa-presence-drags-down-brics>
- Natsir, M. (2013). *Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nguyen, C. P., Su, T. D., & Nguyen, T. V. H. (2018). *Institutional Quality And Economic Growth: The Case Of Emerging Economies*. *Theoretical Economics Letters*, 08(11), 1943–1956. <https://doi.org/10.4236/Tel.2018.811127>
- Nordiansyah, E. (2014). *Dampak Bergabungnya Afrika Selatan ke BRICS terhadap Pertumbuhan Ekonomi Afrika Selatan (2011-2013)* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/27241>
- North, D. (1990). *Institutions And Transaction-Cost Theory Of Exchange*. Dalam James E. Alt And Kenneth A. Shepsle. *Perspectives On Positive Political Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nowbutsing, B. M. (2014). The Impact of Openness on Economic Growth: Case of Indian Ocean Rim Countries. *Journal of Economics and Development Studies*, 2(2), 407–427.
- O'Neill, J. (2007). *Brics And Beyond*. Goldman Sachs Global Economics Group. https://www.academia.edu/26377317/BRICS_AND_BEYOND_BRICS
- O'Neil, J. (2011). *The Growth Map. Economic Opportunity In The Brics And Beyond*. London/New York.
- Onnelly, E. (2018). *Bussines : China's Brics-Plus Partnership Could Transform Global Trade*. *Independent.Ie*. <https://www.independent.ie/business/world/chinas%20bricsplus-partnership-could-transform-global-trade%0236626312.html>

- Oropeza García, A. (2014). The Role Of China And The Brics Project. *Mexican Law Review*, 7(1), 109–136. [https://doi.org/10.1016/S1870-0578\(16\)30010-5](https://doi.org/10.1016/S1870-0578(16)30010-5)
- Palamani, S. M., & Pakpahan, S. (2018). Kepentingan Ekonomi Politik Rusia dalam Kerja Sama Internasional BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa). *JOM FISIP*, 5(1). <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/18743>
- Patra, M. D. (2021). *Growth And Development In The BRICS Economies*. <https://www.bis.org/review/R211128h.htm>
- Pejovich, S. (1995). *Economic Analysis Of Institutions And Systems*. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
- Pere, E. (2015). The Impact Of Good Governance In The Economic Development Of Western Balkan Countries. *European Journal Of Government And Economics*.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (1998). Governance Without Government? <https://doi.org/10.2139/ssrn.2443652>
- Rethinking Public Administration. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 8(2), 223–243. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024379>
- Puspitasari, D. M. (2011). Kepentingan "BRIC" Mendorong Afrika Selatan Berdagang Dalam Blok Kekuatan Ekonomi Baru Dunia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Priangani, A. (2015). *Perkembangan Brics (Brazil, Russia, India, China And South*
- Radulescu, I. G., Panait, M., & Voica, C. (2014). BRICS Countries Challenge to the World Economy New Trends. *Procedia Economics and Finance*.
- Radzeviča, Anna, Marija; & Bulderberga, Krista. (2018). *The Role Of Institutional Quality In Economic Growth: Implications For The Baltic States*. Riga: Sse Riga.
- Rani, A., & Kauro, A. (2018). Trade Openness Driver Of Economic Growth In BRICS Nations. *Journal Of International Economics*.
- Romer, P. (1990). Endogenous Technical Change. *Journal Of Political Economy*. *The Journal Of Political Economy Is Currently Published By The University Of Chicago Press*, 98(5), 71–102. https://web.stanford.edu/~klenow/romer_1990.pdf
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns And Long-Run Growth. *Journal Of Political Economy*, 94(5), 1002–1037. <https://doi.org/10.1086/261420>
- Rosa, S. D. (2017). Bussines : What Is Brazil's Agricultural Influence In BRICS 2017? *Focus Communication Public Relations*.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2022). *Public Administration' Understanding Management, Politics, And Law In The Public Sector* (9th Ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003198116>
- Samarasinghe, T. (2018). *Impact Of Governance On Economic Growth*. Mpra (Munich Personal Repec Archive), 89834, 1–50. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/89834/>
- Santoso, S. (2019). *Mahir Statistik Parametik*. PT Elex Media Komputindo.
- Saskara, I. (2017). *Mengenal Ekonomi Kelembagaan*. Denpasar.

- Singh, S. P., & Dube, M. (2014). BRICS And The World Order: A Beginner's Guide. *SSRN Electronic Journal*.
- Septiantoro, A. A., Hasanah, H., Alexandi, M. F., & Nugraheni, S. R. (2020). Apakah Kualitas Institusi Berpengaruh Pada Arus Masuk FDI Di ASEAN? . *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*.
- Shameem, C., & Jayaprasad, K. (2020). The Evolution Of BRICS In International Political Economy. *American Review Of Political Economy*.
- Shayanewako, V. B. (2018). The Relationship Between Trade Openness And Economic Growth: The Case Of BRICS Countries. *Journal Of Global Economics*.
- Silberberger, M. (2015). Regulation, Trade And Economic Growth. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2635507>
- Singh, B. P. (2022). Does Governance Matter? Evidence from BRICS. *Global Business Review*, 23(2), 408–425. <https://doi.org/10.1177/0972150919861222>
- Sotero, P. (2009). Emerging Powers: India, Brazil, and the Future of South-South Cooperation. *Woodrow Wilson Internasional Center for Scholars, Washington*, 4.
- Stiftung, B. (2013). *Governance Capacities in the BRICS*. Sustainable Governance Indicators. https://www.sgi-network.org/docs/studies/Governance_Capacities_in_the_BRICS.pdf
- Stoker, G. (1998). Governance As Theory: Five Propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17–28. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106>
- Streltsov, E. S., Rozhin, A. A., Vosiev, S. S., & Kosnikov, S. N. (2021). The economic potential of the brics countries as a challenge to modern world realities. *Propósitos y Representaciones*, 9(SPE3). <https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1143>
- Sujadmoko, A. (2015). *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Depok: Rajawali Pers.
- Supranto, J. (2016). *Statistik Teori & Aplikasi* (A. Maulana (ed.); 8 Jilid 1). Erlangga.
- Syafira. (2022). *Pengamat: Korupsi Mrnahun Rusia Bikin Kapal Perang Moskva Karam*. *Jurnas.Com*. <https://www.jurnas.com/mobile/artikel/115662/Pengamat-Korupsi-Menahun-Rusia-Bikin-Kapal-Perang-Moskwa-Karam--/>
- Syarbaini, S., Rahman, A., & Djihado, M. (2002). *Sosiologi Dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tambunan, T. (2003). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tjokroamidjojo, B. (2000). *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Penerbit Universitas Indonesia. https://books.google.co.id/books/about/Good_Governance.html?id=Eskjaaamaaj&redir_esc=y
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pemangunan Ekonomi/Edisi Kesebelas/Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Toumahu, A. C. (2021). Perubahan Rusia Pada Masa Kepemimpinan Vladimir Putin. *Researchgate.Net*.

- <https://www.researchgate.net/publication/352437921>
- Transparency International. (2018). *Upaya Melumpuhkan Badan Anti Korupsi di Berbagai Belahan Dunia*. Ti.or.Id. https://ti.or.id/wp-content/uploads/2018/06/Serangan-AC-agencies-berbagai-negara_2018_4-1.pdf
- United Nations. (2004). *The Global Program Against Corruption: United Nations Anti-Corruption Toolkit*. Vienna: UNODC.
- UNDP. (1997). *Human Development Report 1997*. <https://www.undp.org/publications/human-development-report-1997>
- UNDP. (2000). *Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*, Dalam *Buletin Informasi Program Kemitraan Untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan Di Indonesia*. <https://www.undp.org/>
- Wati, R., Wati, W., & Hanifa, S. D. (2023). Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara China dan Rusia. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 63–79.
- Wibowo, E. (2013). *Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di ASEAN*. *Jurnal Ilmiah Feb Universitas Brawijaya*, 1–14.
- Wicaksana, I. (2015). *Understanding Russia II: Russia's Foreign Policy*. Universitas Erlangga.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*, Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widjanarko, W. (2021). *Analisis Hubungan Good Governance Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2013-2019*. *Jurnal Good Governance*, 17(2), 155–168. <https://doi.org/10.32834/Gg.V17i2.340>
- Wilson, R. (2016). Does Governance Cause Growth? Evidence from China. *World Development*, 79, 138–151. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.015>
- World Bank. (2015). *The East Asian Miracle: Economic Growth And Public Policy*. New York: NY: Oxford University Press.
- World Bank. Diakses Dari <https://data.worldbank.org/>, Di Akses Pada Tanggal 25 Juni 2022.
- World Bank. (2021). *The Worldwide Governance Indicators, 2021 Update*. Diakses Dari www.govindicators.org, Pada Tanggal 20 Juli 2022.
- Xinhua. (2022a). *Afrika Selatan Akan Lebih Perkuat Hubungan dengan BRICS*. Antaranews.Com. <https://m.antaranews.com/berita/3303887/afrika-selatan-akan-lebih-perkuat-hubungan-dengan-brics>
- Xinhua. (2022b). *China Catat Pertumbuhan Perdagangan Kuat dengan Negara-Negara BRICS*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/2954841/china-catat-pertumbuhan-perdagangan-kuat-dengan-negara-negara-brics>
- Yanikkaya, H. (2003). Trade Openness And Economic Growth: A Cross-Country Empirical Investigation. *Journal Of Development Economics*, 72(1), 57–89. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(03\)00068-3](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(03)00068-3)
- Yuslian, A. S. (2021). *Analisis Pengaruh Trade Openness Dan Indikator Good Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara ASEAN* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59712>

- Yunus, N. R. (2017). Sistem Pemerintahan Presidensial Negara Federasi Rusia. *'ADALAH*, 1(8). <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.9122>
- Yustika, A. E. (2013). *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, Dan Kebijakan*. Erlangga.